

BANGUN KERJASAMA PENDIDIKAN NONFORMAL

BERITA INDONESIA[®]

EDISI 35 TAHUN II ★ 30 MARET - 12 APRIL 2007

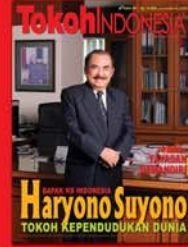
Rp 15.000 (Luar Jabodetabek Rp 16.500)



REFORMASI BIROKRASI

ISSN 1907-977X





Tempat Anda Membeli

MAJALAH TokohINDONESIA

MAJALAH BERBASIS WEBSITE TOKOH INDONESIA

Distributor Toko Buku:

PT. CENTRAL KUMALA SAKTI

Komplek Green Ville Blok BG No.67 Jakarta Telp. (021) 5640185, 5658088

■ **TB. GRAMEDIA** ■ Taman Anggrek Mall ■ Citraland Mall ■ Pondok Indah Mall ■ Mega Mall, Pluit ■ Hero Gatot Subroto ■ Melawai ■ Matraman ■ Kelapa Gading Mall ■ Cempaka Mas ■ Pintu Air ■ Gajah Mada ■ Cinere Mall ■ Metropolitan Mall, Bekasi ■ Bintaro Plaza ■ Mahkota Mas, Tangerang ■ Karawachi Mall, Tangerang ■ Daan Mogot Mall, Tangerang

■ **TB. GUNUNG AGUNG** ■ Taman Anggrek Mall ■ Pondok Gede ■ Blok M Plaza ■ Kwitang 6 ■ Kwitang 38 ■ Blok M Plaza ■ Kramat Jati Indah ■ Atrium Plaza ■ Tambun ■ Jl. Ir. Juanda, Bekasi ■ Arion Plaza ■ Depok Plaza ■ Citraland Mall ■ Sunter Mall ■ Hero Tendea ■ Trisakti

■ **TB. GUNUNG MULIA** ■ Jalan Kwitang

OFFICE, HOTEL, MALL, DLL

■ Ambassador Mall ■ Ranch Market, Kb. Jeruk ■ Cimone ■ Drug Store Hotel Sentral, Pramuka ■ Drug Store Hotel Sheraton, Gunung Sahari ■ Drug Store Hotel Maharaja, Tendea ■ Drug Store Hotel Century, Sudirman ■ Drug Store Hotel Menteng I ■ Drug Store Hotel Mega Matra, Matraman ■ Drug Store Hotel Menteng II ■ Drug Store Hotel Paninsula ■ Drug Store Hotel Ibis, Slipi ■ Drug Store Hotel Santika ■ Iana Drug Store Hotel Grand Melia, Rasuna Said ■ Anais Gift Hotel JW Marriot, Mega Kuningan ■ Drug Store Hotel Akasia ■ Drug Store Hotel Sahid Jaya ■ Drug Store Hotel Kristal ■ Drug Store Hotel Ambara ■ Hotel Classic, Jl. Samanudi ■ Hotel Mulia Senayan ■ Drug Store Hotel Beautique, Depan Mall Taman Anggrek Grogol ■ Mini Market Angkur 26, Jl. Angkur 26 Kayu Putih, Jaktim ■ Mini Market Ikhtiar, Jl. Utan Kayu No.91, Jaktim

■ PT Promexx, Toko Buku & Alat Tulis, Jl. Ir. Juanda ■ Kantin Permata, Gedung Plaza Permata Thamrin ■ Koperasi Wisma Bumi Putera, Sudirman

■ Bon's Café, Gedung Menara Mulia, Gatot Subroto ■ Tower Corner Gedung Graha Niaga, Sudirman ■ Mini Market Alamanda, Menara Dea K, Mega Kuningan ■ Esca Deli BEJ, Tower II ■ Koperasi Wisma Indomobil, Jl. MT Haryono Kav.8 ■ Koperasi Agape, Jl. MT Haryono Kav.04-05 ■ Tutik Mini Market, Jl. Siaga Raya Pejaten ■ Kopkar LIA, Kampus LIA Pengadegan ■ Mini Market Markaz, Jl. Radio Dalam Raya No.50 ■ Koperasi STIE Perbanas, Rasuna Said ■ Kopkar Wisma Kodel, Rasuna Said ■ Restoran Bona Petit Gedung Wisma Budi, Rasuna Said ■ Mini Market Basement Gedung Wisma 77 ■ Monika Mini Market, Gedung Wisma Adhi Graha ■ Hotel Fm Beautique, Jl. S Parman ■ Kantin BNI Kantor Pusat Sudirman ■ Cafeteria Elektrika, Rasuna Said ■ Kantin Depkes, Rasuna Said ■ Koperasi Depnaker RI, Gatot Subroto ■ PT Global Bisnis Center Bank Danamon, Sudirman ■ Mini Market Ananda, Rawa Sari ■ Lobby Drug Store Apartemen Kusuma Candra SCBD ■ Counter Majalah Wisma BCA, Sudirman ■ Swalayan Al Maidah ■ Drug Store Hotel Bina Sentra (Bidakara), Pancoran ■ Wartel Putra, Pulo Mas Utara ■ Menara Jamsostek, Gatot Subroto Lt.2 ■ Don's Mart ■ Valentine's Mart ■ Hotel Kemang ■ Hotel Millenium ■ Apartemen Mediterania Palace Kemayoran

■ Graha Surya Internusa, Rasuna Said ■ Hotel The Park Lane, Casablanca ■ Gedung Trans TV & Mega Bank

Distributor Agen:

■ **KEDARTON AGENCY:** Stasiun Senen, Jakarta Telp. 021-9119176

■ **AGEN UTAMA:** ■ KPA, Terminal Senen, Tlp.42877451 ■ MARLIN, Stasiun KA Senen, 08129956840 ■ HARIAN JAYA, Cawang, 08128309471 ■ ANTO'S, Kalimalang, 08129256715

■ DAVID OXTO, Stasiun KA Senen, 9119180 ■ PURBA ST, Stasiun KA Senen, 0816974343

■ TAMORA, Stasiun KA Senen, 9119175 ■ ARITONANG, Budi Utomo, 9220669

■ RAELMAN, Budi Utomo, 9238167 ■ SIHITE, Budi Utomo, 9214526 ■ PURBA K, Kuningan, 5264955 ■ NAIBAO, Cawang, 8577453 ■ SIMATUPANG, Cililitan, 80880572

■ SIMALUNGUN, Kramat, 88980567 ■ MILU, Blok M, 7200669 ■ BERLIAN, Pramuka ■ KA GROUP, Bekasi, 08129825236 ■ MANULLANG, Cimone, 08129590050 ■ YULIANI, Medan, 061-4157471 ■ MEDY, Surabaya, 031-83205231

Atau Hubungi:

BAGIAN SIRKULASI ■ E-mail: sirkulasi@tokohindonesia.com
 ■ JAKARTA Tel: 021-83701736 Fax: 021- 9101871 ■ BIRO BANDUNG 022-7830773 ■ BIRO MEDAN 061-7850260

TokohINDONESIA Majalah Biografi Pertama dan Satu-satunya di Indonesia

The Excellent Biography

www.tokohindonesia.com

THE EXPERIENCE SITE



Sampul/Illustrasi:
Dendy Hendrias

Edisi No. 35/Th.III/ 30 Maret - 12 April 2007

DARI REDAKSI 4
 SURAT KOMENTAR 5
 HIGHLIGHT/KARIKATUR BERITA 7
 BERITA TERDEPAN 12
 VISI BERITA 13

BERITA UTAMA

BIROKRASI NEGARA TAK PERNAH DIAUDIT

Di semua negara terdapat korupsi. Tetapi di Indonesia korupsi berkembang dan berakar sangat dalam, sehingga membudaya. Korupsi dilakukan secara besar-besaran, bersama-sama oleh banyak orang sekaligus, tanpa rasa risih dan malu. Korupsi sangat berkaitan dengan tidak efektif dan efisiennya birokrasi pemerintah. 14



Korupsi Selesai Cukup Secara Adat 18
 Birokrasi Masih Kental Aroma Korupsi 20
 Perjuangan Berat di Sarang Pencoleng 22
 Tiada Maaf Buat Koruptor 24
 Pemberantasan Korupsi di Jalan Buntu 25
 Korupsi Tabu Dunia-Akhirat 26

BERITA KHAS

Main Api Dengan Ijazah Sarjana 28

BERITA NASIONAL

Tak Satu pun Sepenuhnya Aman 30



Polri Berduka dan Tercoreng 31



LENTERA

APSPI JAWA BARAT DILANTIK

AL-ZAYTUN GERAKAN PETERNAKAN SAPI PERAH

Kampus Al-Zaytun sebagai pusat pendidikan terpadu yang menjadikan pendidikan sebagai gula dan ekonomi sebagai semut, semakin *concern* menggerakkan peternakan sapi perah 34

BERITA POLITIK

Golput Ancaman Pilkada Gubernur DKI 32
 Setelah Laptop Apa Lagi? 33
 PP37/2006 Berubah Jadi PP 21/2007 33

BERITA TOKOH

Irwandi Yusuf 42
 Mustafa Abubakar 43

BERITA EKONOMI

Menyelamatkan Pertumbuhan Ekonomi 44
 Hukum Pareto Antarpendapatan 45
 Menyoal Target Ekspor 20 Persen 46



Perombakan Tim Ekonomi Berpotensi 47
 Bermimpi Masuk The Big Five 48

BERITA HUMANIORA

Ke Surga Ala Junaina Mercy 49

BERITA MANCANEGERA

China Sedang Membangun Kerajaan 54



BERITA DAERAH

Gerakan Penanaman Pohon 50
 Pipa Gas Negara Lalui Purwakarta 50
 Tobasa Gelar Napak Tilas Nomensen 51
 Konferda PGRI Kukar Harus Diulang 51
 Silih Silang di Akhir Jabatan 52
 Kodam III Siliwangi Dukung Penghijauan 53

BERITA HUKUM

Sekarang Giliran Laks 56
 Tommy dan Dua Menteri 56
 Pil Pahit dari Cayman Islands 57



BERITA HANKAM

TNI dan Dilema Alutsista 58
 KRI Mandau Ringkus Kapal Ikan China 58

LINTAS TAJUK

Berlomba Korupsi 59

LINTAS MEDIA

Siapa Saja yang akan Terpeleset? 60

BERITA OLAHRAGA

Empat Raksasa Sepakbola Masih Terpuruk 61



Sekitar 2,5 juta Tiket Telah Dipesan 61
 Pelatnas SEA Games Dikhawatirkan Terhenti 62
 Pertarungan Rahman vs Condes Belum Jelas ... 62

BERITA KESEHATAN

Dokter Tolak Suntik Mati 63
 Unggas Hias di Kolong Ranjang 63

BERITA LINGKUNGAN

Menanti Sebuah Bleduk 64



BERITA BUDAYA

100 Tahun Gajah Mengamuk 65
 Prambanan Setelah Gempa 65
 Festival Keraton di Kalbar 65

BERITA PEREMPUAN

Srikandi Muda di Medan Laga 66

Pemimpin Umum:
Syaykh Dr AS Panji Gumilang

Pemimpin Redaksi:
Ch Robin Simanullang

Redaktur Senior:
MYR Agung Sidayu
Imam Supriyanto
Syahbuddin Hamzah
Dendy Hendrias
Suryo Pranoto

IN HEADNEWS (Liputan, Litbang & Pusdat):
Syahbuddin Hamzah (Redaktur Eksekutif)
Mangatur Lorieclide Paniroy (Wakil Redaktur Eksekutif)

Sekretaris Redaksi
Retno Handayani

Redaktur:
Suryo Pranoto
Haposan Tampubolon

Staf Redaksi:
Samsuri
Nawawi
Ikhwan Triatmo
Sarjiman
Henry Maruwas
Doan Adikara Pudan
M Subhan
Sanita Retmi
Amron Ritonga

Wartawan Foto:
Wilson Edward

Redaktur Bahasa dan Pracetak
Marjuka Situmorang
Mangatur Lorieclide Paniroy

Desainer:
ESERO Design, Arief Maulana

Biro Redaksi:
Medan: HM Aulia E Panggabean (Kepala)
Bontor Simanullang, Purwakarta: Bernard Sihite,
Tarakan: Sudirman Leonard Pohan

Penerbit:
PT Berita Satria Wiratama
Bekerjasama dengan Yayasan Pesantren Indonesia
dan PT Citraprinsip Publikitas Indoadprint

Komisaris:
Syaykh Dr AS Panji Gumilang

Direktur/Pemimpin Perusahaan:
Ch Robin Simanullang

Wakil Pemimpin Perusahaan:
Samsuri

Iklan dan Promosi:
Imam Supriyanto
Watty Soetikno

Keuangan dan Umum:
Mangatur Lorieclide Paniroy

Sirkulasi dan Distribusi:
Abdul Halim
Marjuka Situmorang

Harga:
Rp 15.000 (Luar Jabodetabek Rp 16.500)

Percetakan:
PT Gramedia
(Isi di luar tanggung jawab percetakan)

Alamat Redaksi/Tata Usaha:
Jalan Cucakrawa No.14A
Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan
Telp. (021) 8293113, 70930474, 83701736
Fax. 9101871

E-mail:
redaksi@berindo.com - iklan@berindo.com

Website:
www.beritaindonesia.co.id

ISSN: 1907-977X



foto: berindo wilson

Selaku Ketua Pengurus Daerah Asosiasi Peternak Sapi Perah Indonesia (APSPI) tingkat Jawa Barat, Syaykh AS Panji Gumilang melantik pengurus lengkap APSPI Jawa Barat.

Assamu'alaikum Wr. WB.
Salam Sejahtera

Sidang Pembaca yang Budiman,

Maraknya tindak korupsi dalam dua tahun terakhir, ibarat kata pepatah: *gugur satu tumbuh seribu*. Kasus korupsi paling *gres*, penyimpangan dana Perum Bulog sejumlah Rp 11,5 miliar yang akhirnya menggiring Direktur Utama Perum Bulog Widjanarko Puspojo ke rumah tahanan. Widjan, demikian panggilan akrabnya, sudah jatuh tertimpa tangga. Begitu Kejaksaan Agung memvonisnya sebagai tersangka, jabatan Wijan pun diambil alih orang lain.

Masih ada indikasi penyalahgunaan kekuasaan yang diduga dilakukan oleh dua menteri, berkaitan pencairan uang Tommy Soeharto sejumlah Rp 90 miliar dari Bank Paribas Cabang London ke rekening Departemen Hukum dan HAM, di BNI Cabang Tebet. Dua menteri tersebut, masih berkelit dan saling tuding soal pencairan uang tersebut. Namun di mata publik mereka sudah cacat hukum, mengurus uang di luar wewenangnya.

Diilhami oleh maraknya tindak korupsi tersebut, *Berita Indonesia*, merancang laporan yang mencoba mengarahkan perhatian publik bahwa untuk menekan tindak korupsi, pencegahan lebih baik daripada penindakan. Dan tindakan pemberantasan yang dilakukan oleh KPK—karena begitu banyaknya kasus korupsi di negeri ini, nomor dua tertinggi di Asia setelah Filipina—tidak bisa terhindar dari kesan tebang pilih.

Langkah pencegahan tersebut hanya bisa dilakukan dengan mereformasi birokrasi pemerintahan, hukum dan legislatif. Kemasannya bisa diikuti dalam *Berita Utama* bertajuk, *Reformasi Birokrasi*.

Berita Khas kami kemas dari berbagai laporan surat kabar ibukota yang menyorot revisi UU Pilpres (nomor 23/2003) yang menyaratkan pendidikan lulusan sarjana untuk calon presiden mendatang (2009). Syarat ini mendapat reaksi keras dari mantan Presiden Megawati—mungkin satu-satunya Capres yang bukan lulusan sarjana (S-1). Kami juga menyajikan *Berita Terdepan* yang mengupas secara ringan pertarungan antara Cabug dari PKS Adang Daradjatun yang dikeroyok oleh 15 partai yang mendukung Cabug Fauzi Bowo. *Adang Dikeroyok Foke Melenggang*, demikian judulnya. Simak pula *Visi Berita* yang mengupas *Reformasi Birokrasi*.

Di rubrik *Lentera* kali ini kami menyajikan program peternak sapi perah, yang tergabung dalam wadah organisasi Asosiasi Peternak Sapi Perah Indonesia (APSPI), yang berencana turut berkontribusi mewujudkan "Program Indonesia Kolam Susu", sebagai bagian dari sebuah revolusi putih.

Masih banyak laporan menarik lainnya, seperti di rubrik-rubrik olahraga, mancanegara, nasional, perempuan dan budaya. Jangan lupa mencermati *highlight* sepanjang bulan ini.

Selamat menikmati sajian *Berita Indonesia*, sebab kami senang bilamana Anda puas.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Surat atau komentar tentang apa saja baik berkenaan dengan isi majalah Berita Indonesia maupun ide/gagasan/pandangan tentang isu-isu aktual dapat dikirimkan ke Redaksi Berita Indonesia, dengan alamat sebagai berikut:

- http : //www.beritaindonesia.co.id/surat_pembaca/
- email : redaksi@berindo.com
- surat : Jalan Cucakrawa No.14A Bukit Duri, Tebet, Jaksel 12840

Telp. (021) 70930474, 8293113
(021) 83701736
Fax. (021) 8293113, 9101871

Politik Pajak Yudhoyono

Lancar tidaknya pembangunan negeri ini, salah satunya ditentukan oleh lancar tidaknya pajak yang dibayarkan rakyatnya. Dari pajak itulah negara ini seharusnya menggerakkan pembangunannya di segala bidang. Namun, yang tidak semua pajak mengalir ke negara. Sebagian mengalir ke kantong-kantong pribadi petugasnya. Kalau terjadi, tentu hal itu menjadi urusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pihak penegak hukum. Namun yang perlu dikembangkan saat ini adalah kesadaran membayar pajak. Kesadaran itu akan tumbuh apabila masyarakat betul-betul merasakan manfaat pajak yang dibayarkan ter-

sebut. Itulah sebabnya perlu kontrol yang kuat agar pajak betul-betul mengalir bagi kepentingan seluruh masyarakat.

Selain itu, perlu keteladanan para pemimpin, mulai presiden, anggota DPR, sampai kepala desa untuk membayar pajak, agar masyarakat tahu bahwa para pemimpin mereka bayar pajak. Tidak ada salahnya apabila hal tersebut dipublikasikan, sehingga masyarakat bisa meladani dengan baik.

Saya sangat mendukung langkah yang dilakukan Presiden Yudhoyono yang membayar pajak dan diliput media massa. Bukan hanya agar masyarakat mengetahui bahwa presidennya juga bayar pajak, melainkan juga bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat.

Dari sana masyarakat bisa menuntut hak-haknya sebagai warga negara diwujudkan. Kalau kita belum juga mendapatkan hak sebagai warga negara, kita wajib menuntutnya.

Sugiyono

sugiyonosurat@yahoo.com

Perang Tanding Jelang 2009

Bola salju itu mulai digulirkan. Beberapa elite politik mulai mewacanakan adanya syarat bagi seseorang yang ingin mencalonkan diri menjadi presiden. Wacana yang berkembang menyangkut

pendidikan seorang calon presiden (capres) harus bergelar minimal Strata 1 (S1). Bola salju tentang syarat menjadi presiden itu dengan jelas ditunjukkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Seolah menimbulkan kesan, keinginan memunculkan perubahan pada UU politik, terutama menyangkut syarat menjadi persiden muncul dari SBY. Alasan yang dikemukakan para elite politik cukup simpel, SBY ingin menjegal para pesaingnya. Terutama jika Megawati Soekarnoputri mencalonkan diri lagi. Kita tahu bahwa Megawati tidak akan bisa mencalonkan diri jika syarat pendidikan minimal menjadi presiden itu diterapkan.

Kita patut menyayangkan wacana yang dikembangkan oleh para elite politik itu. Padahal SBY sendiri tidak pernah mengeluarkan pernyataan yang menyiratkan keinginan untuk mengubah syarat menjadi presiden. Saya melihat, ada yang bermain di balik wacana yang muncul mengenai syarat menjadi capres. Tersirat keinginan dari sejumlah elite politik untuk menempatkan salah seorang calon sebagai pihak yang teraniaya, sama seperti ketika SBY akan mencalonkan diri menjadi presiden.

Untuk itu, masyarakat perlu diberi pelajaran politik menyangkut wacana yang

BUNG WARTO



berkembang akhir-akhir ini. Jangan sampai masyarakat dibodohi oleh pernyataan-pernyataan yang dibangun sejumlah elite politik.

Sutrisno
tole_malaka@yahoo.com

Selamatkan Mata Air Indonesia

Air merupakan kebutuhan vital manusia agar dapat bertahan hidup. Air adalah sumber kehidupan, tidak saja untuk manusia, tetapi juga tumbuhan dan hewan. Dari ketiga makhluk yang menghuni bumi ini, manusialah yang paling berperan dalam perubahan persediaan air di bumi. Manusia dapat memengaruhi jumlah air yang ada di dunia.

Itu terjadi karena manusia adalah pengguna air terbesar. Air digunakan manusia untuk minum, mandi, mencuci, dan bahkan untuk kebutuhan industri.

Dalam memperingati hari air sedunia, patutlah kiranya kita lebih memerhatikan ketersediaan air di bumi. Penebangan hutan, pencemaran air, pemborosan dalam penggunaan air adalah beberapa faktor yang menyebabkan kelangkaan air di dunia.

Permasalahan kian rumit ketika bertambahnya jumlah penduduk tidak diimbangi dengan persediaan air yang memadai. Terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dan perediaan air.

Pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan juga menjadi pemicu berkurangnya air. Wilayah yang seharusnya menjadi daerah resapan air, dengan tanpa pertimbangan, diubah menjadi vila, rumah mewah, dan tempat hiburan.

Reza Pratama
reza_buluk@yahoo.com

Tawar-menawar soal 'Reshuffle'

Isu reshuffle terus bergulir. Setiap elite partai politik mulai melakukan manuver untuk memberikan tawaran kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyangkut nama-nama yang bisa mengisi pos-pos menteri.

Demi menggolkan calonnya, para elite politik tidak segan membuka borok para menteri yang nota bone diusung oleh partai. Bagaimana dengan presiden? Dalam isu reshuffle, SBY berkali-kali menegaskan bahwa para elite politik tidak usah menggaduhkan. Artinya, presiden memiliki pertimbangan sendiri, kapan harus melakukan reshuffle, dan siapa orang yang pas untuk menduduki pos menteri.

Presiden juga pasti punya pertimbangan sendiri, kenapa sampai sejauh ini tidak melakukan reshuffle.

Kita harus memaklumi, saat ini Indonesia sedang dilanda berbagai bencana. Banjir, gempa, longsor, dan berbagai

kecelakaan tentunya harus menjadi prioritas pemerintah.

Presiden SBY lebih mengutamakan tanggap darurat dan bencana, daripada harus mengganti para menteri.

Memang, ada beberapa pos yang kurang optimal menjalankan fungsinya. Tetapi bukan menjadi alasan utama, untuk secepatnya melakukan reshuffle.

Masalah yang paling mendesak adalah bagaimana melakukan upaya-upaya yang tepat dan cepat untuk mengatasi berbagai persoalan yang terjadi pada bangsa ini.

Latifah
andin--_setya@yahoo.com

RUU Kementerian Negara Usulan DPR Inkonstitusional

Keinginan DPR untuk lebih memperluas kewenangannya tampak dari upaya campur tangan DPR dalam pembentukan kabinet melalui usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kementerian Negara. Artinya, hak prerogatif presiden untuk membentuk kabinet tidak ada lagi. Padahal wewenang presiden sebagai kepala pemerintahan sudah dijamin dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945.

Usul DPR tersebut dapat mengubah secara drastis struktur dan jumlah kementerian yang ada sekarang. Hal ini akan mempunyai implikasi luas yang sangat merugikan negara dari segi penggunaan sumber daya anggaran dan pengaturan kepegawaian untuk mengubah kementerian yang ada serta dapat medelegitimasi pemerintah SBY-JK. Oleh karenanya, resistensi terhadap RUU tersebut muncul dari berbagai kalangan, termasuk sejumlah pakar hukum tata negara dan administrasi pemerintahan. Mereka berpendapat bahwa usulan yang membatasi kekuasaan presiden dalam konstitusi merupakan tindakan inkonstitusional. Kedudukan presiden dan DPR adalah sejajar dan inependen, tidak untuk saling menjatuhkan. Dengan demikian, apa yang sedang diupayakan DPR itu, jelas merupakan sebuah bentuk tindakan kesewenang-wenangan yang tidak berdasarkan aturan. Sebaiknya biarkanlah pembentukan kabinet itu sebagai hak prerogatif presiden karena formasi kabinet tentu disesuaikan dengan kebutuhan ketika yang bersangkutan sedang menjabat sebagai presiden. Masih banyak tugas DPR lainnya yang butuh perhatian dan perlu dilakukan daripada harus mencampuri urusan yang menjadi tugas dan wewenang eksekutif.

R Satya Nugraha
Satya_2006@plasa.com

PASTIKAN

TARIF IKLAN BERITAINDONESIA®

Halaman	Ukuran	Harga
Jacket Cover	204 x 268 mm	Rp. 40.000.000
Cover 2	204 x 268 mm	Rp. 20.000.000
Cover 2 Plus	408 x 268 mm	Rp. 35.000.000
Cover 3	204 x 268 mm	Rp. 17.000.000
Cover 3 Plus	408 x 268 mm	Rp. 30.000.000
Cover 4 (Kulit Belakang Luar)	204 x 268 mm	Rp. 25.000.000
1 Him Dalam (Full Page)	204 x 268 mm	Rp. 12.000.000
1 Him Dalam Berhadapan (Facial Page)	408 x 268 mm	Rp. 25.000.000
1 Him Dalam Tengah (Center Page)	408 x 268 mm	Rp. 32.000.000
Advertorial / Pariwara	204 x 268 mm	Rp. 12.000.000
2/3 Him Vertical Trimmed	204 x 213 mm	Rp. 9.000.000
2/3 Him Horizontal Trimmed	153 x 268 mm	Rp. 8.000.000
1/2 Him Horizontal Trimmed	102 x 268 mm	Rp. 7.000.000
1/2 Him Vertical Trimmed	204 x 134 mm	Rp. 6.000.000
1/3 Him Vertical Trimmed	204 x 67 mm	Rp. 4.000.000
1/3 Him Horizontal Trimmed	51 x 268 mm	Rp. 3.000.000
Iklan kupung (kanan & kiri) minimal lima kali pemuatan		@ Rp. 5.000.000

PEMASANGAN IKLAN:

Telp. (021) 8293113, 70930474, 83701736

Fax.(021) 8293113, 9101871

14/03/2007

Mantan Penyidik KPK Dilaporkan ke Timtas Tipikor

Sugeng Teguh Santoso, penasehat hukum terdakwa perkara korupsi program pembangunan perkebunan kelapa sawit satu juta hektar di Kalimantan Timur, Gubernur nonaktif Kalimantan Timur Suwarna AF, melaporkan mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) OH Napitupulu kepada Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tim Tastipikor) atas tuduhan dugaan percobaan korupsi.

Pengaduan Sugeng pada hari Rabu itu diterima Direktur Hak Asasi Manusia Tindak Pidana Khusus Kejaksaan, Zai-nuddin Nare. Sehari sebelumnya Sugeng juga mendatangi Polri untuk mengadukan Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Tumpak Hatorangan Penggabean serta Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Suwarna AF, yakni Wisnu Broto, KMS Ronni, Firdaus, dan Rudi Margono. Pengaduan ini terkait dengan barang bukti yang hanya berbentuk fotokopian.

Menanggapi pengaduan Sugeng, juru bicara KPK Johan Budi mengungkapkan bahwa OH Napitupulu bukan lagi penyidik KPK, sehingga pengawasan internal KPK tidak dapat lagi memanggilnya. Namun KPK siap membantu data dan informasi bila Tim Tastipikor atau Mabes Polri menindaklanjuti pengaduan Tim Pembela Swarna AF.

Pemerintah Usul Capres Berjajah S1

Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Ma'ruf mengusulkan agar calon presiden (capres) dalam Pemilu 2009 minimal berjajah S1. Hal itu menjadi usulan pemerintah dalam draf revisi paket UU bidang politik yang disampaikan tim pokja Depdagri dalam rapat konsultasi dengan pimpinan partai-partai politik di Hotel Millenium, Jakarta.

Persyaratan yang diajukan Pemerintah ini menjadi perdebatan karena dianggap sebagai upaya menjegal Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam Pemilihan Presiden 2009 mendatang. Megawati sendiri pada Jumat (16/3) tidak banyak berkomentar dan hanya menyatakan semua terserah rakyat yang memilih.

15/03/2007

Penumpang "Menyandera" KA

Kereta api dari Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten, menuju Jakarta, Kamis pagi "disandera" sekitar 500 penumpang saat berhenti di Stasiun Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Penyanderaan yang terjadi secara spontan dan tidak direncanakan itu mengakibatkan kereta api tidak dapat melanjutkan perjalanan menuju Stasiun Tanah Abang di Jakarta Pusat. Menurut para penyandera, ini merupakan bentuk kekecewaan penumpang terhadap pe-

layan PT KA karena layanan yang makin hari makin buruk.

Para pengunjung rasa mengharapkan agar PT Kereta Api (KA) memperbaiki fasilitas dan layanan lintas barat jurusan Jakarta-Rangkasbitung. Jalur itu dinilai sudah buruk, sehingga dan hampir setiap hari mogok karena lokomotif nomor BB 304 yang melayani jalur ini sudah berusia 40 tahun

Lokomotif BB 304 sebenarnya hanya lokomotif pengganti dari lokomotif CC 201 yang biasa menarik rangkaian gerbong KA Jakarta-Rangkasbitung. Tetapi karena bobotnya lebih berat (90 ton), membuat lokomotif CC 201 tidak bisa melewati jembatan KA di atas Sungai Cisadane di Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, yang sedang diperbaiki setelah ambles akibat banjir pada Februari lalu.

Pengangguran Naik 2,5 juta orang

Menteri Tenaga Kerja Erman Suparno memperkirakan jumlah pengangguran naik kurang lebih sebesar 2,5 juta pada tahun 2007. Peningkatan ini disumbang angkatan kerja baru dan angkatan kerja yang menganggur akibat bencana alam yang beruntun. Erman mengungkapkan, jumlah pengangguran disumbang angkatan kerja yang baru menyelesaikan pendidikan sebesar 2,3 juta. Sementara bencana banjir Jabodetabek menyumbang jumlah pengangguran sebesar 223 ribu orang, gempa

Karikatur Berita



yang menimpa Yogyakarta dan daerah sekitarnya menyumbang 60 ribu orang, bencana lumpur Sodoarjo menyumbang pengangguran 20 ribu orang. Sementara gempa yang mengguncang Sumbar menghilangkan lapangan kerja bagi 15 penduduk dan bencana longsor di Nusa Tenggara Timur (NTT) menyumbang angka pengangguran sebesar 600 ribu orang.

16/03/2007

Greenpeace: Indonesia Perusak Hutan Tercepat

Dewasa ini, Indonesia menjadi perusak hutan tercepat di dunia. Selama 2000-2005, Indonesia diketahui telah menghancurkan 2% dari luas hutannya setiap tahun. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan perusakan hutan di Brasil yang hanya 0,6% per tahun. Dalam ukuran luas, Indonesia telah menghancurkan 1,87 juta hektar hutan setiap tahun atau sebanding dengan 300 kali luas lapangan sepak bola setiap jam. "Angka terbaru ini mencerminkan tidak adanya keinginan maupun kemampuan politis pemerintah untuk menghentikan kehancuran hutan yang sudah parah ini," kata Hapsoro, Juru Kampanye Hutan Regional Greenpeace Asia Tenggara di Jakarta. Untuk itu, Greenpeace mengajak masyarakat Indonesia menyelamatkan hutan yang tersisa dengan menandatangani petisi berisi tuntutan agar pemerintah Indonesia menghentikan penebangan hutan skala besar, mencabut semua izin konversi lahan hutan untuk keperluan perkebunan kelapa sawit dan industri kertas yang telah merusak kelestarian hutan.

17/03/2007

Pemerintahan Palestina Disetujui Parlemen

Palestina akhirnya berhasil mengakhiri setahun gejala berdarah dan pertempuran bersenjata antarfaksi Hamas dan Fatah. Perdamaian yang digagas dalam pertemuan Mekkah, Februari 2007 itu ditandai dengan terbentuknya pemerintahan koalisi yang telah disetujui parlemen hari Sabtu. Namun dari pihak Israel, dengan tegas menyatakan tidak akan mau berunding dengan pemerintahan koalisi Palestina yang baru.

Kabinet baru yang tetap dipimpin Perdana Menteri Ismail Haniyah, terdiri dari 25 orang. Dari komposisi kabinet, faksi Hamas memperlihatkan kesan "mengalah". Faksi pemenang pemilu Januari 2006 dengan meraih 75 kursi di parlemen, hanya menunjuk 12 politisi menjadi anggota kabinet. Sementara, faksi Fatah yang meraih 45 kursi dapat mendudukkan 6 (enam) orang politisinya di kabinet. Sementara 7 anggota kabinet lainnya berasal dari kelompok independen sebanyak 5 serta masing-masing satu orang dari Partai Rakyat Palestina dan Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina.

18/03/2007

Korban AdamAir Gugat Boeing

Menyusul gugatan keluarga korban jatuhnya pesawat Mandala di Medan 2005, sebanyak 11 keluarga korban jatuhnya pesawat AdamAir yang jatuh di perairan Majene, Sulawesi Barat, juga menggugat Boeing sebagai perusahaan pembuat mesin pesawat dan Parker Hanison sebagai

perusahaan pembuat alat pengatur kemudi atau *power control unit* (PCU). Menurut kuasa hukum keluarga korban AdamAir, David Abraham dari Kantor Advokat Edward Abraham, Juris Doctor-David Abraham & Partners, pihak Parker dan Boeing dinilai bertanggung jawab atas tragedi jatuhnya AdamAir 1 Januari 2000, akibat rusaknya PCU.

Meski Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) belum merampungkan penyelidikan tentang penyebab kecelakaan, David Abraham memiliki fakta yang bisa menjelaskan bahwa AdamAir jatuh karena PCU tidak berfungsi. Menurutnya, kecelakaan AdamAir mirip dengan Silk Air yang jatuh di Sungai Musi, Sumatera Selatan tahun 2007, yang jatuh karena tidak berfungsinya *rudder* (kemudi tegak untuk membelokkan pesawat). Menurut David Abraham, fakta itu bisa digunakan untuk melawan Boeing sebagai perusahaan pembuat mesin pesawat dan Parker Hanison sebagai perusahaan pembuat alat pengatur kemudi atau *power control unit* (PCU). Bukti yang akan diajukan di pengadilan California Amerika Serikat adalah transkrip catatan ATC Indonesia dan Singapura.

19/03/2007

Umat Hindu Rayakan Nyepi

Hari Raya Nyepi tahun Saka 1929 yang jatuh pada Senin dirayakan umat Hindu dengan hikmat. Hari raya Nyepi berlangsung sejak matahari terbit pada Senin pukul 06.00 hingga terbit kembali Selasa (20/3), dilaksanakan dengan menengalkan semua kegiatan duniawi dan

Karikatur Berita



hanya berdiam di rumah untuk berdoa dan berpuasa. Nyepi dirayakan dengan *brata penyepian* (ritual penyepian) melalui *catur brata penyepian* (empat ritual penyepian), yakni *amati gni* (tidak menyalakan api), *amati lelungan* (tidak bersenang-senang), *amati karya* (tidak bekerja), dan *amati lelungan* (tidak berpergian). Tujuan *catur brata penyepian* ini adalah untuk mencapai kesucian lahir batin, pengendalian diri agar mampu menyelamatkan dirisendiri dan orang lain dari segala kesusahan. Selama perayaan Nyepi, Provinsi Bali yang mayoritas penduduknya menganut agama Hindu, tampak seperti pulau tak berpenghuni. Keadaan ini kontras dengan predikat Bali sebagai salah satu pusat wisata dunia yang senantiasa rama dikunjungi turis-turis mancanegara. Akan tetapi, para turis yang berkunjung pada saat perayaan Nyepi justru ikut tenggelam dan menikmati keheningan Bali.

Golkar Bukan "Bunker" Koruptor

Ketua Umum Partai Golkar yang juga Wakil Presiden RI kembali menegaskan bahwa partai yang dipimpinnya itu bukan "bunker" bagi koruptor. Oleh karena itu, mereka yang masuk ke partai berlambang pohon beringin itu hendaknya tidak berharap dapat berlindung dari jangkauan aparat penegak hukum.

Hal itu diungkapkan Jusuf Kalla pada saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) kader fungsional Angkatan Muda Pembaruan Indonesia (AMPI) di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, pada

Senin malam. Dalam kesempatan itu, Jusuf Kalla yang juga Ketua Dewan Pembina AMPI mengharapkan agar AMPI juga tidak menjadi tempat berlindung bagi kader-kader yang berbuat salah.

20/03/2007

Anak Buah Noordin Disergap di Yogyakarta

Aparat kepolisian dari Datasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror menangkap kelompok yang diduga jaringan teroris Abu Dujana, anak buah Noordin M. Top, Selasa (20/3). Mereka dikaitkan dengan aksi-aksi teror, seperti bom di Hotel JW Marriott dan Bom di depan Kedubes Australia.

Penangkapan dilakukan dengan menyergap kelompok itu di Jl. Lingkar Utara, Dusun Karangnongko, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Baku tembak yang sempat terjadi saat penyergapan menewaskan satu tersangka, Aman Sunaryo (39), warga Magelang, Jawa Tengah dan melukai seorang tersangka lainnya.

Menurut Kapolda DI Yogyakarta Brigjen Anggor Raharja Hari Anwar, kelompok itu diduga membawa bahan peledak saat disergap. Aparat telah menyita kardus yang diduga berisi bahan peledak, tiga kendaraan bermotor, dan senjata M-16, pistol, dan peluru.

Rabu (21/3), polisi menemukan ribuan butir munisi, ratusan kilogram potasium, 200 detonator aktif, senjata api, dan bahan peledak lain di bunker rumah Silas, salah satu anak buah Nursdin M. Top. Sabtu (24/3), polisi menggeledah

rumah kontrakan anak buah Nurdin M. Top lainnya, Sarwo Edi alias Suparjo dan menemukan catatan berupa peta yang menggambarkan beberapa lokasi di kawasan Jakarta, Semarang dan Surabaya. Lokasi ini diduga menjadi target serangan bom oleh kelompok Abu Dujana. Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Sisno Adiwidoto mengungkapkan Polri sudah mencegah peledakan Bom di 20 lokasi yang konon menjadi target serangan itu.

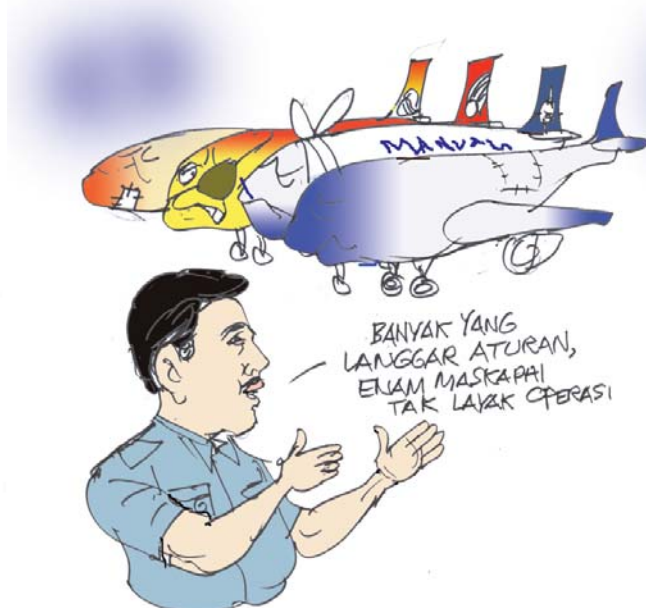
21/03/2007

Hasanuddin Divonis 20 Tahun

Hasanuddin alias Slamet Raharjo, terdakwa kasus mutilasi terhadap tiga pelajar SMA Poso pada 29 September 2005 divonis 20 tahun penjara di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Dua tersangka lainnya, Lilik Purnomo dan Irwanto divonis masing-masing 14 tahun penjara.

Ketua majelis hakim Binsar Siregar menilai Hasanuddin yang didakwa sebagai otak mutilasi, secara sah dan meyakinkan telah menggerakkan dan melakukan secara bersama-sama tindak pidana terorisme sesuai dengan dakwaan primer pasal 1 UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Terorisme. "Terdakwa terbukti melakukan tindakan terorisme yang membuat warga ketakutan," kata Agus Nugroho, salah satu anggota majelis hakim.

Mendengar vonis itu, kuasa hukum Hasanuddin dari Tim Pembela Muslim (TPM), Asluddin Hatjani menyatakan masih berpikir. Sedangkan Hasanuddin sebagai terdakwa mengatakan kemungkinan besar akan mengajukan banding. Sementara Abubakar Raside, yang menjadi kuasa



hukum dua terdakwa lainnya mengungkap keberatan atas vonis hakim.

Pejabat dan PNS Wajib Bayar Pajak

Dirjen Pajak Departemen Keuangan Darmin Nasution mengatakan pihaknya akan membuat daftar para pejabat negara dari eselon empat sampai eselon satu untuk dilihat kepatuhannya dalam membayar pajak. Menurutnya, setiap PNS wajib mematuhi perundangan perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak berencana membuat daftar nama pejabat eselon empat hingga eselon satu untuk dilihat apakah sudah memiliki NPWP atau sudah mengisi SPT Pajak. Jika ada pejabat negara yang tidak memenuhi kewajiban pajak akan dilaporkan kepada atasannya untuk diberikan tindakan. "Kalau pegawai departemen yang tidak taat, kami akan lapor ke menternya. Tapi kalau menternya yang tidak taat, kami akan lapor ke Presiden," tuturnya sesuai menerima Presiden dan Ibu Negara Ani Yudhoyono menyerahkan SPT. Menurut Darmin, pihaknya akan memberi waktu dua bulan dari batas akhir 31 Maret ini untuk melaporkan ketidakpatuhan para pejabat negara tersebut ke atasannya. Sebab, mungkin saja para pejabat tersebut tetap membayar pajak, tapi terlambat.

22/03/2007

Pakistan Uji Coba Rudal Jelajah

Perlombaan senjata terus menghantui kawasan Asia. Pakistan yang terus mengembangkan persenjataannya sejak beberapa dasawarsa, kembali unjuk gigi dengan persenjataan terbarunya. Hari Ka-

mis, militer negara itu berhasil melakukan uji coba peluncuran peluru kendali (rudal) jelajah 700 kilometer dan mampu menghindari deteksi radar. Rudal Pakistan paling mutakhir ini diberi nama Haft VII Babur. Rudal ini diketahui mampu membawa berbagai hulu ledak nuklir. Haft VII Babur merupakan versi terbaru dan terancang dari rudal Babur yang untuk pertama kalinya di uji coba tahun 2005, dengan daya jelajah 500 kilometer. Februari lalu, Pakistan juga telah berhasil menguji rudal jarak jauhnya, Haft VI (Shaheen II), yang memiliki daya jelajah 2.000 kilometer. Upaya Pakistan melakukan uji coba berbagai rudal berkemampuan nuklir diyakini sebagai langkah menandingi kekuatan senjata negara tetangganya, India.

23/03/2007

Batas Akhir Penarikan Pasukan AS dari Irak Disepakati

Selambat-lambatnya 1 September 2008, pasukan tempur AS dari Irak sudah harus ditarik seluruhnya. Penarikan ini disepakati Dewan Perwakilan Rakyat AS dalam sebuah voting yang dimenangkan pihak pendukung sebanyak 218 suara dibanding 212 suara yang tidak menyetujui batas akhir penarikan pasukan AS itu dari Irak. Keputusan DPR AS ini dituangkan dalam UU Alokasi Anggaran Darurat Perang Irak dan Afganistan sebesar 124 miliar dolar AS. Sebelumnya, Senat AS sudah merencanakan 31 Maret 2008, namun masih akan dibicarakan lagi minggu ini, karena DPR dan Senat AS harus memiliki

kesepakatan bersama tentang batas akhir penarikan seluruh pasukan AS dari Irak.

Menanggapi keputusan DPR AS itu, Presiden George W. Bush menuduh Demokrat merusak dan tidak menghargai hasil kerja pasukan AS di Irak. Ia bertekat memveto keputusan DPR itu. Untuk bisa menolak veto presiden, DPR dan Senat harus bisa merangkul dua per tiga suara.

24/03/2007

Indosat Diduga Hindari Pajak

Manajemen Indosat diduga secara sengaja membuat laba perusahaan tuun dalam dua tahun terakhir guna menghindari pembayaran pajak secara benar. "Pemerintah harus tegas dengan dugaan rekayasa keuangan yang terus dilakukan manajemen Indosat dalam beberapa tahun terakhir," ujar Anggota DPD Marwan Batubara.

Modus yang dilakukan adalah dengan membuat laba turun sehingga pembayaran pajak juga semakin mengecil. Sementara itu, pemilik mayoritas saham (*Singapura Technologies Telemedia-STT*) mengambil keuntungan optimal dari tender pengadaan barang, investasi, dan keuntungan operasional.

Sehari sebelumnya, Direktur Keuangan PT Indosat Tbk Wong Heang Tuck, menjelaskan bahwa Indosat dan anak perusahaannya mengalami penurunan laba bersih 13,12% dari Rp 1,623 triliun pada 2005 menjadi Rp 1,41 triliun pada 2006. lebih lanjut ia menjelaskan penurunan labah bersih akibat peningkatan beban operasi sekitar 11,38 persen dari Rp 7,937 triliun menjadi Rp 8,84 triliun, sehingga meng-

Karikatur Berita



akibatkan laba operasional turun menjadi Rp 3,398 triliun dari Rp 3,651 triliun.

Selain itu, total pendapatan meningkat 5,61% dari Rp 11,589 triliun menjadi Rp 12,239 triliun, sedangkan beban bersih lain-lain naik menjadi Rp 1,375 triliun dari 1,299 triliun sehingga mengakibatkan laba sebelum pajak tergerus 5,85 persen menjadi Rp 2,022 triliun dari Rp 2,353 triliun.

25/03/2007

HUT Ke-50 Uni Eropa, Momentum Keluar dari Krisis Konstitusi

Uni Eropa (UE), kini genap berusia 50 tahun. Organisasi yang pada awal berdirinya bernama Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) berdiri berdasarkan Traktat Roma 25 Maret 1957 dengan 5 negara sebagai anggota, yakni Jerman, Belgia, Italia, Luksemburg, dan Belanda. Di usianya yang ke-50, Uni Eropa memiliki 27 negara sebagai anggota. Dalam memperingati HUT ke-50, Uni Eropa pantas berbangga dengan sejumlah keberhasilan yang telah diraihinya, terutama keberhasilan meningkatkan standar hidup masyarakat Eropa ke level yang tinggi, yang sebelumnya tidak pernah tercapai.

Namun, dibalik keberhasilan itu, Uni Eropa masih memiliki ganjalan serius, yakni kegagalan menyepakati konstitusi UE, setelah masyarakat Perancis dan Belanda menolak rancangan konstitusi UE dalam satu referendum tahun lalu. Oleh karena itu, HUT ke-50 ini, dimanfaatkan para pemimpin UE untuk keluar dari krisis konstitusi dengan sebuah kesepakatan yang tertuang dalam Deklarasi Berlin.

26/03/2007

Dukung RI Terhadap Resolusi PBB atas Irak Disesalkan

Keputusan Indonesia mendukung draf resolusi sehingga menjadi Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747, yang memuat sanksi tambahan kepada Iran, mendapat reaksi keras dari berbagai kalangan di dalam negeri. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, juga bereaksi sangat keras. Bahkan sejumlah anggota DPR Komisi I berencana akan menggunakan hak interpelasi untuk mempertanyakan kebijakan tersebut.

Selasa, Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda mengatakan dukungan Indonesia terhadap resolusi PBB adalah untuk semakin mendorong solusi damai atas masalah nuklir Iran. Ia mengharapkan agar resolusi itu dilihat sebagai kelanjutan dari resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB no 1737 yang tidak dilaksanakan Iran, yaitu resolusi yang meminta Iran menghentikan aktivitas pengayaan uraniumnya. Ditambahkannya, langkah RI menyetujui resolusi DK PBB dimaksudkan menjadikan kawasan Timur Tengah sebagai kawasan yang bebas senjata pemusnah massal, termasuk nuklir. Itu sekaligus menjadi penegasan bahwa ketentuan-ketentuan dalam perjanjian larangan penyebaran senjata nuklir (Traktat Nonproliferasi Nuklir/NPT) juga mengikat semua.

27/03/2007

Mantan Presiden Habibie Penuhi Panggilan KKP

Mantan Presiden Habibie memenuhi

panggilan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Indonesia-Timor Leste, Selasa, untuk mendengarkan keterangan dan kesaksiannya, sehingga memberi pemahaman yang utuh tentang berbagai kebijakan politik menjelang jajak pendapat, termasuk dinamika hubungan dan koordinasi dengan pihak internasional, khususnya PBB.

Pertemuan yang dilaksanakan secara tertutup di kantor The Habibie Center, Kemang, Jakarta Selatan, dihadiri Ketua Bersama KKP Benjamin Mangkudilaga, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Muladi dan sejumlah anggota KKP. Habibie menyetujui diberlakukannya otonomi khusus (otsus) bagi provinsi Timtim pada Juli 1998. Desember 1998, ia menyetujui diselenggarakannya jajak pendapat bagi rakyat Timtim untuk menerima atau menolak Otsus. Hasil jajak pendapat, 98,5% menolak Otsus, sehingga Timtim berpisah dari RI.

Penyelenggaraan jajak pendapat diwarnai tindak kekerasan dan beberapa kejadian digolongkan sebagai pelanggaran HAM berat berdasarkan penyelidikan dan penyidikan Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM di Timtim, Kejaksaan Agung RI, serta unit kejahatan berat pada Jaksa Penuntut Umum Timor Leste.

Sehari sebelumnya, Senin (26/3), KKP telah meminta keterangan dari mantan Uskup Carlos Felipe Ximenes Belo. Belo mengungkapkan pascapengumuman hasil jajak pendapat pada 4 September 1999 banyak rumah dan perkantoran dibakar, diselingin rentetan bunyi tembakan. Sekitar 5.000 orang terpaksa mengungsi.



Perahu Koalisi Jakarta (KJ) mengantar Fauzi Bowo, wakil gubernur DKI Jakarta, ke seberang. Foke, panggilan akrab Fauzi, menyapu bersih partai besar dan kecil yang berdomisili di Ibukota, kecuali PKS (18 kursi), PAN (7 kursi), PKB (4 kursi) dan PBR (1 kursi). Lima besar Parpol DKI—PD (16 kursi), PDIP (11 kursi), PPP (7 kursi), Golkar (7 kursi) dan PDS (4 kursi)—berkoalisi menghadang Cagub PKS, Adang Daradjatun, pensiunan Komisararis Besar Polisi, mantan Wakil Kepala Polri.

Foke seolah terbang di atas awan, memandang ke bawah dengan dada membusung. Sebab dukungan luar biasa tersebut mengantar dirinya hanya setapak lagi menuju kursi gubernur yang diincarnya sejak munculnya paradigma “putera daerah (Betawi)” untuk memimpin Jakarta. Cucu pahlawan Betawi, Muhammad Husni Thamrin, ini tak pelak lagi tinggal menghitung hari.

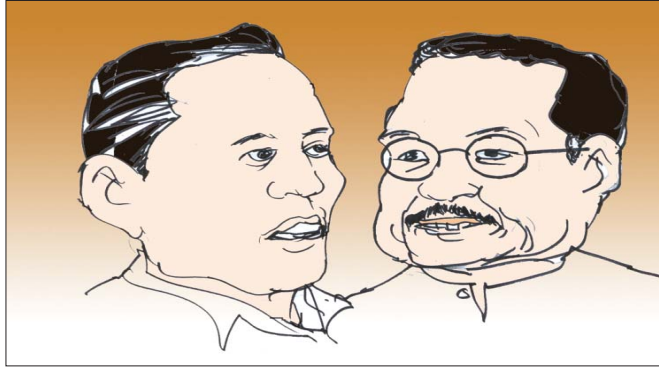
Dukungan tumpah ruah ke Foke, kata sebuah sumber, lantaran Pilkada kabupaten Bekasi dimenangkan oleh pasangan Cabup dan Cawabub yang diusung PKS. Sedangkan Kota Depok sudah lebih awal dipimpin oleh walikota PKS. Inilah yang membuat PDIP dan Partai Demokrat secara mendadak mengubah haluan yang tadinya bertolak belakang—merapat sama-sama mendukung Foke. Sedangkan Golkar, PPP dan PDS sudah lebih awal membidik Foke.

Andaikan semua pendukung 15 Parpol itu memilih Foke, maka dia tinggal melenggang saja ke kursi gubernur. Tetapi ini *kan* politik, “siapa menyangka bola itu lonjong.” Jadwal Pilkada DKI Jakarta: pendaftaran calon, Mei, kampanye Juli, pencoblosan 8 Agustus, pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Oktober.

Seorang pemuka masyarakat Betawi yang tak mau disebut namanya, mengatakan bahwa pada masyarakat Betawi, Foke tidak berakar. Tokoh Betawi yang sudah teruji, katanya, hanyalah Dr. Bem Benyamin, putera mendiang artis serba bisa, Benyamin Suaeb,

Foke Melenggang Adang Dikeroyok

Sudah hampir bisa dipastikan, Pilkada Jakarta akan berlangsung sengit, karena hanya dua Cagub bertarung untuk memperebutkan kursi Gubernur DKI. Kemungkinan munculnya Cagub alternatif dari koalisi PAN, PKB dan PBR, menipis.



dari isteri pertama. Bem memenangkan perebutan kursi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk daerah pemilihan DKI Jakarta. Dia bahkan mengisyaratkan situasi kacau (*chaos*) bisa meledak bilamana aspirasi masyarakat Betawi—memasang Bem sebagai Cawagub—diabaikan oleh Cagub yang ada. Masyarakat Betawi diperkirakan mewakili 30% warga Jakarta yang berasal dari berbagai suku dan ras.

Sedangkan Adang yang didukung PKS juga punya keunggulan tersendiri. Pensiunan perwira tinggi Polri ini, didukung oleh partai yang sekitar 2,8 juta anggotanya sangat patuh pada perintah yang datang dari atas. Untuk menggelar “kampanye dari pintu ke pintu” PKS sudah mendidik dan menyiapkan 20.000 kader yang sangat patuh pada perintah partai.

Boleh juga Adang mengharapkan dukungan dari keluarga besar dan pensiunan Polri. Adang adalah pria Sunda kelahiran Bogor, 13 Mei 1949. Dia diboyong ke Jakarta oleh ayahnya yang berprofesi jaksa, ketika berusia 6 bulan. Bagi warga Sunda dan keluarga besar Polri di Jakarta, mendudukan Adang di kursi gu-

bernur merupakan sebuah kebanggaan.

Juga, Adang dan PKS bisa saja menerima bola muntah dari PAN, PKB dan PBR bila mana mereka ini gagal mengusung Agung Gumelar atau Sarwono Kusumaatmadja yang terjungkal dari Cagub PD dan PDIP. Pemuka Betawi itu mengatakan Adang bisa memetik buah kemenangan bilamana menggandang Bem.

Faisal Basri yang terpentol dari pencalonan gubernur, mengatakan posisi Adang dan PKS yang dikeroyok, justru berpotensi mengundang simpati warga. Itu jika melihat sejarah Megawati dan Presiden Susilo. “Saya melihat posisi Adang di sini teraniaya,” kata Faisal seperti dikutip harian *Indo Pos*. Prediksi ini sudah disampaikan Faisal kepada Megawati sehari sebelum PDIP mengumumkan dukungannya kepada Foke.

Kubu Adang terus menggelar berbagai usaha untuk memenangkan hati warga ibukota. Sebagai Ketua Perhimpunan Donor Darah Indonesia (PDDI), dia menggelar donor darah sukarela di PT Krakatau Steel. PDDI punya target 4 juta pendonor dan sekarang baru mengumpulkan 1,2 juta pen-

donor.

Pansus DPR berjanji, RUU DKI Jakarta dianggap jadi acuan penting dalam penyelenggaraan Pilkada DKI, diundangkan sebelum Pilkada, 8 Agustus. Ketua Pansus RUU DKI Effendy Simbolon mengatakan pelaksanaan Pilkada DKI harus menunggu selesainya RUU tersebut. Pasal penting berkaitan dengan Pilkada: Cagub-Cawagub terpilih harus memperoleh suara minimum 50% plus satu agar menjadi Gubernur-Wakil Gubernur DKI.

Ade Supriyatna, Ketua Golkar wilayah DKI mengatakan tidak ada larangan bagi PAN untuk menarik dukungan. Sebagai penggagas, Golkar menyadari rontoknya koalisi tersebut. Sekarang pun keempat partai besar pendukung Foke berebut untuk mengajukan Cawagub pilihan mereka. Golkar mengajukan nama Mayjen TNI (Pur) Djasri Marin sebagai Cawagub. Djasri belum tentu diterima oleh PPP, PD dan PDIP. PD sudah menjaring para Cawagub; Prabowo Soemirman, Biem Benyamin, Rano Karno, Djasri Marin dan Ferrial Sofyan. Sedangkan PDIP cenderung mengajukan Puan Maharani, puteri pasangan Megawati-Taufik Kiemas. Sedangkan PPP menunggu hasil Musyawarah Kerja Wilayah.

Kalangan akademisi menilai dukungan KJ yang mengarus ke Foke sebagai langkah mundur di dalam berdemokrasi. Parpol lebih mengutamakan tujuan jangka pendek dengan menetapkan strategi “sewa perahu.” Namun Foke boleh saja bermimpi bahwa dengan dukungan lima partai besar—PD, PDIP, PPP, Golkar dan PDS—dia bisa meraih lebih dari 60% suara warga DKI. Tetapi dengan catatan: kelima Parpol tersebut mampu mendikte para pendukung mereka untuk memilih Foke.

Namun Direktur Pilkada FISIP Universitas Indonesia, Lili Romli meragukan kemampuan Foke untuk meraih kepercayaan warga Jakarta. Soalnya, KJ dianggapnya hanya strategi sewa menyewa “perahu” untuk menyebrang ke arena Pilkada. ■ SH

Reformasi Birokrasi

Sebutan birokrasi berakar dari kata *bureau* (kantor), memiliki turunan kata *bureaucrat* and *beaucratic* alias birokrat dan birokratis. Belakangan ini “kata birokrasi” sangat melekat dengan konotasi buruk—tindak korupsi. Karenanya, muncul pemikiran untuk melakukan reformasi birokrasi pada perangkat organisasi dan birokratnya serta jaringan birokratis.

Birokrasi yang berkaitan dengan pengelolaan negara, mencakup lembaga pemerintah dan non-pemerintah, legislatif dan yudikatif. Lembaga pemerintah terbagi lagi dalam dua bagian besar—departemen dan non-departemen, seperti Badan Pusat Statistik, Badan Ketahanan Pangan serta Badan Pengawasan Obat dan Makanan, dan masih banyak badan lainnya. Semua kantor departemen dan non-departemen berada di bawah kekuasaan presiden.

Sedangkan lembaga non-pemerintah mencakup lebih dari 100 komisi, seperti Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Nasional Hak Azasi Manusia dan Komisi Penyerian Indonesia. Komisi-komisi ini sifatnya independen, keanggotaannya dipilih oleh presiden tetapi disahkan oleh DPR.

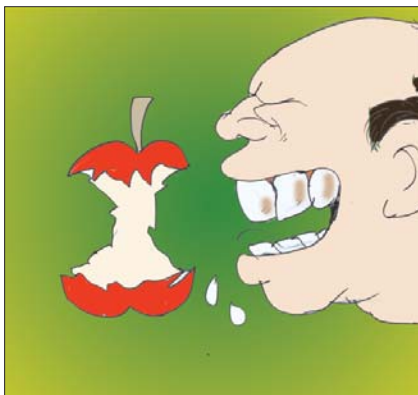
Birokrasi legislatif meliputi MPR, DPR, DPD dan DPRD beserta seluruh perangkat dan anggotanya. Khusus mengenai DPR, berdasarkan UUD 1945 yang diamandemen—selain berfungsi sebagai badan legislatif dan pengawas anggaran negara, juga diberi pembagian kekuasaan dengan pemerintah. Misalnya, dalam hal pengangkatan Panglima TNI dan Kepala Polri serta pelaksanaan anggaran belanja dan pendapatan, presiden harus meminta persetujuan DPR. Di tingkat daerah, gubernur, bupati dan walikota, harus menyampaikan pertanggungjawaban kepada DPRD perihal pelaksanaan APBD dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sedangkan birokrasi hukum mencakup kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Mahkamah Agung. Memang terjadi kerancuan di dalam birokrasi hukum, karena sebelah kaki kepolisian dan kejaksaan berada di pemerintahan. Selain itu, masih ada birokrasi hukum ekstra, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Semua birokrasi tersebut dibiayai oleh negara yang sebagian besar dananya dipungut dari rakyat. Karena itu, birokrasi pemerintahan, bagian dari mata rantai birokrasi negara, memegang peran sentral dalam pelayanan publik, terutama memberi jaminan kesejahteraan lahir-bathin dan mental-spiritual. Tentu secara makro birokrasi-birokrasi tersebut berfungsi menjaga ketertiban, keamanan, ketahanan dan kedaulatan negara.

Semua birokrasi tersebut dikelola oleh personalia atau sumber daya manusia (SDM) yang dalam praktiknya berbeda-beda kemampuan, motivasi dan tujuannya. Misalnya, birokrasi pemerintahan, dikelola oleh tenaga-tenaga sipil, militer dan polisi (PNS sipil dan non-sipil) yang diperkirakan berjumlah sekitar 4 juta orang. Birokrasi pemerintah, secara garis besar terdiri dari dua organisasi—sipil dan militer/polisi—yang berbeda pola organisasi dan karakternya.

Tiga jenis birokrasi yang belakangan ini sangat melekat



dengan konotasi tindak korupsi, yaitu birokrasi pemerintah, hukum dan legislatif. Bekas menteri yang sangat sengit melawan korupsi, Kwik Kian Gie, menilai sejak 62 tahun merdeka, birokrasi di negeri ini tak pernah mengalami audit, baik dari struktur organisasi, jumlah personil, garis komunikasi, rentang kendali, maupun sistem dan prosedur pengambilan kebijakan.

Tentu audit tersebut dimaksudkan untuk membangun birokrasi yang efektif, disiplin dan profesional secara konseptual, terencana dan terarah. Sebab, sejak berdirinya republik ini, birokrasi lebih banyak dibiarkan mengalir seperti air. Kalaupun

ada langkah pembinaan, itu tak pernah lepas dari motivasi terciptanya proyek-proyek non-fisik yang dari sisi pembuatan korupsi sangat sulit diukur dan diawasi. Sebab, semakin canggih tindak korupsi, para pelakunya semakin terpuaskan.

Setelah jatuhnya pemerintahan yang selama 32 tahun didominasi oleh paradigma kekuasaan Orde Baru—merambahnya tangan-tangan militer di dalam birokrasi—memang sektor birokrasi luput dari reformasi. Pemerintahan dan presiden silih berganti, tetapi birokrasinya itu-itu saja. Aparat birokrat naik dan turun, syukur-syukur merujuk pada jenjang karir dan prestasi, tetapi di dalam praktik lebih ditentukan oleh sistem nepotisme (pertemanan) untuk memudahkan kolusi yang mengarah ke tindak korupsi berjamaah.

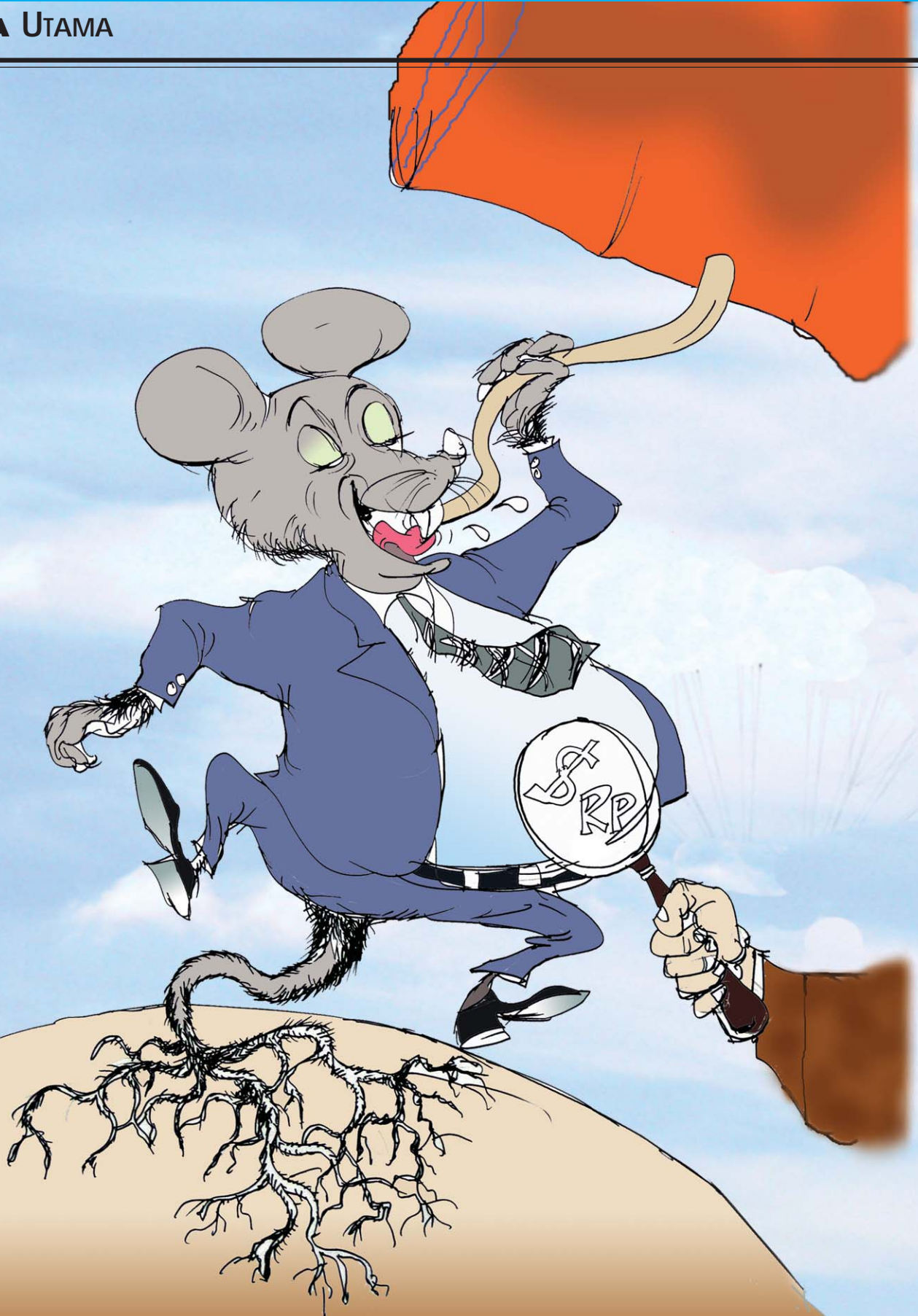
Korupsi kolektif sangat sulit diungkap secara materiil oleh aparat hukum dan pengawas, baik internal maupun eksternal, lantaran diselimiti oleh kolusi. Ujung-ujungnya banyak aparat hukum dan pengawas, tergiur oleh uang suap untuk ikut berkolusi—kerja sama dalam konotasi negatif. Tak salah jika Kwik menggambarkan korupsi di Indonesia sudah sangat dalam, luas dan mencakup banyak orang.

Para pegawai negeri sipil (PNS) yang cerdas dan idealis sekali pun, akhirnya terjerat fenomena *moral hazard* (gangguan moral). Tak sedikit dari mereka yang lulusan perguruan tinggi terkemuka. Masalahnya, impian mereka semasa kuliah untuk memperoleh kehidupan enak setelah meraih sarjana, terbentur oleh kenyataan kecilnya gaji PNS. Tetapi untuk meraih impian tersebut, mereka mengejar posisi dan jabatan “basah” dengan segala cara, termasuk berdukun.

Kondisi inilah yang dicemaskan oleh Kwik yang pernah memimpin birokrasi di kementerian ekonomi dan Bappenas. Bahwa virus ganas korupsi telah dan sedang menggegeroti tubuh birokrasi pemerintahan, hukum dan legislatif. Hampir tidak ada aparat birokrat yang tidak tertular virus ganas tersebut. Tak berlebihan jika mengibaratkan aksi korupsi dewasa ini dengan peribahasa: *Gugur satu tumbuh seribu*.

Jadi bagaimanakah reformasi dilakukan di lingkungan birokrasi dimaksud? Harus ada sebuah konsep yang berkali-kali lulus dari uji coba, sehingga nantinya dijadikan sistem untuk membangun birokrasi yang dikelola oleh para personil—paling tidak mulai dari eselon satu sampai empat—yang punya dedikasi dan idealisme. Konsep tersebut mesti dibahas, dikaji dan dirumuskan oleh pihak-pihak yang kompeten, bukan hasil pemikiran satu golongan kepentingan atau seseorang yang sedang berkuasa.

Langkah pencegahan lebih baik dari pada penindakan, sehingga KPK tidak terjebak pada stigma tebang pilih. ■



Birokrasi Negara Tak Pernah Diaudit

Di semua negara terdapat korupsi. Tetapi di Indonesia korupsi berkembang dan berakar sangat dalam, sehingga membudaya. Korupsi dilakukan secara besar-besaran, bersama-sama oleh banyak orang sekaligus, tanpa rasa risih dan malu. Korupsi sangat berkaitan dengan tidak efektif dan efisiennya birokrasi pemerintah.

Laptop alias komputer jinjing jadi buah bibir bukan lantaran pembawa program “Empat Mata” Trans-7, Tukul Arwana, menggunakan kata pamungkas untuk mengaso dari lawakannya: “kembali ke laptop,” atau dengan bahasa Inggris asbun: “back to laptop.” Laptop dimaksud adalah proyek multi-miliar rupiah di Badan Urusan Rumah Tangga DPR. Fantastis, angkanya mencapai Rp 12,1 miliar, yaitu jumlah dari 550 anggota DPR x @ Rp 21 juta.

Apakah proyek yang terbuka lebar bagi KKN ini sungguh-sungguh untuk menaikkan profesionalitas (ataukah gengsi?) dari 550 anggota DPR? Setiap anggota Dewan yang sudah mengantongi berbagai tunjangan operasional, akan diberi masing-masing satu unit komputer jinjing, senilai Rp 21 juta. Sekjen DPR Faisal Djamil mengatakan pengadaan laptop diputuskan lewat Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) pertengahan 2006. “Pengadaan laptop dinilai merupakan persoalan penting untuk meningkatkan kinerja DPR,” kata Faisal. Harga riilnya, kata Faisal, akan ditekan lewat tender, paling mahal Rp 17 juta per unit laptop.

Itu kisah mutakhir tentang penghamburan uang negara di DPR. Kisah ini muncul sebelum redanya amarah rakyat akibat peraturan pemerintah untuk “menghibur” para anggota DPRD dengan pembayaran tunjangan komunikasi intensif yang berlaku mundur per 1 Januari 2006. Sudah banyak pemerintah daerah dan kota yang membayar uang rapel tersebut. Tetapi belakangan ketentuan itu dicabut, dan para anggota DPRD yang terlanjur terima harus membayarnya kembali dengan cara menyicil. PP Nomor 37/2006 ini memang aneh bin ajaib, sudah ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tetapi dibekukakan, dan beberapa ayatnya dicabut.

Namun ada juga kisah, bukan penghamburan tetapi penyembunyian uang negara dalam bentuk rekening giro dan deposito atas nama pejabat tinggi dan departemen serta lembaga pemerintah. Jumlahnya mencapai Rp 8,54 triliun, yaitu dana dari 1.303 rekening milik jajaran departemen dan lembaga yang diungkap Ketua KNPI, Hasanuddin Yusuf.

Rekening gelap itu disimpan atas nama petinggi yang belum disebut namanya di 14 departemen dan lembaga pemerintah.

Data ini sesuai dengan temuan BPK yang diungkap lewat

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Rekening gelap itu meliputi 680 rekening giro, senilai Rp 7,22 triliun dan 623 rekening deposito, senilai Rp 1,32 triliun. Rekening itu jadi misterius karena tidak dilaporkan dalam LKPP oleh 14 departemen dan lembaga yang bersangkutan. Ke 14 departemen dan lembaga tersebut, yakni Dephan 96 rekening; Deplu 23 rekening; Dephut 34 rekening; Deprin 5 rekening; Depkimpraswil (PU) 7 rekening; Deptan 6 rekening; Depkes 49 rekening; Dephum dan HAM 36 rekening; Depnaker 13 rekening; Bappenas 9 rekening; Otoritas Batam 1 rekening; Batan 2 rekening; BPS 2 rekening, dan Kembudpar 3 rekening.

Mantan menteri dan Kepala Bappenas, Kwik Kian Gie melukiskan korupsi menyusup ke mana saja, sehingga KKN merupakan akar penyebab dari hampir semua masalah dihadapi bangsa ini. “KKN bahkan sudah membuat pikiran, mental dan jiwa kita tidak lagi normal,” kata Kwik kepada Samsuri dari *Berita Indonesia*, sehingga semua kebijakan yang tidak jernih lagi, sangat menyengsarakan rakyat banyak serta menciptakan ketidakadilan yang tiada tara.

Karenanya, pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama, karena kalau tidak, apa pun yang dilakukan hasilnya tidak akan optimal. Korupsi akar dari praktik jahat. Awalnya memang mencuri uang rakyat, tetapi lambat laun merasuk ke dalam mental, moral, tata nilai dan cara berpikir. Sejak zaman Yunani kuno sudah dikenal adanya pikiran yang teracuni oleh korupsi. Maka sangat sering ada istilah, “*corrupted mind*” alias pikiran yang korup. Daya rusak korupsi sangat dahsyat, karena menjadikan orang yang melakukannya tidak normal lagi dalam sikap, perilaku dan nalar berpikir.

Menurut Kwik, konsep dasar pemberantasan korupsi sederhana saja, yaitu menerapkan sistem *carrot and stick* (pemikat dan pemukul). Keberhasilannya sudah dibuktikan oleh banyak negara antara lain, Singapura dan RRC. Hidup dengan standar yang sesuai dengan pendidikan, pengetahuan, tanggung jawab, kepemimpinan, pangkat dan martabatnya.

“Kalau perlu, pendapatan ini dibuat demikian tingginya. Sehingga tidak saja cukup untuk hidup layak, tetapi cukup untuk hidup dengan gaya yang gagah,” kata Kwik. Tidak berlebihan, tetapi sektor pemerintah tidak kalah dibandingkan dengan

tingkat pendapatan orang yang sama dengan kualifikasi pendidikan dan kemampuan serta kepemimpinan yang sama di sektor swasta.

Carrot (wortel) atau pemikat, yaitu penghasilan, dan *stick* (tongkat) pemukul atau hukuman bilamana melakukan tindak korupsi. Artinya, “semuanya sudah dipenuhi tetapi dikenakan hukuman kalau masih berani melakukan korupsi.” Kata Kwik, karena tingkat atau *magnitude* korupsi sudah sedemikian dalam dan luas, hukumannya tidak boleh tanggung-tanggung, harus seberat-beratnya.

Pemegang wewenang tergelincir tindak korupsi, kebanyakan terpicu oleh dorongan dan rayuan para anggota keluarga terdekat atau sanak saudara. Kata Kwik, itu sebabnya korupsi disebut secara lengkap dengan istilah KKN—Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Menurut Kwik korupsi berakibat sangat besar, bukan saja kerugian material, tetapi juga bangsa kehilangan kemandirian dalam merumuskan kebijakan, karenanya, “kita tidak mandiri lagi dalam menentukan nasib bangsa kita sendiri.”

Kwik menilai, pemberantasan kasus-kasus korupsi yang sekarang gencar dilakukan pemerintah tidak mudah. Banyak kasus korupsi tidak dapat atau sangat sulit dibuktikan, karena perundingan dan kesepakatan melakukan korupsi bersama-sama secara lisan dan lalu lintas uangnya tunai. Dengan demikian barang bukti sulit didapat. Faktor lain, karena korupsi begitu dalam dan luas, pembongkaran satu kasus besar akan menguak begitu banyak orang ternama, dan menyangkut begitu banyak orang.

Reformasi Birokrasi

Sebagai gambaran, jumlah PNS yang demikian besar, tentu tidak terlepas dari kenyataan, bahwa selama republik berdiri sampai sekarang, tidak pernah dilakukan audit terhadap struktur organisasi, jumlah personalia, garis-garis komunikasi, rentang kendali atau *span of control*, sistem dan prosedur pengambilan keputusan dan sebagainya. Kita bayangkan apa jadinya kalau birokrasi kita yang selama 60 tahun tidak pernah diaudit.

Apa hubungan reformasi birokrasi dengan pemberantasan korupsi? Menurut Kwik keduanya berhubungan sangat erat. Dia sangat yakin, kalau birokrasi disusun sesuai dengan kebutuhan, maka pencapaian tujuannya akan bisa optimal. Dampak tidak langsung reformasi birokrasi berkaitan dengan pemberantasan korupsi, yaitu efektivitas dari birokrasi. “Jika birokrasi menciut, kita dapat menempatkan orang-orang yang paling mampu,” kata Kwik.

Mereka pasti mau karena pendapatan bersihnya sangat memadai dan sama jika

mereka bekerja di sektor swasta yang pendapatannya sudah didasarkan atas merit sistem. Tingginya sudah sama dengan yang berlaku di segmen-segmen lain masyarakat dalam segala jenjang. Sistem penggajian PNS dan TNI/Polri sangat semrawut. Karena, kata Kwik, besarnya gaji yang diterima hanya cukup untuk hidup satu sampai dua minggu. Maka dicarikan berbagai macam akal dan rekayasa, seperti tunjangan jabatan dan berbagai tunjangan lainnya, seperti tunjangan *in natura*.

Kata Kwik, setelah keseluruhan struktur pemerintahan dari yang tertinggi sampai yang terendah terbentuk, sistem peng-

tor penting. Alasannya, gaji para pegawai Departemen Keuangan dinaikkan beberapa kali lipat, tetapi tidak menolong dan tidak memperbaiki kinerja mereka. Namun Kwik punya dua argument yang berbeda (*counter argument*). Pertama, walaupun sudah dinaikkan secara drastis, apakah sudah mencukupi untuk hidup secara layak dan terhormat sebagai pelayan publik, sekaligus harus mempunyai wibawa karena memegang kekuasaan. Kedua, seandainya sudah mencukupi, karena masih saja korupsi setelah dicukupi, dia tidak dihukum.

Kwik tidak dapat memahami bagaimana orang bisa bekerja tanpa menjual



Reformasi birokrasi harus diawali dari pusat.

gajianya dibenahi supaya adil berdasarkan merit sistem.

Yang dimaksud dengan penjenjangan tingkat pendapatan neto, yakni harus proporsional dan adil. Pejabat yang tingkat pengetahuan, tanggung jawab dan pekerjaannya lebih berat, harus memperoleh gaji neto yang lebih tinggi. Yang berlaku sekarang, gaji presiden lebih rendah dari gaji Direktur Utama BUMN dan Bank Pemerintah.

Tindakan pertama, menurut Kwik, membenahi keseluruhan pendapatan neto PNS, TNI dan Polri, diselaraskan sampai proporsional dan adil berdasarkan merit sistem. Ada yang berpendapat bahwa rendahnya gaji tidak merupakan fak-

atau mengkomersialkan kekuasaannya kalau tingkat pendapatannya hanya cukup untuk menghidupi keluarganya hanya sekitar dua minggu? Semulia apa pun juga, tidak ada orang yang sanggup untuk mati kelaparan karena tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Seperti halnya di sektor swasta yang sudah dibuat adil oleh mekanisme pasar.

Setelah gaji PNS dinaikkan sampai tingkat yang adil sehingga dapat hidup nyaman dan gagah, tetapi masih berani melakukan korupsi, maka yang bersangkutan harus dihukum dengan sangat berat. Kwik setuju hukuman mati atau seumur hidup bagi koruptor jika dilihat dari skala korupsi di Indonesia saat ini.

Kata Kwik, korupsi sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari kolusi, karena korupsi selalu dilakukan oleh lebih dari satu orang. Nepotisme juga merupakan faktor sangat penting, karena korupsi kebanyakan mendapat dorongan dan dukungan kuat dari anak, istri dan anggota keluarga terdekat.

Pemberantasan korupsi memang membutuhkan dana yang sangat besar jika dikeluarkan sekaligus. Alternatif lain, menurut Kwik, pemberantasan korupsi yang tidak serempak, tetapi setahap demi setahap yang dimulai dari atas. Kalau dengan cara demikian para pejabat tinggi dan PNS yang rawan korupsi, bisa bebas



foto: berindo wilson

korupsi atau korupsi yang berkurang sangat signifikan, penghematannya akan cukup besar. Dana yang dibutuhkan untuk meningkatkan pendapatan bersih mereka akan jauh lebih kecil dibandingkan dengan penghematan yang diperoleh dari hilangnya atau berkurangnya korupsi pada tingkat birokrasi yang paling atas dan paling rawan korupsi.

Gagasan seperti ini pernah dilakukannya semasa kabinet Gus Dur. Tidak sedikit menteri dan anggota DPR yang langsung mengkritiknya dengan tajam. Mereka mengatakan tidak tahu diri, pemerintah menaikkan pendapatan bersih untuk dirinya sendiri sampai pada standar internasional, padahal bagian terbesar

rakyat hidup dalam kemiskinan. Mereka juga mengatakan sudah dicoba di salah satu departemen dengan menaikkan gaji karyawan sepuluh kali lipat, tetapi korupsi masih merajalela. Kritik lain yang diarahkan pada Kwik, naluri manusia untuk mengumpulkan kekayaan tidak ada batasnya.

Jawaban Kwik, karena yang masih berkorupsi tidak diapa-apakan. *Carrot*nya diberikan, tetapi *stick*-nya tidak diterapkan. Di Indonesia, yang sangat dominan para teknokrat bukan teknosof. Itulah sebabnya mereka tidak dapat berpikir secara mendalam dan hakiki, karena membutuhkan pikiran abstrak yang falsafati. Dan karena itu, bersama-sama dengan para pengusaha, para birokrat merasa bahwa menggelapkan uang milik publik tidak apa-apa. Uang ini tidak punya pemilik yang dapat diidentifikasi secara individual. Untuk meyakini bahwa uang ini milik orang banyak dan harus dikelola dengan baik serta dipertanggungjawabkan, membutuhkan daya pikir yang lebih abstrak. Ini belum banyak dimiliki oleh elit bangsa, baik di jajaran pemerintahan maupun di kalangan pengusaha.

Kita lihat bahwa daya rusak korupsi ditinjau dari sudut kebendaan sudah sangat dahsyat, karena pikirannya yang sudah tidak waras. Pikiran yang sudah tidak waras, kecuali dipakai untuk merusak diri sendiri, lama kelamaan manusia itu jadi embisil. Lambat laun akan membuat daya pikir dan cita rasa sangat aneh. Kecerdasan otak, perasaan, cita rasa dan emosi positif yang membedakan manusia dari binatang, lama kelamaan juga pudar. Mereka tetap pandai dan tetap mempunyai emosi, tetapi dipakai untuk hal-hal yang merusak lingkungan dan martabatnya sendiri. Logikanya terbalik-balik, tetapi masih cerdas, tetapi digunakan untuk membenaran pikirannya yang terbalik-balik.

Cemas akan pertumbuhan negatif dari birokrasi pemerintahan, Chairman Jawa Pos Group Dahlan Iskan mewujudkan idenya untuk mendirikan Institut Birokrasi yang dikendalikan oleh lima anggota tim pengarah. Dia menyadari masalah birokrasi di Indonesia tampaknya cukup banyak dan kompleks. Mulai praktik KKN, rendahnya tingkat efisiensi, efektivitas dan produktivitas, hingga buruknya pelayanan publik. Harapan yang ditumpukan kepada birokrasi pemerintah yang diawaki 4 juta PNS, di pusat dan daerah, begitu besar. Standar yang juga melekat padanya cukup tinggi.

Mereka adalah para tokoh, ahli, sangat berpengalaman dan kompeten di bidangnya. Artinya, mereka pernah jadi birokrat, punya ide-ide besar reformasi birokrasi, tetapi tak berdaya ketika hendak menjalankannya. Tentu salah satunya ahli,

tetapi tak pernah terlibat di dalamnya. Mereka adalah Dr Ir Siti Nurbaya Bakar MSc (Sekjen DPD-RI), Hardijanto (dosen STIA-LAN), Sondi Amar (Tenaga Ahli Menteri Bidang Otda Bappenas), Dr Ir Mohammad Jafar Hafsa (Komisaris Utama PT Perkebunan Nusantara VI), Jambi dan Sumatera Barat. Prof Dr Eko Prasjo (pakar administrasi negara UI).

Siti Nurbaya berharap bahwa lewat institut tersebut segala pelayanan publik murah dan mudah. Siapa yang mengerjakan apa, itu harus jelas. Sedangkan rekannya Hardijanto ingin, lewat IRB, mendorong pemerintah untuk mewujudkan birokrasi yang didambakan. Caranya, dengan membaca keluhan masyarakat, mendengar keluhan mereka sehingga bisa memberi solusi dan membuat kerangka. Sedangkan untuk membangun sistem butuh waktu panjang.

Prof. Eko Prasjo merincinya dari pelayanan publik di Indonesia yang sedang menghadapi situasi problematik. (1) Terkait struktur, norma, nilai dan regulasi yang ada masih berorientasi pada kepentingan penguasa atau birokrat. (2) Belum terbentuk budaya pelayanan publik. (3) Masih tingginya ketidakpastian di dalam pelayanan publik. (4) Budaya *patron-client* dan *moral hazard* serta rendahnya kompetensi para birokrat.

Namun menurut Sondi Amar, reformasi birokrasi harus diawali dari pusat. Karenanya, perlu *assessment audit* (audit penilaian). "Kita perlu *assessment* organisasi di pusat, biar tidak terlalu gemuk," kata Sondi. Lantas perlu reorganisasi, strukturnya harus dikurangi. Kata Sondi, banyak departemen yang seharusnya tidak perlu. Sedangkan M. Jafar melihat dari sisi pembentukan pemerintahan yang baik, karenanya dibutuhkan aparat yang cerdas, berkepribadian dan berkarakter.

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Didi Widayadi melihat bahwa dari tahun ke tahun APBN dan APBD semakin besar. Distribusi dana semakin besar, tetapi tidak diimbangi distribusi mutu SDM yang memadai. "Tidak berubah dari tahun ke tahun, terutama dalam masalah sikap," katanya. Kata Didi, penyimpangan bisa terjadi karena ketidakmampuan pengelolaan, sehingga terjadi kebocoran keuangan negara, selain karena sengaja dikorupsi.

BPKP berusaha meredam korupsi lewat pencegahan, yaitu memberi kesadaran melalui pendidikan tentang bahaya laten korupsi. PNS harus menyadari bahayanya korupsi. Mereka dididik agar jangan sampai melakukan moral hazard. "Kita sekarang sedang sakit. Tetapi kita tidak boleh kehilangan orientasi di dalam membangun bangsa ke depan," kata Didi. ■ RI, SH

Korupsi Selesai Cukup

Sulit untuk membedakan langkah pemberantasan korupsi saat ini sungguhan atau dagelan.

Seorang pejabat daerah bertangan dingin yang memiliki kehendak kuat untuk memecahkan persoalan kemacetan transportasi di Ibu kota Jakarta, Rustam Effendi, karena kebutuhan mendesak harus melakukan penunjukan langsung pengadaan bus TransJakarta, dan tak sedikitpun terbukti ada unsur memperkaya diri sendiri, akhirnya harus divonis bersalah.

Tetapi dua petinggi negara yang ingin berlomba untuk saling membuka kedok lawan seteruannya, karena masing-masing sudah saling menyudutkan, yakni Yusril dan Ruki, akhirnya bisa berakhir mulus sebab ada yang bisa menyelesaikannya secara adat.

Fakta Yusril-Ruki bertolak belakang dengan peristiwa yang terjadi antara Suwarna AF-Syaukani HR, yang juga sama-sama berlomba mencari selamat dengan membuka aib lawan. Kedua petinggi daerah dari Kalimantan Timur ini malah semakin terbenam di balik jeruji besi, mengalami nasib yang tak senikmat Yusril-Ruki.

Tindakan korupsi bisa berlangsung di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Mulai dari pegawai rendahan hingga tertinggi di instansi pemerintahan, dari perusaha kantor hingga direksi perseroan terbatas. Di lingkungan rumahtangga sekalipun tindakan korupsi bisa dilakukan oleh anak, ibu, ayah, terlebih oleh pembantu.

Persoalannya kini siapa yang dituduh melakukan korupsi, siapa yang dirugikan dan siapa diuntungkan, seberapa besar untung-ruginya dan sebagainya. Maka itu tatkala antara Mensesneg Yusril Ihza Mahendra dengan Ketua KPK Taufiqurrahman Ruki berseteru, soal bagaimana memaknai Keppres No. 80 tahun 2003 tentang ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah, banyak pihak segera ambil posisi.

Sejumlah anggota Komisi III DPR seperti Benny K Harman, Panda Nababan, Patrialis Akbar, atau Yasonna H Laoly secara "normatif" meminta agar KPK tetap bersikap independen dalam langkahnya. Terutama dalam menyidik kasus dugaan korupsi pengadaan sistem pemindai sidik jari otomatis di Departemen Hukum dan HAM.

Tumpak Hatorangan Panggabean, Wakil Ketua KPK menyanggupi. Ia yang hadir memenuhi undangan rapat kerja Komisi III DPR, Senin (26/2) itu menjamin, hal-

hal yang berkaitan dengan politik dan nonyuridis tidak akan memengaruhi kinerja KPK.

Jaminan Panggabean ditimpali Taufiqurrahman Ruki, Ketua KPK, dengan menyebut lembaganya tak mau dan tak bisa diatur-atur.

Tetapi jaminan dan pernyataan kedua "pendekar" pemberantasan korupsi itu sesungguhnya sangat bertolak belakang dengan apa yang terjadi sebelumnya. Siapa nyana kalau perseteruan Yusril-Ruki sebelumnya sudah dengan mudah diselesaikan "secara adat".

Yang "menyelesaikan" pun tak tanggung-tanggung, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono usai berlangsung rapat koordinasi terbatas tentang langkah pemberantasan korupsi, di Kantor Presiden, Jumat (23/2).

Padahal, dalam UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi disebutkan, KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. Sampai-sampai kelima pimpinan KPK harus disebut secara eksplisit sebagai pejabat negara.

"Yang dimaksud dengan kekuasaan manapun adalah, kekuatan yang dapat memengaruhi tugas dan wewenang KPK, atau anggota Komisi secara individual, dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif maupun pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi dengan alasan apapun," tulis Taufiqurrahman Ruki, menjawab pertanyaan tertulis *Berita Indonesia* menjelang ulangtahun ketiga KPK Desember 2005.

Tetapi ironis sekali, saat mengumumkan perseteruan Yusril-Ruki "telah diselesaikan secara adat", Presiden mengatakan pemberantasan korupsi tetap akan dijalankan sungguh-sungguh dan efektif karena korupsi merusak moral, sosial, dan ekonomi.

"Ini tekad, agenda, dan prioritas kita," ujar Presiden, yang sejak terpilih berjanji kepada rakyat akan memimpin langsung upaya pemberantasan korupsi. Sebelum terpilih pun, Susilo gencar mengampanyekan uang negara satu rupiah pun harus dapat dipertanggungjawabkan.

Sulit Diberantas

Peribahasa sebagai kearifan lama me-



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

ngatakan, "Guru kencing berdiri murid kencing berlari". Tindakan korupsi yang berlangsung kapan saja, dimana saja, dan oleh siapa saja pastilah berpatron ke atas.

Tidaklah mengherankan apabila lembaga Konsultan Risiko Politik dan Ekonomi (PERC) menempatkan Indonesia sebagai negara paling korup di Asia diantara 13 negara yang disurvei, pada tahun 2006 lalu.

Ketika posisi membaik satu nomor saja, di tahun 2007 Indonesia dipersepsikan sebagai negara terkorpor kedua Asia setelah Filipina, KPK langsung angkat bicara. Johan Budi SP, Juru Bicara KPK, menyatakan survey itu "menunjukkan keseriusan pemerintah untuk memperbaiki citra dan menumpas korupsi".

Padahal seorang anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Baharuddin Arintonang menilai, pemberantasan korupsi selama 2,5 tahun terakhir berjalan lambat dan hasilnya kurang signifikan. Bahkan ia pesimistis pemberantasan korupsi yang dijalankan pemerintah berhasil, apabila pemberantasan tak diikuti dengan penataan sistem dan penempatan sumberdaya manusia yang baik dalam pengelolaan serta pengawasan keuangan negara.

Kata Baharuddin, banyak tenaga akuntan yang justru setelah lulus langsung menjadi tenaga pemeriksa keuangan. Atau, justru berperan setelah ada penyimpangan dan penyelewengan keuangan. Ibarat pemadam kebakaran, ucapny, para akuntan justru bekerja setelah terjadinya "kebakaran", bukannya mencegah terjadinya "kebakaran" laporan keuangan.

Secara Adat



Taufiqurrahman Ruki

Sistem pengelolaan keuangan negara pun disebutnya amburadul. Apabila fungsi dan peran BPK diatur jelas dalam UUD 1945, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menurut Baharuddin harusnya ditempatkan di setiap departemen dan LPND agar bisa ikut mencegah terjadinya penyimpangan, serta menata sistem pengelolaan dan akuntansi yang baik. Bukannya ikut jadi pemeriksa.

Baharuddin juga menyebut keberadaan berbagai fungsi pengawasan lain, seperti inspektorat jenderal (Itjen), badan pengawas daerah (Bawasda), hingga satuan pengawasan internal (SPI) di setiap BUMN. "Semuanya tumpang tindih melakukan pemeriksaan. Akan tetapi, penyimpangan terus saja terjadi," urainya.

Negeri Sarat Bandit Koruptor

Kehadiran KPK per 29 Desember 2002 sempat memunculkan secercah harapan negeri ini bersih dari kejahatan kriminal kerah putih para pejabat negara, yang sudah tergolong sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), atau sekelas dengan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan para teroris.

Seluruh mata awalnya sudah mulai berpaling dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung lalu menuju ke KPK.

Tetapi melihat fenomena Yusril-Ruki yang dengan mudah bisa "diselesaikan secara adat", dan kini muncul lagi fenomena yang lebih spektakuler antara Yusril-Hamid Awaluddin, terkait empat surat sakti yang pernah keduanya layangkan untuk memuluskan pencairan uang



Yusril Ihza Mahendra

Tommy Soeharto dari bank BNP Paribas, besar kemungkinan kasus ini juga akan "diselesaikan secara adat". Maka rasa pesimistisnya Baharuddin Aritonang beralasan jadinya.

Dua politisi terkemuka berasal dari dua partai politik terbesar di tanah air, Andi Matialatta Ketua DPP Partai Golkar dan Pramono Anung Sekjen DPP PDI Perjuangan, sama-sama senada menilai pimpinan KPK.

Keduanya menilai pimpinan KPK saat ini lemah dalam menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang dilaporkan masyarakat. Mereka dinilai tidak pantas menjadi pimpinan KPK selanjutnya karena mengutamakan hubungan kemanusiaan daripada penegakan hukum.

Kata Andi, pimpinan KPK banyak menimbulkan ketidakpuasan. Padahal KPK dibentuk ketika Kepolisian dan Kejaksaan terbukti tidak bisa melakukan pemberantasan korupsi.

"Bandingkan saja biaya yang dipakai KPK dengan uang negara yang berhasil diselamatkan. Itu karena isinya adalah orang-orang lama, sehingga mereka lemah karena tersandera hubungan kemanusiaan yang pernah terjalin sebelumnya," papar Andi.

Pramono melihat KPK berhasil hanya dalam membangun citra sebagai penegak hukum yang bergigi. "Sebagai lembaga penegak hukum yang bersifat *ad hoc*, KPK sudah cukup bergigi untuk membangun *image*," ujar Pramono, menyentil KPK tidak berani terhadap elit-elit politik nasional yang diduga korupsi. "Bahkan KPK yang dibentuk untuk membendung *white collar crime* tidak berani bertindak



Hamid Awaluddin

ke arah itu. Para pelaku *white collar* tidak tersentuh."

Keberanian Kejaksaan Agung menjeblaskan Widjanarko Puspoyo, (mantan) Dirut Perum Bulog ke Lapas Cipinang menimbulkan lagi harapan baru yang lain. Penguasa "Gedung Bundar" rupanya masih punya gigi menegakkan supremasi hukum.

Kini arus dukungan mulai berbalik arah untuk bergerak ke Jalan Sultan Hasanuddin. Tak kurang seorang Ahmad Syafii Maarif, mantan Ketua PP Muhammadiyah menyempatkan diri mendatangi ruang kerja Hendarman Supandji, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jam-Pidsus) untuk memberikan dukungan.

"Kita memberikan dukungan moral kepada Pak Hendarman sebagai *senior citizen*, sebagai orangtua, warga sepuh yang tidak punya kepentingan apa-apa. Kita memberi dukungan untuk melawan banditisme di Indonesia," kata Maarif.

Dukungan diberikan Maarif agar Hendarman terus memberantas dan melawan banditisme korupsi di Indonesia. Sebab, menurutnya, Indonesia sudah menjadi rimba belantara yang berisi bandit-bandit koruptor yang merusak bangsa.

Guru Besar UGM Yogyakarta itu merasa harus memberikan langsung dukungannya kepada Hendarman, yang mantan Kepala Jaksa Tinggi Yogyakarta. Karena, sebagai salah seorang pemberantas korupsi yang sering mendapat tekanan, Hendarman yang sejak pertama kali dikenal Maarif sebagai pribadi yang lurus, itu sangat perlu mendapatkan dukungan luas dari seluruh masyarakat. ■ HT

Birokrasi Masih Ken Aroma Korupsi

Tingkat pendapatan dan kesejahteraan PNS belum manusiawi. Korupsi di birokrasi pemerintahan hampir mustahil bisa diberantas.

Gambaran pendapatan resmi pegawai negeri di Indonesia (PNS) memang masih minim. Seorang PNS berkualifikasi sarjana (S-1), Golongan III/a dan telah melewati masa percobaan, biasanya setahun, akan menerima gaji sekitar Rp 1,2 juta per bulan. Sedangkan pegawai lulusan SMTA, Golongan II/a mendapat gaji sekitar Rp 900.000 sebulan. Ini untuk PNS yang bertatus bujangan.

Seorang PNS yang sudah menikah memperoleh tunjangan isteri sebesar 10 persen dari gaji pokok. Besarnya sekitar Rp 80 ribu untuk pegawai golongan II/a, dan sekitar Rp 105.000 untuk pegawai golongan III/a. Sedangkan keluarga dengan anak satu mendapat tunjangan anak sebesar 5 persen, juga dihitung dari gaji pokoknya. Jumlah anak yang masuk ke daftar gaji pun sudah dibatasi, maksimal dua anak. Ketentuan ini juga berlaku dalam program Askes PNS.

Karena itu, jangan bandingkan penghasilan pegawai negeri biasa dengan karyawan BUMN atau swasta. Di kalangan perusahaan swasta, terlebih perusahaan multinasional, standar gaji benar-benar manusiawi. Dan konsepnya memang mengacu ke pola penggajian di negara asal perusahaan tersebut. Prinsipnya: "Urusan dapur serahkan pada kami, urusan perusahaan kami serahkan pada Anda." Karena itu, gaji seorang karyawan swasta bisa mencapai tiga kali lipat gaji PNS dengan tingkat pendidikan sama.

Di BUMN, selain standar gaji sudah lebih tinggi dari PNS, mereka masih menerima tiantem dan bonus. Dan jumlahnya bisa sekian kali gaji bulanan. Tergantung kinerja perusahaan, keuntungan bersih yang diraih dalam satu tahun buku.

Harus pula dicatat bahwa Departemen Keuangan memiliki keistimewaan. Selain gaji yang standarnya sama dengan PNS lainnya, mereka juga mendapatkan tunjangan khusus yang besarnya melebihi gaji resminya. Pertimbangannya, selain jam kerja yang lebih lama, mereka dikategorikan sebagai akuntan pemerintah dan masih tenaga langka.

Namun setinggi apa pun pangkat seseorang, IV/e misalnya, gaji resminya hanya sekitar Rp 3,6 juta sebulan. Ibarat di kemiliteran, pegawai negeri golongan IV/e identik dengan jenderal berbintang empat.

Selain kepangkatan/golongan gaji, pendapatan PNS juga ditentukan apakah dia pejabat struktural, tenaga fungsional atau hanya staf biasa. Pejabat setingkat eselon I—Sekjen, Dirjen, Kepala Badan dan staf ahli menteri—mendapat tunjangan jabatan Rp 4,5 juta sebulan. Pejabat eselon II—Sekretaris Direktorat, Direktur dan Kepala Pusat—mendapat tunjangan jabatan Rp 2 juta sebulan. Pejabat eselon III—Kepala Bagian, Kepala Sub-direktorat dan Kepala Bidang—menerima tunjangan jabatan Rp 650 ribu sebulan. Sedangkan pejabat eselon IV—Kepala Seksi dan Kepala Sub-bagian—menerima tunjangan jabatan Rp 260 ribu sebulan. Sementara itu, tenaga fungsional, tunjangannya telah diatur sedemikian rupa, namun jumlahnya lebih kecil dibanding tunjangan jabatan.

Dengan demikian, seorang pejabat tinggi, misalnya Sekjen, penghasilan resminya bersumber dari dua pos: gaji dan tunjangan jabatan. Total sekitar Rp 7,5 juta hingga Rp 8 juta sebulan, tergantung masa kerja dan golongan kepangkatannya.

Tapi masih ada sumber pendapatan yang menggelontor ke pundi-pundinya. Semakin tinggi jabatan, akan semakin besar "sawerannya." Apakah berupa hasil perjalanan dinas (SPPD), gaji sebagai komisaris di BUMN, honor sebagai pembicara di seminar, meskipun umumnya makalah disusun oleh anak buahnya. Patut pula dimaklumi bahwa semakin tinggi jabatan, frekuensi perjalanan dinasnya pun akan semakin padat, itu berarti tambahan pendapatan. Karena itu, di kalangan birokrasi ada guyonan: "Pejabat Anu, SPPD-nya bisa 40 hari dalam sebulan."

Namun sejujurnya, kalau hanya mengandalkan pendapatan resmi, pejabat tinggi sekalipun tidak mungkin menjadi



Tingkat pendapatan dan kesejahteraan PNS belum ma

kaya raya. Misalnya, memiliki rumah senilai Rp 1 miliar lebih, mobil mewah seharga Rp 800 juta, atau menyekolahkan anak di luar negeri. Itu mustahil bagi pegawai negeri. Kalau dia mampu "melakoni" gaya hidup mewah seperti itu, modulusnya hanya dengan dua cara. Pertama, yang bersangkutan merangkap pengusaha seperti yang lagi *ngetrend* di jajaran kabinet sekarang. Kedua, tak pelak lagi, semata-mata berkat hasil korupsi.

Peluang korupsi, khususnya kategori "kakap", memang hanya terbuka untuk kalangan pejabat tinggi. Wajar saja jika kondisi ekonomis para pejabat amat menyolok dibanding sebagian besar PNS. Pegawai rendah umumnya sangat menyedihkan. Apalagi sekarang ini harga berbagai kebutuhan terus menggila dan menghimpit.

Seorang sobat karib, PNS yang berkantor di bilangan Pasar Minggu, baru-baru ini mengeluh betapa gajinya sudah

tal



anusiawi.

foto: berindo wilson

kering sebelum pertengahan bulan. Agar dapur terus mengepul dan anak-anak terus bisa sekolah, dia mengaku terpaksa berutang sana-sini. "Gali lobang, tutup lobang," ujarnya memelas.

Buat pegawai rendah, peluang memperoleh tambahan memang ada. Pendapatan yang masih dalam kualifikasi resmi alias halal, antara lain tunjangan pelaksanaan proyek (TPP) atau melakukan tugas ke luar kota. Tapi tidak banyak staf rendah yang mendapat kesempatan. Sudah menjadi peraturan tak tertulis bahwa yang pantas melakukan perjalanan dinas hanyalah unsur pimpinan. Di situlah enaknya jadi pejabat di republik ini.

Tapi jujur saja, bukan hanya kalangan pejabat yang berpotensi melakukan korupsi. Mulai dari pramutus (pembantu), satpam, staf biasa juga melakukannya. Dalam berbagai bentuk dan dalam aneka cara. Mulai dari mengkorup biaya fotokopi hingga "menjual tandatangan" (SPPD

fiktif) untuk mendapatkan 10-15 persen dari nilai SPPD. Itu sudah lumrah di kalangan pegawai kecil. Bahkan bingkisan dari atasan yang diterima para pegawai pada hari-hari tertentu, pada dasarnya adalah "hasil korupsi, korupsi berjamaah" Kenapa? Karena itu tidak tercantum dalam pos pengeluaran/anggaran.

Kwik Kian Gie, yang menjabat Menko Ekonomi di dalam pemerintahan KH Abdurahman Wahid dan Megawati, tahun 1980-an pernah membuat geger dengan menuding bahwa sekitar 30 persen dari APBN habis dikorupsi. Sebelum Kwik, anggota DPR, TAM Simatupang, dengan tegas menuding Bappenas sebagai lembaga paling korup di Indonesia. Praktik tak terpuji ini, menurut Simatupang, terjadi saat instansi/departemen mengajukan anggaran untuk disetujui oleh Bappenas, yang waktu itu masih sangat "berkuasa" untuk memuluskan atau mengebiri anggaran yang diajukan instansi

pemerintah. Kedua tokoh ini telah berhasil menyibakkan kabut misteri yang menyelimuti praktik korupsi di Indonesia selama Orba berkuasa.

Sebelumnya, selama puluhan tahun, korupsi di Indonesia antara "ada dan tiada". Praktik korupsi hanya sebatas pergunjangan dari mulut ke mulut, atau wacana terbatas atau bisik-bisik di kaki lima. Seperti asap, terlihat jelas di depan mata, namun tidak terasa saat disentuh.

Bagaimanapun, korupsi tetaplah aib, bertentangan dengan hukum dan norma agama. Korupsi identik dengan mencuri. Konsekuensinya adalah penjara. Atau babak belur dihajar massa seperti dialami para pencopet di bus kota atau di kereta api.

Kesempatan

Korupsi terjadi terutama karena terbukanya peluang dan kesempatan. Di jajaran pemerintahan misalnya, praktik korupsi akan lebih marak di lingkungan proyek-proyek, yang merupakan salah satu pendorong seseorang untuk melakukan korupsi.

Artinya, praktik korupsi sebenarnya bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Tidak hanya di jajaran birokrasi pemerintahan, di kalangan swasta pun kasus ini tetap ada. Cuma entah kenapa, kasus korupsi yang melibatkan pejabat pemerintahan akan lebih cepat gaungnya dibanding di kalangan swasta. Penyebabnya mungkin, karena pegawai negeri yang sudah terlanjur mapan dengan citranya sebagai abdi negara dan pelayan publik. Artinya, mereka diharuskan jujur, melayani dan mengabdikan kepada kepentingan negara, bangsa dan masyarakat. Harus menjadi panutan dalam hal kejujuran.

Tapi itulah, seperti kata anak muda sekarang, PNS juga manusia. Mengapa? Gaji yang diterima PNS, sejatinya, masih jauh dari kebutuhan riil.

Karena itu, praktik korupsi di jajaran pegawai negeri jangan disamaratakan. Bobot dan latar belakangnya, harus difahami guna menghindari vonnis moral yang terlalu kejam. Yang membuat terenyuh, seorang pegawai rendah terpaksa menandatangani SPPD fiktif demi seliter-dua liter beras atau untuk mencicil pembayaran uang sekolah anak-anaknya. Sebaliknya, siapa pun pasti geram mendengar seorang pejabat tinggi mengkorup miliaran rupiah hanya untuk memanjakan "bini muda" atau sebagai "cadangan devisa" untuk tujuh turunan. ■ SBR, SH

Perjuangan Berat di Sarang Pencoleng

Penanganan kasus korupsi di Indonesia, khususnya di daerah, belum mengalami kemajuan yang signifikan. Pentingnya reformasi birokrasi dan perbaikan sistem untuk pencegahan korupsi.

Hasil survei lembaga Konsultan Risiko Politik dan Ekonomi (PERC) menyebutkan upaya Indonesia memberantas korupsi meningkat. Menurut lembaga yang berpusat di Hongkong itu, rangkuman hasil surveinya dengan responden 1.500 pelaku usaha asing di 13 negara selama Januari dan Februari lalu, Filipina menjadi negara terkorup di Asia. Singapura dan Hongkong adalah negara yang bersih dari korupsi.

Dengan sistem penggolongan dan nilai 0 sampai 10 sebagai nilai terburuk,

Filipina mendapat nilai 9,40. Indonesia pernah mengisi posisi Filipina tahun lalu sebagai negara terkorup di Asia.

Menurut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sjahrudin Rasol, dibutuhkan 10-15 tahun untuk mencetak generasi bebas korupsi, itupun jika pemberantasan korupsi dilakukan serius terus menerus.

Kesimpulan bernada pesimis justru ditemukan pada hasil survei Transparency International Indonesia (TII). Seperti dilansir *Republika* dan *Investor Daily*, 28 Februari 2007, Indonesia



Dibutuhkan 10-15 tahun untuk mencetak generasi beb...

Berikut adalah beberapa kasus korupsi yang sudah ditangani peradilan, yang melibatkan penegak hukum, pejabat birokrasi pusat maupun daerah:



Suwarna Abdul Fatah

▲ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonis Gubernur (non-aktif) Suwarna Abdul Fatah 18 bulan penjara. Suwarna diajukan ke persidangan lantaran memberikan fasilitas kepada beberapa perusahaan untuk mengelola lahan tanpa jaminan bank.

▶▶ Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi memvonis mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Theodorus F Toemion enam tahun penjara, denda 300 juta, dan membayar uang pengganti sebesar Rp 23,115 miliar. Theo telah merugikan keuangan negara, dengan menggunakan sebagian besar dana proyek Indonesia Investment Year 2003-2004 yang semula untuk kegiatan promosi, tetapi digunakan untuk pembuatan TV Trang Channel milik PT Trang Indonesia Indah milik Theo.

▶▶ Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang diketuai Masruddin Chaniago memvonis anggota KPU Mulyana W. Kusuma 2 tahun 7 bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsidi 3 bulan kurungan. Dia kembali divonis 15 bulan penjara karena terbukti melakukan korupsi dalam pengadaan kotak suara. Sedangkan Pelaksana Harian Sekjen KPU Sussongko Suhardjo diganjar 2 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsidi tiga bulan kurungan. Dia dan Mulyana dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana penyuapan Rp 300 juta terhadap auditor BPK Khairiansyah Salman.



Tabrani Ismail

▲ Tabrani Ismail divonis enam tahun penjara, denda Rp 30 juta dan uang pengganti 189,5 juta dollar AS oleh Mahkamah Agung, 26 April 2006.

Majelis hakim kasasi menilai Tabrani terbukti korupsi dalam proyek Exsport Oriented Refinery (Exor) I Pertamina di Balongan sehingga merugikan negara 189,5 juta dollar AS.



Rustam Effendy Sidabutar

▲ Mantan Kepala Dinas Perhubungan (Kadis-hub) DKI Rustam Effendy Sidabutar divonis 3 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Rustam dihukum dalam kasus korupsi pengadaan busway koridor I tahun 2003-2004 yang menyebabkan kerugian negara Rp 10,6 miliar.

▶▶ Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri



bas korupsi.

foto: berindo wilson

masih menjadi surga untuk para koruptor. Namun demikian, ada perkembangan positif yang diperlihatkan survei yang dilakukan akhir 2006 itu. Komitmen kepala daerah, bupati dan walikota di 32 kota dalam memberantas korupsi semakin meningkat.

Survei TII dilakukan selama periode Oktober-Desember 2006 dengan melibatkan 1.760 pelaku usaha dari 32 kota di Indonesia.

Dalam survei ini terungkap lembaga peradilan merupakan lembaga yang paling tinggi inisiatifnya meminta suap mencapai 100%, disusul Bea Cukai 95%, Imigrasi 90%, BPN 84%, polisi 78%, pajak 76%.

Di Pemda, Dinas Tenaga Kerja, inisiatif suapnya 84%, Dinas Kimpraswil 82%, pengurusan izin usaha 82%. Diprediksi tiga tahun kedepan, praktik meminta suap akan makin meningkat.

Deputi Bidang Pencegahan KPK Waluyo mengatakan, hasil temuan itu menguatkan apa yang selalu diingatkan oleh KPK tentang pentingnya reformasi birokrasi dan perbaikan sistem untuk pencegahan korupsi. ■ RH

Komisaris Jenderal Suyitno Landung divonis hukuman 18 bulan penjara dan denda 50 juta subsidi enam bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada 26 September 2006 pengadilan yang sama telah memvonis mantan Direktur II/ Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigadir Jenderal (Pol.Purn) Samuel Ismoko dengan hukuman 20 bulan penjara. Sebelumnya, Komisaris Besar Iman Santoso juga divonis dua tahun delapan bulan penjara pada 29 Juli 2006. Mereka dijerat dengan hukuman yang sama, yaitu Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetapi bentuk korupsi mereka berbeda.



Erick Hikmat Setiawan

▲ Mantan Konsul Jenderal RI di Penang, Malaysia Erick Hikmat Setiawan, divonis 20 bulan atau

satu tahun delapan bulan penjara. Erik dinyatakan terbukti bersalah karena bersama-sama dengan Kepala Subbidang Imigrasi Konjen RI Penang M Khusnul Yakin Payopo melakukan tindak pidana korupsi, yakni melakukan pemungutan biaya pengurusan dokumen keimigrasian lebih besar daripada yang dilaporkan ke kas negara.



Harini Wijoso

▲ Dua terdakwa perkara suap di Mahkamah Agung, Harini Wijoso dan Pono Waluyo, dinilai tidak terbukti melakukan permufakatan jahat untuk mempengaruhi hakim Agung Bagir Manan untuk mengurus perkara kasasi Probosutedjo. Harini

divonis empat tahun penjara, sedangkan Pono Waluyo divonis tiga tahun penjara.

▼ Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang diketuai Andi Samsan Nganro, menjatuhkan vonis empat tahun enam bulan (4,5 tahun) kepada hakim PN Jakarta Selatan Herman Allositandi. Majelis juga menghukum Herman membayar denda Rp 200 juta, atau dua bulan kurungan. Sementara itu, majelis hakim PN Jakarta Selatan yang diketuai Wahjono menjatuhkan vonis empat tahun penjara kepada panitera PN Jakarta Selatan Andry Djemi Lumanauw. Djemi dihukum membayar denda Rp 200 juta, atau satu bulan kurungan. Keduanya terbukti secara bersama-sama melakukan korupsi, memaksa Walter Sigalingging, saksi perkara korupsi PT Jamsostek, memberikan uang.



Herman Allositandi

Tiada Maaf Buat Koruptor

Tanpa banyak publikasi, BPKP terus bekerja mencegah terjadinya korupsi. Sejumlah temuan yang berindikasi korupsi diteruskan ke aparat penyidik.

Nasib koruptor berujung di balik jeruji penjara. Koruptor terakhir yang dijebloskan ke rumah tahanan, Widjanarko Puspoyo, juga dicopot dari jabatan basah, Direktur Utama Perum Bulog.

Widjan, panggilan akrabnya, tersandung kasus korupsi impor sapi fiktif di Bulog. Lima anak buahnya sudah ditahan duluan. Kasus tersebut sebenarnya terjadi tahun 2001, tetapi lama dipendam. Kasus itu dibuka kembali setelah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dalam audit investigasinya, menemukan kegagalan, kemudian diserahkan ke Kejaksaan Agung.

Dia diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 11 miliar. Widjan membujuk jaksa akan mengembalikan uang sejumlah tersebut asalkan bisa ditahan luar. Jaksa menolak, dia pun dijebloskan ke rumah tahanan Kejaksaan Agung.

Kasus Bulog hanyalah salah satu dari sejumlah kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi dan penyimpangan keuangan yang terungkap berkat peran BPKP. Lembaga pengawasan internal pemerintah ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No.31 Tahun 1983, dan berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada presiden. Dalam kiprahnya sebagai auditor pemerintah, lembaga pemerintah non departemen (LPND) ini terkesan lebih banyak diam dan jauh dari publikasi.

Kepala BPKP Drs Didi Widayadi MBA dalam wawancara khusus dengan wartawan *Berita Indonesia* Suryo Pranoto dan Amron Ritonga menegaskan bahwa bangsa ini tidak boleh toleran dengan masalah korupsi, dan harus dengan serius memberantasnya. Bagi BPKP sendiri tidak ada tawar-menawar jika menemukan

indikasi korupsi yang merugikan keuangan negara.

"Jika dalam audit investigasi ditemukan indikasi korupsi, maka BPKP akan meneruskan ke tingkat penyidikan, bekerja sama dengan Kejaksaan, Kepolisian dan KPK. BPKP terus mengawal kasus-kasus tersebut sampai ke pengadilan," tegas Didi Widayadi, mantan Inspektur Pengawasan Umum Polri.

Selama periode 2002-2006, BPKP telah menyerahkan 486 kasus dari hasil audit investigasi, ke pihak penyidik. Total kerugian keuangan negara mencapai Rp 1, 432 triliun plus 29 juta dolar AS dan 245.000 Franc. Didi merinci lebih lanjut, sebanyak 222 kasus dikirim ke Kejaksaan—nilai kerugian keuangan negara Rp 439 miliar plus 14 juta dolar AS dan 245.000 Franc. Sedangkan 195 kasus dikirim ke Kepolisian—nilai kerugian keuangan negara Rp 385 miliar plus 8 juta dolar AS. Sebanyak 69 kasus dikirim ke KPK (sejak tahun 2004)—nilai kerugian keuangan negara Rp 608 miliar plus 7 juta dolar AS.

Sebagai auditor internal pemerintah dengan ruang lingkup yang amat luas, BPKP memiliki peran yang sangat strategis. Tidak saja dalam memberikan informasi penting yang dibutuhkan oleh pimpinan pemerintahan, tetapi juga ikut membangun pemerintahan yang baik menuju pemerintah yang bersih.

Tentang kiprah BPKP yang dipimpinnya di era reformasi, Didi berjanji akan lebih proaktif dalam mengaudit dan mengevaluasi kegiatan dan program pemerintah. Langkah proaktif ini dilakukan untuk mencegah dan menghindari terjadinya penyimpangan dan kebocoran keuangan negara. Langkah terobosan yang dilakukan Didi sejak menjabat Kepala BPKP (November 2006), mereposisi dan me-



foto: berindo amron

Kepala BPKP Drs Didi Widayadi MBA saat wawancara dengan wartawan *Berita Indonesia*.

revitalisasi lembaga berikut kinerja aparatnya.

Arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika membuka Rakernas Pengawasan Intern Pemerintah, BPKP harus memiliki kompetensi inti di dalam audit internal, dan semakin profesional. BPKP ke depan ini, menurut Didi, lebih menempatkan diri pada fungsi pencegahan tindak korupsi. Hasil-hasil audit pemberantasan akan dianalisis sebagai dasar membangun sistem manajemen pemerintahan yang lebih baik. "Kita ingin mencegah *moral hazard* atau penyimpangan yang mungkin dilakukan oleh manajemen," kata Didi.

BPKP, dengan kekuatan sekitar 7.000 personil, 74% SDM-nya berbasis akuntan, merupakan lembaga akunting terbesar di republik ini, lengkap dengan lembaga pendidikannya.

Didi menyayangkan tidak dimanfaatkannya BPKP seoptimal mungkin, padahal bangsa ini sangat membutuhkannya dalam pengelolaan keuangan negara yang semakin besar. Selama menjadi Kepala BPKP, dia sudah memecat dan memberhentikan secara hormat dan tidak hormat 600 personil, sementara mereka yang eksodus maupun bekerja di dua tempat harus membayar ganti rugi.

"Saya tidak menginginkan pegawai yang berdedikasi tidak baik," kata Didi.

Bilamana dihitung dengan nilai uang tenaga-tenaga doktor, master dan sarjana BPKP yang mubazir dan membebani keuangan negara sekitar Rp 300 miliar. Padahal mereka bisa menjadi investasi apabila didayagunakan secara optimal. Lebih dari itu, mereka pun harus pensiun dalam usia 56 tahun. Padahal profesionalitas mereka masih prima dan sangat dibutuhkan.

Kata Didi, usia pensiun mereka seharusnya di atas 58 tahun seperti yang diberlakukan pada personil TNI dan Polri. Padahal mereka dimanfaatkan bukan untuk lari-lari atau menembak, di BPKP yang dipakai otak.

Masalah tunjangan jabatan juga sangat dikeluhkan, karena paling rendah dibandingkan dengan KPK dan BPK. Didi berterus terang bahwa dia mengalami kesulitan untuk menggerakkan agar mereka tidak eksodus ke perusahaan-perusahaan minyakin dan perbankan swasta dan asing. "Di kantong saya ini sudah ada tawaran gaji untuk master (S2) ke atas Rp 40 juta sebulan, dan perusahaan-perusahaan itu siap mengganti rugi investasi negara pada mereka," ungkap Didi Widayadi. ■ AM, SP, SH

Pemberantasan Korupsi di Jalan Buntu

Istilah kuldesak atau jalan buntu, tepat untuk menggambarkan kinerja pemberantasan korupsi di Indonesia. Di satu sisi, pemberantasan korupsi berjalan dengan amat lamban, sehingga hasilnya tidak maksimal. Di sisi yang lain, risiko yang muncul di balik pemberantasan korupsi sangat besar, lebih daripada yang diduga.

Tidak ada yang bisa membantah kalau pemberantasan korupsi sudah berjalan. Yang juga tidak terbantahkan, adanya keraguan bahwa pemberantasan korupsi merupakan jalan menuju pembentukan *clean and good government* alias pemerintahan yang bersih dan baik.

Semula banyak yang percaya, dengan peraturan yang keras, bagian dari sistem pemberantasan korupsi di Indonesia, korupsi akan memudar bak embun tersapu matahari pagi. Akan tetapi, sampai terbentuknya lembaga anti korupsi berkapasitas *superbody* seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), korupsi ternyata tetap marak.

Jangan heran bilamana *Political and Economic Risk Consultant (PERC)*, tahun 2007 ini, masih menempatkan Indonesia di urutan kedua paling korup, setelah Filipina. Harian *Kompas* (15/3) melaporkan bahwa *PERC* yang bermarkas di Hong Kong, menempatkan Indonesia di urutan paling atas alias negara paling korup di Asia, tahun lalu.

Tentu menjadi pertanyaan, upaya apa lagi yang harus dilakukan? Bukankah pembentukan KPK dengan kapasitas *superbody*-nya sudah maksimal? Masih adakah lembaga yang lebih "berkuasa" dari *superbody*?

Pembentukan KPK sebagai lambang keseriusan dalam pemberantasan korupsi, pada satu sisi membawa pengharapan terwujudnya tata nilai *clean and good government* dalam birokrasi. Namun di sisi lain, pembentukan lembaga *superbody* seperti itu bukan tanpa risiko, khususnya terhadap perlambatan kinerja perekonomian.

Wakil Presiden Jusuf Kalla, suatu hari, pernah mengingatkan konsekuensi perlambatan kinerja perekonomian di balik kerasnya pemberantasan korupsi. Kalla menohok KPK dalam sebuah seminar pemberantasan korupsi yang digelarinya, Desember 2006.

Dalam seminar bertema "Reformasi Birokrasi: Memutus Mata Rantai Korupsi. Apakah Sekadar Menaikkan Gaji?" itu, Kalla mengingatkan agar keberadaan KPK tidak menimbulkan ketakutan luar biasa, sehingga memacetkan perekonomian.

"Kita dukung langkah anti-korupsi KPK. Tetapi jangan sampai menyebabkan ketakutan luar biasa, sehingga pejabat tidak berani memutuskan apa-apa," kata Kalla ketika itu. Kalla menyontohkan pimpinan bank yang lebih memilih menyimpan dananya ke Sertifikat Bank Indonesia (SBI) sampai sejumlah Rp 200 triliun, tidak berani disalurkan sebagai kredit usaha. Kemudian, pimpinan PLN di Sumatera Utara tidak berani membeli peralatan pembangkit, lebih memilih melakukan pemadaman listrik bergilir.

Dari nada cemas Kalla dapat dipahami bahwa pemberantasan korupsi secara keras, seperti yang dilakukan KPK, tak urung membawa implikasi yang justru bertolak belakang dengan tujuan pemberantasan korupsi. Padahal maksud pemberantasan korupsi membentuk pemerintah yang bersih dan baik agar mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kenyataan lain yang memperkuat kecemasan Kalla, macetnya realisasi APBN. Ketakutan birokrasi terhadap pemberantasan korupsi terlihat dari ren-



foto: presidensby.info

Presiden memberi keterangan pers mengenai peraturan pengadaan barang dan jasa, di Kantor Kepresidenan.

dahnya penyerapan anggaran belanja barang dan modal pada proyek-proyek milik pemerintah. Proyek-proyek pengadaan barang dan barang modal pemerintah telah menjadi lahan korupsi para birokrat. Tak heran, ketika pemberantasan korupsi mencuat, pejabat birokrat langsung menjauhi proyek-proyek agar terhindar dari pemeriksaan aparat penegak hukum.

APBN berfungsi sebagai stimulus perekonomian. Penundaan pelaksanaan proyek-proyek pemerintah sama dengan menunda aliran investasi dalam perekonomian. Artinya, potensi penyediaan lapangan kerja di tengah lonjakan angka pengangguran, jadi hilang. Peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lantaran tersedianya sarana dan prasarana publik, juga hilang.

Karenanya, pemberantasan korupsi di Indonesia seperti terperangkap dalam jalan buntu. Maju atau mundur, tetap membawa konsekuensi yang sama. Maju berarti memandekkan perekonomian, jika mundur sama artinya merangsang maraknya korupsi.

Menanggapi kekhawatiran Wapres Kalla, dalam kesempatan yang sama Wakil Ketua KPK Erry Rijana Hardjapamengkas mengutarakan pengalaman yang sama di berbagai

negara, seperti Malaysia dan Korea Selatan. Memang pada awalnya, upaya pemberantasan korupsi menimbulkan ketakutan. Namun tidak lama kemudian perekonomian akan tumbuh secara signifikan seiring dengan hilangnya praktik-praktik korupsi yang membuat pelayanan publik berbiaya tinggi.

Setengah Hati

Saat ini, pemberantasan korupsi sudah berada pada titik berbahaya. Jika terus maju, maka pemerintah harus rela menerima konsekuensi perlambatan kinerja perekonomian. Sebaliknya, jika terhenti, korupsi akan merajalela. Konsekuensi yang harus diterima, kesejahteraan rakyat jadi korban untuk jangka panjang.

Fenomena kuldesak seperti ini dinilai banyak kalangan sebagai keadaan yang muncul lantaran pemberantasan korupsi setengah hati. Indikasi itu terlihat dari pemeriksaan dan penangkapan yang dilakukan pemerintah selama ini, terkesan hanya ditujukan pada orang-orang tertentu. Bahkan lebih buruk lagi, hanya ditujukan kepada mantan petinggi pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Ini merupakan fenomena terbalik dari pemerintah yang dinilai gagal melaksanakan amanat reformasi. ■ MS, SH

WAWANCARA

Kepala BPKP Drs Didi Widayadi MBA:

Korupsi Tabu Dunia-Akhirat

Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, seperti halnya pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, sangat memperhatikan pemberantasan korupsi. Banyak kasus korupsi diungkap, dan pelakunya dijebloskan ke penjara. Namun realita menunjukkan korupsi masih tetap terjadi. Apa yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam menangani kasus korupsi yang semakin kompleks?

Berikut ini kutipan wawancara Kepala BPKP Drs Didi Widayadi MBA—didampingi Deputi Investigasi Suradji dan Kabag Humas Suyadiarto Priyono—dengan wartawan *Berita Indonesia*, Suryo Pranoto dan Amron Ritonga.

Bagaimana Anda melihat persoalan korupsi yang masih terus terjadi?

Jadi, secara umum dulu, bahwa masalah korupsi ini banyak orang mengatakan sudah “membudaya” dan sejarahnya itu panjang sekali. Kita tidak bisa hanya melihat satu aspek ekonomi saja, tapi sudah kompleks permasalahannya menjadi suatu kasus khusus. Apalagi dalam konteks internasional, kita juga di rating terendah dan dari tahun ke tahun belum signifikan perubahannya sampai sekarang ini. Kita justru nomor tiga dari bawah.

Lantas bagaimana menanggapi hal ini?

Sebetulnya kita tidak boleh toleran dengan masalah korupsi. Korupsi harus kita tiadakan. Karena apa? Korupsi ini adalah suatu pengingkaran terhadap pro publik, dunia akhirat itu ditabukan. Karena membangun masyarakat bangsa seperti Indonesia ini, yang sudah ibarat tercengkrum dengan ‘budaya’ korupsi, tentunya tidak hanya masalah *law-enforcement* saja, tapi juga diseminasi pendidikan masyarakat tentang bahayanya korupsi juga harus dioptimalkan. Karena, interaktif pemberi maupun penerima, tidak terlepas dari pada niat dan kesempatan orang melakukan korupsi.

Apa yang menjadi persoalan dalam mencegah terjadinya korupsi?

Tahun demi tahun pemerintah memberikan dana, baik itu di APBN maupun APBD yang semakin meningkat. Untuk tahun ini APBN mencapai Rp 763 triliun, tahun sebelumnya Rp 600 triliun lebih. Dana itu didistribusi ke daerah sampai dekonsentrasi. Tetapi distribusi ini tidak diimbangi dengan distribusi kualitas SDM yang memadai dan cenderung tidak berubah dari tahun-tahun sebelumnya, terutama tentang masalah *attitude*. Demikian pula sistem, terutama sistem pengawasan yang juga belum berubah. Jadi uang didistribusikan semakin besar tapi distribusi masalah sistem dan SDM tidak mengimbangnya. Hal ini berpotensi terjadi penyimpangan dan juga korupsi. Penyimpangan bisa terjadi karena ketidakmampuan pengelolaan sehingga terjadi kebocoran keuangan negara, tapi belum tentu korupsi. Tapi, juga ada orang yang memang punya niat untuk melakukan korupsi.

Langkah apa yang dilakukan BPKP?

BPKP sebagai auditor pengawasan intern pemerintah, sebagai auditor presiden, mempunyai misi strategik untuk penanggulangan korupsi pada aspek preventif maupun juga *pre-emptive*. Melalui *pre-emptive* itu diberikan suatu kesadaran melalui edukasi, melalui sosialisasi tentang bahaya laten korupsi. Kita berupaya agar mereka sadar dan memahami bahayanya korupsi ini. Sebab kadang-kadang juga tidak disadari karena melihat peluang untuk memaksimalkan *provit* tanpa melihat bahwa ini ada implikasi-implikasi yang melawan hukum. Kita juga melakukan langkah-langkah dengan membentuk model dan



Drs Didi Widayadi MBA

koridor-koridor dalam bentuk modul-modul, juga SOP (Standar Operasional Prosedur) agar orang taat dan tidak keluar dari situ. Jadi kita sudah berikan koridor-koridor dan juga melakukan pendampingan di situ, jangan sampai mereka melakukan *moral hazard*.

Apakah hasil yang dicapai sudah optimal?

Pengelolaan keuangan negara memang merupakan persoalan besar. Karena harus diakui, bahwa Indonesia merupakan negara yang besar dengan peredaran uang yang demikian luas sementara sistem yang ada belum begitu *fixs* seperti yang diharapkan. Di sisi lain, masih ada orang, yang baik itu karena ketidaktahuan, tidak *care* dan *easy going*, dia terus melakukan



foto: berindo amron

pemborosan-pemborosan dan tidak efisien dalam melakukan sesuatu tujuan. Mungkin saja tujuan itu bukan untuk memperkaya diri sendiri, tapi karena kebodohannya yang tidak memahami aturan, sehingga perusahaan ataupun instansinya merugi yang pada akhirnya memberikan besaran terhadap potensi penyimpangan maupun korupsi dan kerugian negara.

Apa yang dilakukan BPKP atas temuan yang berindikasi korupsi?

Manakala berdasarkan hasil audit investigasi dalamnya ada indikasi melawan hukum, maka tentunya kita rekomendasikan kepada auditan untuk dilanjutkan sampai gelar perkara. Itu langkah-langkah represif *projustisia* yang

kita rekomendasikan ke aparat penegak hukum seperti Kejaksaan, Kepolisian dan KPK serta Timastipkor. BPKP terus mengawal kasus ini ke penyidikan hingga ke pengadilan. Langkah penegakan hukum ini dilakukan untuk memberikan efek *deterrent* (jera), agar orang tidak mencoba-coba melakukan korupsi.

Semua yang dilakukan BPKP ini - sesuai dengan profesi akuntan - adalah untuk bisa mengamankan uang yang bocor atau hilang itu kembali kepada negara demi masyarakat bangsa dan kemaslahatan orang banyak

Bagaimana penataan kebijakan terkait masalah ini?

Memang soal korupsi tidak hanya masalah *physical* adanya uang yang dikorupsi, tapi juga masalah kebijakan. Ini harus didalami karena potensi kebijakan-kebijakan yang disengaja KKN atau kebijakan-kebijakan yang tidak waspada, bisa menimbulkan kasus-kasus korupsi yang disengaja maupun tidak disengaja. Cara menanggulangnya itu ya tentunya hulu-hilir. Yang sifatnya laten sampai *moral hazard*, harus kita tangani sampai kasus itu di pengadilan. Itu yang memang menjadi suatu tugas BPKP yang agak sulit. Karena kewenangan BPKP itu sangat lemah sekali, dalam arti terkait UU, termasuk dalam tataran UUD. Sebagaimana kita tahu, BPK sebagai auditor eksternal dalam UU nomor 17 tahun 2003 termasuk juga paket UU nomor 1 dan 15 tahun 2004 itu sangat *power full*. Sedangkan peran BPKP sebagai internal auditor, tidak diposisikan secara jelas.

Ada kecenderungan pejabat takut menjadi pimpro dan banyak dana yang disimpan di SBI, bagaimana bapak melihat hal ini?

Banyaknya kasus-kasus yang diproses di penyidik kejaksaan, kepolisian dan KPK memang terindikasi membuat orang cenderung takut menjadi pimpro, karena aturan-aturan yang dianggap belum pas. Akhirnya mereka mencari aman dan menyimpan dana itu di SBI atau bank daerah. Akibatnya, pembangunan stagnan dan sektor riil tidak berjalan. Sebagai contoh, dana DIPA yang diturunkan ke daerah-daerah belum sepenuhnya terserap. Padahal dalam aturannya, Desember 2006, RAPBD sudah di syahkan oleh DPRD. Namun sampai sekarang masih di bawah 5%, padahal ini sudah bulan Maret menjelang April. Bahkan tahun lalu pun sampai ada yang satu tahun tidak digunakan, seperti di Lampung karena ada kisruh antara Gubernur dan DPRD. Juga di Mimika karena DPRD-nya tidak ada. Sebenarnya pejabat tidak perlu merasa takut diperiksa KPK atau Polri kalau tidak

Biodata:

Nama : Drs Didi Widayadi MBA
Lahir : Malang, 28 Juli 1949
Pangkat Terakhir : Komisaris Jenderal Polisi

Pendidikan:

- ▶▶ AKABRI 1972
- ▶▶ S1 PTIK 1979
- ▶▶ S2/MBA 1991
- ▶▶ Sespim Polri 1985
- ▶▶ Lemhannas 1995

Kejuruan:

- ▶▶ Intelstrat, CID & Umwelt Crime Bundes-kriminalamt Jerman
- ▶▶ 911 ERS Montreal, Kanada
- ▶▶ Auditor BPKP – Pusdiklat Pengawasan BPKP, Ciawi, Bogor

Jabatan:

- ▶▶ Kapolres Pandeglang
- ▶▶ Kapolres Ciamis
- ▶▶ Kapolres Bogor
- ▶▶ Kapoltabes Semarang
- ▶▶ Kapoltabes Bandung
- ▶▶ Kapolda Sumsel
- ▶▶ Kapolda Jateng
- ▶▶ Kadis Infolaha Polri
- ▶▶ Kabag Humas Polri
- ▶▶ Deputi Operasi Kapolri
- ▶▶ Inspektur Polda Sulse
- ▶▶ Inspektur Lemdiklat Polri
- ▶▶ Inspektur Wasum Polri
- ▶▶ Kepala BPKP

ada niat berbuat jahat. Karena BPKP akan membantu asal penuh keterbukaan dan transparansi. BPKP akan memberikan pendampingan kepada Itjen dan Bawasda dalam membantu melakukan review sesuai dengan disiplin akuntansi yang benar, membuat neraca yang benar, dalam rangka *good governance*.

Bapak optimis korupsi bisa diberantas?

Harus optimis. Dengan optimis itu menjadi semangat, bangga. Orang yang tidak optimis, tidak punya obsesi, tinggal tunggu masuk lobang saja. Kita harus optimis untuk tetap tegar dalam dekadensi moral bangsa yang seperti sekarang ini. Kalau terlarut dalam golongan turbolensi masyarakat global nanti kita lupa akan kebijakan Indonesia dan ke-Indonesia-an itu sendiri. Kita tidak boleh kehilangan orientasi dalam membangun bangsa ke depan. Kita sekarang ini sedang sakit, nah dari mana kita mulai? Dari diri kita sendiri untuk punya cita-cita dan harus optimistis. Kalau tidak seperti itu kita menjadi korban pelengkap penderita saja. ■ AM, SP, SH

Main Api Dengan Ijazah

Depdagri kembali bermain api. Tadinya menyusun PP 37/2006 yang membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berada pada posisi terjepit. Kali ini memasukkan syarat lulusan sarjana pada draf revisi UU Pilpres.

“Titik panas” ketiga telah membuat mantan Presiden Megawati Soekarnoputri harus berhadapan langsung dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Soal pencantuman syarat sarjana (S-1)—dalam RUU Pemilihan Presiden—bagi para calon presiden dan wakil presiden untuk mengikuti Pilpres tahun 2009, muncul jadi polemik yang mengundang reaksi pro-kontra. Kali ini kubu Megawati yang bereaksi keras.

Megawati pula yang memantik titik api pertama, mengeritik pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, akrab dipanggil SBY, dengan konotasi yang lantas jadi populer, “pemerintah lebih banyak tebar pesona ketimbang menebarkan karya.” Awalnya, SBY bereaksi keras dengan nada membalas, “mereka jangan hanya bisa bicara, tetapi tanpa berbuat untuk rakyat.” Belakangan, SBY menerima kritik tersebut sebagai seni berpolitik dan masuk positif.

Kemudian Megawati masih melontarkan kritik menyangkut PP 37/2006 tentang rapel tunjangan komunikasi DPRD. Megawati secara tak langsung meminta Presiden SBY bersikap tegas dan konsisten terhadap semua keputusan yang sudah diambilnya, apalagi sudah dituangkan di dalam peraturan pemerintah. Kali ini SBY membalas kritik Megawati, dan banjir protes dari masyarakat, dengan merevisi PP tersebut dan mencabut pasal tentang rapel tunjangan komunikasi DPRD. PP tersebut akhirnya dicabut.

Sepertinya “pertarungan” terselubung antara Mega dan SBY akan terus memanaskan sampai mendekati Pilpres tahun 2009. Pukulan telak terhadap dirinya yang tidak lulus sarjana, hanya sampai tingkat dua Fakultas Psikologi UI, membuat Mega bereaksi keras. Soalnya, Megawati sudah resmi dicalonkan oleh partainya sebagai Capres tahun 2009.

“Saya gampang saja. Semua terserah rakyat yang memilih,” kata Megawati, Ketua Umum PDIP, ketika memberikan sambutan pada temu wicara dengan Mahkamah Konstitusi (16/3), seperti dikutip harian *Media Indonesia* (17/3). Harian yang beredar luas ini menempatkan laporannya pada rubrik *berita utama* di

halaman satu.

Megawati melihat syarat lulusan sarjana tersebut sebagai bagian dari rekayasa politik, sebab soal presiden mestinya diserahkan pada rakyat. Mantan presiden yang dikalahkan oleh menteri seniornya, SBY, ini menanggapi usulan Departemen Dalam Negeri dalam revisi UU Nomor 23/2003 atau RUU tentang Pemilihan Presiden, salah satu pasalnya menyaratkan calon Presiden dan Wakil Presiden harus lulusan sarjana (S-1).

Megawati mengaku bukan lulusan sarjana, tetapi terpilih jadi presiden (Megawati dipilih oleh MPR-Red). Pada Pilpres yang akan diikutinya tahun 2009, Megawati menyerahkannya kepada rakyat. “Saya bukan orang sekolahan. Tetapi sekarang ini pemilihan langsung. Kalau dulu sistem perwakilan, bisa direkayasa, tetapi sekarang rekayasa hanya sedikit-sedikit,” kata Megawati seperti dikutip *MI*.

Suami Megawati, Taufik Kiemas yang menjabat Ketua Dewan Pertimbangan PDIP, mengatakan syarat sarjana tidak tercantum di dalam UUD 1945. Syarat yang tercantum hanya sehat jasmani dan rohani, bisa baca dan tulis. “Karenanya, syarat itu jangan diteruskan. Biar saja rakyat yang menentukan,” kata Taufik, juga dikutip oleh *MI*.

MI masih membela kubu Megawati dengan menurunkan tajuk di halaman depan (16/3): “Syarat seperti itu lagi-lagi memperlihatkan betapa pikiran tentang kualitas di negeri ini sangat formalistis. Yang bermutu selalu berarti produk pendidikan formal. Padahal yang dibutuhkan sesungguhnya adalah kecakapan. Seorang pemimpin atau para elite yang cakap berlogika atau yang memiliki intelegensia dan cakap mentalitas. Dan, harus disadari benar bahwa kecakapan seperti ini tidak semata-mata lahir dari pendidikan formal.”

Kubu SBY memberi jawaban cukup tegas melalui Sekab Sudi Silalahi dan Jubir Presiden Andi Mallarangeng seperti dikutip koran sore, *Suara Pembaruan* (17/3). Presiden menyangkal tuduhan bahwa dirinya mencoba menghalangi para pesaingnya mencalonkan diri sebagai Capres dengan persyaratan ijazah. Kata Sudi, Presiden sama sekali tidak



punya pemikiran mengubah persyaratan tersebut melalui pembahasan RUU Politik di DPR.

Sudi dan Andi harus buru-buru menggelar konferensi pers begitu polemik tentang syarat lulusan sarjana mendapat reaksi dari Megawati. Menurut Sudi, draf revisi terhadap UU No.23/2003 belum pernah disampaikan kepada Presiden. Karenanya, Presiden masih berpegang pada UU no. 23/2003. Di dalam UU tersebut seorang Capres dan Cawapres hanya disyaratkan berijazah SLTA.

Ketua MPR Hidayat Nur Wahid malah bereaksi lebih keras, menyebut pencantuman syarat tersebut sebagai pembusukan terhadap pemerintah, khususnya Presiden SBY. Seperti dikutip harian *Republika* (20/3), Hidayat mencemaskan adanya upaya pembusukan terhadap pemerintah di balik pengajuan syarat ijazah tersebut.

Karenanya, bekas pucuk pimpinan PKS, partai pendukung SBY itu, meminta pemerintah bersikap tegas terhadap persoalan yang tercantum di dalam draf revisi UU Pilpres yang akan diajukan melalui Mendagri. Hidayat mengutip pernyataan yang pernah dikemukakan oleh SBY

zah Sarjana

MA Kurang Responsif Soal Suap di Peradilan' HUKUM Hal 2

Barat tak Sepakat Soal Iran INTERNASIONAL Hal 9

Industri Malaysia Kesulitan Cari Pekerja STRAITS TIMES Hal 15

ERONOMI & BISNIS Hal 13 Plus Minus Investasi di Cina dan India

REPUBLIKA

REKAM 5 MARET 2007 • 2007 HARI KEMERDEKAAN 62 KE-50 • MAHA MEDIA • WWW.REPUBLIKA.CO.ID • KANGKARANG 7 JAKARA 3 500 LILIAN 7 JAKARA 3 500 DITIRAKAN DOKTERI 5000

Kalo ada yang ekstra, ngapain pilih yang biasa?

simPATI ekstra hemat Rp 23.000 - 07.00 Rp 199. Berkatnya untuk seluruh pelanggan simPATI ke rumah Telekomunikasi 21 Mei 2007 • 1st ulang simPATI hemat Rp 12 ribu di M. Klat

Waspada! Kiriman Sikon 'George'

Hujan lebat yang mengguyur wilayah barat Pulau Flores sejak Kamis (12/3) lalu, mengakibatkan banjir dari tanah longsor di sebagian kawasan Nusa Tenggara Timur (NTT). Hujan ini pula yang memaksa Kabupaten Manggarai dan sekitarnya mengalirkan korban jiwa.

Namun, curah hujan yang tinggi ini diperkirakan bukan terbentuk di langit NTT, melainkan kumulasi Siklon tropis George yang sedang tumbuh di atas wilayah perairan Australia, dituangkan menjadi banjir-banjir di darahnya curah hujan yang melanda kawasan NTT.

"Bila badai yang terjadi di Australia itu sudah berubah menjadi siklon tropis, sehingga menimbulkan hujan lebat yang mengakibatkan banjir dan tanah longsor di sebagian wilayah NTT," kata Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun El-Tan Kupang, Albertus Kusubono, Ahad (14/3).

"Siklon tropis yang biasa juga disebut sebagai 'gigit zayun', sudah ada kalanya ada sistem tekanan udara rendah yang terbentuk secara umum di kawasan tropis. Siklon sendiri berasal dari kata Yunani kuno yang artinya angin atau roda.

Beberapa strukturnya, siklon tropis adalah daerah tekanan rendah di atas lautan, angin, dan badai petir yang berputar kencang. Siklon tropis merupakan bagian penting dari sistem sirkulasi

Ribuan Balita Kekurangan Gizi

'Wahah kelaparan bisa memicu tsunami sosial'

dari keluarga mampu jumlahnya relatif tidak banyak. Meski kekurangan gizi, mereka tetap bisa memberikan makanan tambahan selama 90 hari, belum tentu bisa bertahan dan makan-gori gizi buruk paling banyak ditemukan di wilayah Kecamatan Cibatujah dan sekitarnya.

namun sosial. Artinya, wahah kelaparan bisa lebih parah dampaknya daripada bencana alam.

bahwa dia akan bersikap demokratis, tidak membatasi siapa pun yang ingin maju menjadi Capres.

"Presiden sudah berhati-hati ngomong seperti itu. *Lha kok* ada yang tiba-tiba mengajukan syarat tersebut," kata Hidayat seperti dikutip *Republika*.

Hidayat mengingatkan bahwa masyarakat tidak akan mempersoalkan pihak yang mengajukan syarat tersebut, tetapi yang jadi sasaran tembak, pemerintah, terutama Presiden SBY. Karenanya dia meminta pemerintah segera bertindak tegas dan menghukum pihak-pihak yang melakukan pembusukan. Hidayat menilai usulan tersebut tidak wajar dan tidak cerdas, karena tidak sesuai dengan UUD 1945.

Menurut Hidayat, rakyat sudah memiliki pengalaman dipimpin oleh insinyur, jenderal, profesor, kiai, doktor dan tamatan SMA. Jadi rakyat telah mampu memilih dan menentukan sendiri Capres.

Tidak Semua Menolak

Sejauh ini menurut catatan Depdiknas, dari tahun 2002 sampai 2006, terdapat 1,233 juta lulusan sarjana (S-1), sebanyak 1.087.000 lulusan S-2, dan 1.240 doktor

yang dihasilkan perguruan tinggi negeri dan swasta Indonesia.

Sebagian besar politisi menolak persyaratan tersebut. Wakil Ketua Umum PPP, Chozin Chumaydi, Wakil Ketua DPR Sutardjo Surjoguritno, Ketua Komisi I Theo Sambuaga, Wakil Ketua Komisi I Tosari Wijaya juga menolak syarat sarjana bagi Capres.

Pucuk pimpinan PPP Suryadharma Ali menilai bahwa persyaratan itu tidak relevan, sebab standar pendidikan tidak menjamin kualitas kepemimpinan seseorang. "Kepemimpinan tidak ditentukan oleh pendidikan," katanya di depan ribuan peserta istighosah. Seperti dikutip *MI*, dia memberi contoh kepemimpinan Megawati dan mantan Menlu Adam Malik (Almarhum). Mereka bukan lulusan sarjana tetapi kualitas kepemimpinan mereka tidak dipertanyakan.

Taufik, seperti dikutip *SP*, masih melontarkan kritik dengan mengajukan pertanyaan: "Apakah saya yang tidak sarjana pantas menjadi anggota DPR?". Namun dia tidak mau menjawab atas nama istrinya, Megawati, karena itu wewenang partai yang menjawabnya.

Ketua PDS Aldentua Siringoringo juga

menolak persyaratan tersebut. Alasannya, sarjana bukan jadi jaminan memiliki pola pikir lebih baik dari orang yang hanya tamat SMA atau sederajat. "Jadi jangan terjebak pada kurikulum resmi dan ijazah yang jadi tolok ukur," kata Aldentua seperti dikutip *SP* (17/3).

Namun tidak semua pihak menolak persyaratan tersebut. Mantan Ketua MPR Amien Rais dan dosen FISIP UI, Eep Saifullah Fatah, justru menganggap persyaratan itu sangat rasional. Amien, menilai standar sarjana untuk Capres-Cawapres relevan dan rasional. Tinggi rendahnya kualitas pendidikan seorang pemimpin akan berimplikasi pada aspek kewibawaan pemimpin tersebut. "Jadi syarat sarjana masuk masuk akal," kata Amien di Batam Sabtu lalu seperti dikutip *Batam Pos* (Grup *Indo Pos*).

Amien yang juga Ketua Dewan Pertimbangan PAN menilai bahwa standar kesarjanaan tersebut setidaknya bisa membuat seorang pemimpin berpola pikir rasional dan mampu mengambil kebijakan yang sistematis.

Eep mengajak semua pihak membandingkannya dengan standar pendidikan pemimpin nasional di negara-negara lain. "Lagi pula SDM kita yang sudah sarjana banyak," kata Eep. "Jadi persyaratan yang digagas di dalam draf RUU itu tidak muluk dan wajar-wajar saja."

Kata Eep, sebuah sistem harus dibangun untuk melayani berbagai pertimbangan. Bukan karena kepentingan satu orang, perlu disiapkan sistem tertentu. Eep menilai sikap reaksioner yang diperlihatkan SBY, Kalla dan kalangan elit politik partai tidak pada tempatnya.

"Semua pihak, apalagi SBY dan Kalla, kelihatannya tidak mau dicap anti demokrasi karena dianggap menjegal salah seorang Capres," kata Eep. Dia melihat ini mungkin baik dari sisi toleransi politik, tetapi kebutuhan peningkatan kualitas demokrasi dari waktu ke waktu menjadi tidak begitu positif.

Namun Wakil Presiden Jusuf Kalla, seperti dikutip *MI*, berusaha berdiri di tengah. Kalla mengatakan, pembuatan undang-undang, termasuk syarat Capres, serahkan saja pada DPR. Dia melihat kriteria pendidikan sarjana untuk Capres bukan faktor penting yang harus diperdebatkan. "Jadi saya pikir mau SMP, SMA, buat apa kita buat masalah," kata Wapres, di kantornya, seperti dikutip *IP* (19/3).

Yang paling penting menurut pucuk pimpinan partai pendukung utama pemerintah itu, dalam pembuatan RUU tersebut tidak menyimpang dari UUD 1945. ■ **SH**



Penilaian kinerja penerbangan demi perbaikan transportasi udara nasional.

Tak Satu pun Sepenuhnya Aman

Tak ada satu pun maskapai penerbangan di Indonesia yang secara sempurna memenuhi persyaratan peraturan keselamatan penerbangan sipil. Bahkan ada yang mendapat ancaman pencabutan ijin terbang.

Memprihatinkan. Ini barangkali kata yang paling pas untuk menyebutkan kondisi maskapai penerbangan yang ada di tanah air saat ini. Pasalnya, sebagaimana diumumkan Departemen Perhubungan, tidak ada satu pun maskapai penerbangan yang secara sempurna memenuhi persyaratan peraturan keselamatan penerbangan sipil.

"Semua yang diaudit masuk kategori II dan III. Tidak ada yang masuk kategori I," ujar Dirjen Perhubungan Udara Budhi Muliawan Suyitno di Kantor Dephub, Kamis malam (22/3) lalu.

Belakang ini memang sering terjadi kecelakaan udara yang melibatkan sejumlah maskapai penerbangan komersial. Hal tersebut mendorong pemerintah membenahi industri penerbangan nasional. Di antaranya dengan membuat

peringkat keamanan maskapai penerbangan.

Penilaian terhadap kinerja perusahaan penerbangan itu dilakukan dengan menggunakan 20 kriteria. Di antaranya, tindak lanjut hasil audit, pengawasan dan pemeriksaan *ramp check*, personel manajemen dan frekuensi terjadinya kecelakaan.

Dalam penilaian itu Dephub menggunakan pembagian tiga kategori. Untuk kategori I adalah maskapai yang memiliki nilai lebih dari 161. Dalam kategori ini maskapai tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan keselamatan penerbangan sipil. Kategori II adalah maskapai dengan nilai 120 - 161, yakni memenuhi persyaratan minimal penerbangan tapi ada beberapa persyaratan yang belum dilaksanakan.

Sedangkan kategori III adalah maskapai dengan nilai kurang dari 120, yakni mereka

yang sudah memenuhi persyaratan minimal keselamatan penerbangan tetapi masih ada beberapa syarat yang belum dilaksanakan yang berpotensi mengurangi tingkat keselamatan.

Diantara 20 maskapai penerbangan yang diaudit Dephub, sebagian besar (13 maskapai) masuk kategori II. Di antaranya Garuda Indonesia, Merpati Nusantara Airlines, Mandala Airlines, Lion Air dan Sriwijaya Air.

Sedangkan 7 maskapai penerbangan yang masuk kategori III adalah Adam Air, Batavia Air, Kartika Airlines, Jatayu, Trans Wisata Air, Manunggal Air Service dan Tri MG Intra Asia Airlines.

Maskapai yang masuk kategori III akan diberi sanksi administrasi berupa peringatan 1, 2 dan 3 dengan interval waktu tiga bulan. "Jika masih tidak ada perbaikan akan diberikan sanksi pencabutan," ujar Budhi Muliawan. *Rating* ini diberlakukan mulai 22 Maret dan berlaku tiga bulan kedepan, yaitu 22 Juni 2007.

Penilaian itu dilakukan Dephub untuk memprioritaskan aspek keselamatan, keamanan dan pelayanan publik. "Dengan penilaian itu penanganan dapat dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan," ujar mantan Irjen Dephub itu.

Diakuinya, sejak deregulasi airlines banyak terjadi penyimpangan di lingkungan manajemen, operasional, SDM

dan hal teknis lainnya. Dalam penyimpangan itu tersimpan *latent failure* yang sewaktu-waktu menjadi *active failure* berupa kecelakaan, kejadian serius dan kejadian (*incident*).

Menhub Hatta Rajasa yang ditanya wartawan di sela-sela rapat kerja dengan Komisi V DPR menyatakan, alasan di penilaian tersebut semata-mata untuk perbaikan transportasi udara nasional. Bukan untuk mematikan bisnis penerbangan.

Menurutnya, proses penilaian tersebut berjalan transparan dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dan tak ada diskriminasi satu sama lain.

Sejumlah maskapai penerbangan yang dihubungi menyebutkan bisa menerima secara lapang dada hasil peringkat kinerja operasional perusahaan penerbangan mereka. Lion Air misalnya, yang mendapat peringkat kedua akan berupaya memperbaiki kinerjanya. "Bukan berarti kita puas dengan hasil ini, tentu Lion tetap berusaha terus menyempurnakannya," ujar Humas Lion Air Air Hasyim Arsal Alhabsy seperti dikutip *Media Indonesia* (24/3)

Namun Kepala Humas PT Garuda Indonesia Pujo Broto mempertanyakan apakah penilaian Dephub tersebut sudah dilakukan secara komprehensif. Sebab selama ini Garuda yang mempunyai beberapa jalur penerbangan internasional tentunya sudah memenuhi standar internasional.

Garuda juga memiliki kerja sama dengan sejumlah perusahaan penerbangan luar negeri di dalamnya tentu pasti ada *audit safety*.

"Bukannya kita menyangsikan penilaian itu. Tapi apakah sudah dilakukan secara komprehensif," ujarnya dengan nada bertanya.

Namun bagaimana pun, *rating* yang dilakukan ini setidaknya bisa mengingatkan semua maskapai penerbangan nasional tentang pentingnya faktor keselamatan sekaligus diharapkan mendorong mereka memberikan pelayanan terbaik kepada publik konsumennya. ■ SP

Polri Berduka dan Tercoreng

Beberapa oknum anggota Polri menyalahgunakan senjata api untuk membunuh. Terakhir seorang bawahan menembak mati atasannya di Polwiltabes Semarang. Apa yang salah?

Institusi Polri berduka tapi sekaligus juga tercoreng. Peristiwa tragis dan memilukan sekaligus memalukan itu terjadi pertengahan Maret lalu. Korban adalah Wakil Kepala Polwiltabes Semarang AKBP Lilik Purwanto yang tewas diberondong tembakan oleh anak buahnya sendiri, Briptu Hance Christianto yang diduga kecewa karena dimutasi ke Polres Kendal.

Enam butir peluru bersarang di tubuh Wakapolwiltabes Semarang yang atletis itu. Tiga di bagian dada dan tiga di punggung. Kejadian itu disaksikan anggota Polwan, Aiptu Titik Sumaryati, yang disandera Hance. Sedangkan pelaku yang sebelumnya diberitakan tewas ditembak anggota polisi lainnya, belakangan menurut keterangan Titik, tewas bunuh diri.

Ihwal anggota Polri menembak atasannya dan kemudian bunuh diri bukan yang pertama kali terjadi. Sebelumnya, seperti diberitakan *Media Indonesia* (15/3), pada 24 April 2005 Kasat Samapta Polres Jombang AKP Ibrahim Gani tewas ditembak Iptu Sugeng Triono yang *stess*. Sugeng kemudian menembak dirinya hingga tewas.

Penyalahgunaan senjata api oleh oknum polisi juga terjadi dalam berbagai kasus. Seperti anggota Poltabes Medan Iptu Oloan Hutasoit yang menembak mati sepasang pengantin baru, Amrul Fahmi dan Nanda Safriani, pada 24 Januari 2007. Setelah itu Oloan mengakhiri hidupnya dengan me-



Suasana evakuasi mayat Briptu Hance Christianto

foto: repro gatra

nembakkan pistol ke kepalanya. Berikutnya, pada 8 Maret 2007, anggota Polres Bangkalan Briptu Rifai Yulianus menembak mati Wiwiek (isterinya), Ny.Hasmah (ibu mertua) Satrio Wibowo (pacar gelap Wiwiek) dan Pujianto (teman Satrio). Rifai pun akhirnya tewas menembak dirinya sendiri.

Berbagai kasus penyalahgunaan senjata api yang dilakukan pengayom dan pelindung masyarakat ini sentak mengundang perhatian dan keprihatinan publik.

Ketua DPR Agung Laksono meminta Komisi III DPR memanggil Kapolri untuk minta penjelasan. Karena berbagai kasus yang terjadi itu merupakan tindakan indisipliner. "Ini menunjukkan disiplin di kepolisian lemah dan kendor. Seharusnya polisi jangan cepat terpancing dan emosi, karena mereka dibekali senjata. Jika disalahgunakan, senjata yang dipercayakan dapat membahayakan orang lain," paparnya seperti dikutip *Investor Daily* (15/3).

Anggota Komsis III Bahrudin Nasori menimpali dengan menyatakan bahwa mental anggota polisi harus dibenahi. "Kalau sama atasannya berani, bagaimana kepada rak-

yat," ujarnya.

Ketua *Indonsian Police Watch (IPW)* Neta S Pane menilai, perekrutan polisi yang lemah menyebabkan mentalitas, psikologis dan moralitas anggota polisi cenderung kurang baik. Selain itu tingginya tekanan tugas, rendahnya kesejahteraan dan tidak jelasnya motivasi mereka menjadi polisi, turut memberi andil. Hal itu pula yang menjadikan sebagian oknum polisi berorientasi pada lokasi penugasan yang dianggap basah dan strategis. "Ketika dipindah, menjadi emosional dan brutal," jelasnya seperti ditulis *Republika* (15/3).

Kejadian ini dinilai anggota Komisi Kepolisian Nasional Novel Ali, mau tidak mau, telah mencoreng citra Polri. "Kalau polisi benar-benar profesional, ini (peristiwa penembakan) tentu tidak terjadi," paparnya. Peristiwa ini, menurutnya, menyedihkan dan memalukan di saat Polisi memperbaiki kinerja. Dia sepakat sistem rekrutmen diperbaiki. Sistem pendidikan juga jangan berorientasi pada kekerasan tapi disiplin. Kekerasan akan menciptakan orang-orang yang emosional. Kasus ini harus menjadi peringatan bagi Polri untuk meningkatkan

kualitas anggotanya.

Kendati kasus ini belum bisa menggambarkan kondisi riil pemakaian senjata di lingkungan kepolisian, namun menjadi pertanda perlunya dilakukan penataan di institusi kepolisian.

Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri Brigjen Pol. Teguh Soedarsono mengakui, moral dan etika personel Polri harus dibenahi. Kasus ini menunjukkan hubungan atasan dan bawahan kurang dibina dengan baik. Dasarnya adalah derajat, kapasitas, etika dan moril manusia di dalam Polri. Kasus ini menjadi introspeksi bagaimana seharusnya atasan memperlakukan bawahan. Pemindahan tugas anak buah hendaknya mempertimbangkan kondisi pribadi dan keluarganya. "Hal inilah yang kadang tidak dipikirkan atasan," ujarnya seperti dikutip *Republika* (16/3).

Kapolri Jenderal Pol. Sutanto pun berjanji akan melakukan pembenahan ke dalam. Memperketat perekrutan anggota polisi dan memperketat psikotest untuk izin pemakaian senjata api. "Jangan sampai senjata dipakai oleh orang yang masih labil atau tidak bisa mengontrol dirinya sendiri," ujarnya kepada wartawan. ■ SP

Golput Ancaman Pilkada Gubernur DKI

Gaung Pilkada Gubernur DKI Jakarta semakin terasa. Namun berbagai persoalan muncul, semisal temuan Indonesian Youth Movement Center (IYMC), menilai *updating* data pemilih oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) tidak berjalan akurat dan profesional. Indikasi ini terlihat dari data yang diperoleh IYMC pada daerah Koja, Marunda, dan Cilincing Jakarta Utara, RT dan RW di daerah tersebut belum pernah didatangi pihak dinas kependudukan dan catatan sipil untuk diberikan *briefing* dan form pemutakhiran data pemilih. Dan mereka tidak mendata satu per satu dari KK yang ada. Sehingga per tanggal 21 Maret 2007 pihak RT belum meng-*update* data warganya, ungkap Achmat Nur Hidayat, Direktur Eksekutif IYMC.

Menurut Achmad, hal seperti ini sangat aneh, karena batas waktu pendataan pemilih yang dilakukan Dinas Dukcapil tinggal 10 hari lagi. Dari penelitian IYMC dari 31 pelaksanaan pilkada di Indonesia terdapat 69 kasus yang mencuat, yang terbesar di antaranya adalah 49,28 persen menyangkut masalah data pemilih dan 31,88 persen menyangkut masalah logistik.

“Ada contoh pilkada di Kabupaten Badung, Bali, tahun 2005. Waktu itu sekitar 40.000 penduduk yang memiliki hak pilih tidak terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT). Parahnya lagi lebih dari 20 balita justru terdaftar pada DPT. Kalau hal ini sampai terjadi pada Pilkada DKI 2007, ini bisa menimbulkan konflik,” jelas Achmad.

Sementara itu, anggota KPUD DKI Jakarta Muflizar, mengakui bahwa salah satu pemicu timbulnya konflik adalah pendataan pemilih. Oleh karena itu, sebagai antisipasi, pihaknya telah membentuk Pos Pelayanan Pemilih Pilkada (P4). “P4 ini akan dialokasikan di lima kotamadya di Jakarta sejak awal April 2007,” kata Muflizar.

Menurutnya, P4 ini bertujuan untuk menampung segala keluhan warga Jakarta yang belum terdaftar sebagai pemilih pilkada. Sehingga seluruh warga Jakarta bisa sepenuhnya menggunakan hak suaranya dengan baik. “Menurut ketentuan, pemilih adalah warga yang tercatat sebagai penduduk yang memiliki KTP atau KK. Tidak punya KTP atau KK, maka tidak dianggap sebagai penduduk, sehingga mereka tidak termasuk sebagai pemilih,” ungkap Muflizar.

Provinsi DKI Jakarta siap menyongsong Pemilihan Gubernur secara langsung yang pertama. Berbagai persoalan muncul ke permukaan, termasuk kekhawatiran adanya Golput.



Adang Daradjatun, diusung PKS.



Fauzi Bowo, diusung 15 parpol.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta, Juri Ardiantoro kepada *Berita Indonesia* menegaskan, memilih dalam pilkada merupakan hak dan bukan kewajiban. Karena itu KPUD hanya bisa menghimbau agar masyarakat menggunakan hak pilihnya dengan baik dalam pilkada yang akan digelar Agustus mendatang.

“Kalau sudah dihimbau masih golput alias tak juga mau menggunakan hak pilihnya, itu bukan urusan KPUD. Kalau urusan golput, KPUD angkat tangan,” kata Juri usai diskusi bertema Menuju Pilkada Jurdil dan Potensi Kerawanan Konflik Pilkada, di kampus Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta.

Juri berharap, pelaksanaan pilkada bisa lancar dan demokratis. Dia tak mau mengomentari soal kemungkinan calon yang akan maju hanya dua orang yakni Adang Daradjatun yang diusung PKS dan Fauzi Bowo yang disokong koalisi 15 parpol. “Saya tak berwenang mengomentari jumlah calon, sedikit atau banyak jumlah cagub, kita tetap dorong masyarakat untuk menggunakan hak pilih”.

Dua Calon Gubernur?

Pilkada DKI akan digelar Agustus 2007. Dua calon kuat gubernur dimunculkan oleh parpol secara resmi, yakni Adang Daradjatun dan Fauzi Bowo. Adang diusung oleh PKS yang memiliki hak mengajukan kursi di DPRD DKI (24 persen suara). Fauzi Bowo alias Foke diusung oleh koalisi 15 parpol termasuk dua parpol yang memiliki hak mengajukan calon, yakni Partai Demokrat dan PDI Perjuangan. Tinggal dua parpol besar yang belum menetapkan calon secara resmi yakni PAN dan PKB. Tapi PAN dengan 6 kursi dan PKB dengan 4 kursi di DPRD DKI masih membutuhkan satu kursi lagi untuk bisa mengajukan calon.

Peluang Fauzi Bowo untuk menjadi gubernur DKI Jakarta periode 2007-2012 semakin terbuka, setelah disepakati para pimpinan parpol dalam Deklarasi Bersama di Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan pada 15 Maret 2007 lalu. Namun kepastiannya menunggu hasil pilkada nanti, karena warga Jakarta akan memilih secara langsung siapa yang menjadi pemimpin di ibu kota negara ini. ■ RI, SP

Seperi tidak mau kalah dengan Tukul Arwana yang menggunakan laptop dalam acara “Empat Mata” di *Trans 7*, anggota DPR dan DPD sekarang agaknya tidak ingin gagap teknologi komputer. Dalam waktu dekat, setiap anggota dewan akan mendapat fasilitas laptop atau komputer jinjing yang bisa dibawa ke mana-mana seperti yang mereka minta.

Tak pelak, kocek uang negara yang sudah menipis terpaksa harus dirogoh lebih dalam lagi. Seperti diungkapkan Sekjen DPR Faisal Djamil kepada wartawan, untuk pengadaan 550 laptop bagi seluruh anggota DPR dibutuhkan dana sekitar Rp 12,1 miliar dengan asumsi harga per unit Rp 21 juta. Sedangkan untuk 128 anggota DPD, menurut Sekjen DPD Siti Nurbaya Bakar, perlu dana Rp 2,5 miliar dengan perkiraan harga per laptop Rp 19,5 juta.

Ihwal penyediaan laptop untuk anggota DPR ini, menurut Faisal, atas permintaan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR. Wakil Ketua BURT Diah Devawati menyatakan, tidak sulit bagi anggota DPR yang belum mahir menggunakan komputer untuk menggunakan laptop tersebut jika mempunyai keinginan untuk belajar. “Sekarang ini kalau tidak bisa menggunakan komputer dan tidak bisa bahasa Inggris sama dengan buta aksara,” ujarnya seperti dikutip



Setelah Laptop Apa Lagi?

Ada-ada saja tingkah wakil rakyat di DPR dan DPD. Kendati sudah memperoleh berbagai tunjangan dan fasilitas, mereka masih menuntut disediakan laptop untuk setiap anggota dewan. Setelah itu apa lagi yang mereka minta?

harian *Sinar Harapan* (22/3).
Pengadaan laptop bagi anggota DPR dan DPD ini ditang-

gapi Koordinator *Indonesian Corruption Wacht (ICW)* Teten Masduki dan pakar tele-

matika Roy Suryo sebagai pemborosan uang negara yang juga uang rakyat. Teten menganggap pembelian laptop itu tidak perlu difasilitasi. Apalagi pendapatan anggota dewan yang terhormat itu sudah lebih dari cukup untuk membeli laptop dari kantong sendiri. “Seharusnya anggota DPR dan DPD sensitif. Pembelian semacam itu tidak perlu dan memalukan karena semua harus ditanggung negara,” ujarnya seperti dikutip *IndoPos* (23/3).

Roy Suryo seperti diberitakan *Media Indonesia* (23/3) bahkan menilai pembelian itu terkesan mengada-ada dan menunjukkan ‘kreativitas’ BURT DPR dalam menghambur-hamburkan dana.

Sedangkan Ketua MPR Hidayat Nurwahid berpendapat pengadaan laptop itu bukan merupakan kebutuhan primer bagi anggota DPR. Menurutnya, tidak semua anggota dewan mahir menggunakan komputer. Apalagi memakai laptop membutuhkan keahlian lebih. “Kalau anggota DPR nya tidak terlalu paham menggunakannya malah bukan membantu tetapi menyulitkan dalam pelaksanaan tugas,” ujarnya.

Beberapa warga masyarakat yang diminta tanggapannya soal ini juga hanya bisa geleng-geleng kepala. Bahkan ada yang bertanya: “Setelah laptop apa lagi yang diminta? ■ SP

PP37/2006 Berubah Jadi PP 21/2007

Setelah melalui pembahasan yang cukup panjang, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya menandatangani Peraturan Pemerintah No. 21/2007 sebagai revisi PP No.37 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. PP yang sempat mengundang kontroversi di masyarakat.

PP 21/2007 mulai berlaku saat ditandatanganinya, yakni pada 16 Maret 2007. Ini merupakan perubahan ketiga atas PP No.24/2004 yang diubah melalui PP No.37/2006.

“PP tersebut berlaku efektif sejak 16 Maret lalu. Dan pembayaran tunjangan komunikasi intensif (TKI) terhitung 1 Januari 2007,” ujar Mensesneg Yusril Ihza Mahendra ketika menjelaskan PP No.21/2007 tersebut, Selasa (20/3) lalu.

Dalam PP ini diatur pemberian TKI bagi pimpinan dan anggota DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah (KKD) yang terbagi dalam tiga kategori, yakni tinggi, sedang dan rendah. Bagi KKD tinggi, TKI diberikan paling banyak tiga kali uang representasi Ketua DPRD, kategori KKD sedang paling banyak dua kali dan kategori KKD rendah paling banyak satu kali uang representasi Ketua DPRD.

PP itu juga mengatur belanja penunjang operasional (BPO) pimpinan dewan. Untuk KKD tinggi, paling banyak enam kali uang representasi Ketua DPRD ditambah empat kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD. “BPO ini tidak diberikan kepada masing-masing individu, tapi tergantung pada kegiatan anggota DPRD yang

bersangkutan dan ada aturan khusus,” jelas Yusril.

Untuk KKD sedang paling banyak empat kali uang representasi Ketua DPRD ditambah dua setengah kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD. Sedang untuk KKD rendah paling banyak dua kali uang representasi Ketua DPRD ditambah satu setengah kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.

BPO pimpinan DPRD ini disediakan terhitung 1 April 2007. Sedangkan aturan tentang pengelolaan KKD akan ditetapkan dalam Peraturan Mendagri.

Menyangkut dana rapel yang telah diterima anggota DPRD, bisa dikembalikan secara tunai atau dicicil lunas sebulan sebelum berakhirnya masa jabatan periode 2004-2009. ■ SP

APSPI Jawa Barat Dilantik

Al-Zaytun Gerakkan Peternakan Sapi Perah

Kampus Al-Zaytun sebagai pusat pendidikan terpadu yang menjadikan pendidikan sebagai gula dan ekonomi sebagai semut, semakin *concern* menggerakkan peternakan sapi perah. Hal ini dibuktikan dengan kesediaan Syaykh Al-Zaytun AS Panji Gumilang menjadi Ketua Umum Asosiasi Peternak Sapi Perah Indonesia (APSPI) Daerah Jawa Barat.

Impian pendidikan terpadu mengilhami para eksponen Yayasan Pesantren Indonesia (YPI), selaku pengelola Kampus Al-Zaytun untuk mempersiapkan segala sarana dan prasarana di bidang pendidikan sekaligus pula di bidang ekonominya.

Kampus Al-Zaytun memang didesain sebagai pusat pendidikan sekaligus pusat ekonomi pertanian rakyat.

Sebagai pusat ekonomi pertanian dalam arti luas, Kampus Al-Zaytun mempersiapkan lahan seluas 1.200 hektar untuk menjalankan konsep *integrated farming*.

Pembangunan Proyek Waduk Windu Kencana, yang mampu menampung air di musim hujan sehingga tak perlu terjadi banjir,

tetapi sekaligus mampu pula menyediakan air persawahan di saat musim kemarau, merupakan salah satu wujud dari tekad besar Al-Zaytun menuju *integrated farming*.

Kampus Al-Zaytun memulakan operasional pendidikan pada tanggal 1 Juli 1999, dan tak lama berselang tepat pada tanggal 27 Agustus 1999 diresmikan oleh Presiden Prof Baharuddin Jusuf Habibie.

Ketika diresmikan jumlah peserta didik baru sebanyak 1.456 pelajar ditambah tenaga didik 135 orang.

Memasuki sewindu usianya, Al-Zaytun sudah dihuni oleh siswa, mahasiswa, guru, dan karyawan sebanyak 13.579 orang yang tinggal menetap dalam Kampus. Jumlah ini masih di luar mahasiswa Universitas Terbuka (UT) sebanyak 5.203 orang,



Syaykh DR. AS Panji Gumilang saat pelantikan Per

yang tinggal di luar tetapi datang ke kampus pada saat pelaksanaan tutorial khusus dan ujian semester.

Dengan sejumlah kebesaran yang dimiliki tak mengherankan apabila Al-Zaytun sebagai pusat pendidikan terpadu, dinilai dan diapresiasi oleh Dirjen Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Depdiknas Ace Suryadi sudah berkelas internasional.

Melantik APSPI Jawa Barat

Pembangunan sebuah kawasan peternakan sapi adalah salah satu bagian integral dari konsep *integrated farming* yang turut dikembangkan Kampus Al-Zaytun sedari awalnya.

Hal itu dimaksudkan pula untuk memenuhi konsumsi daging, di mana Kampus Al-Zaytun rata-rata membutuhkan seekor sapi setiap hari.

Pengembangan peternakan sapi Al-Zaytun memanfaatkan teknologi termutakhir. Al-Zaytun tak henti-hentinya melakukan penelitian dan pengembangan di bidang peternakan sapi untuk mendapatkan mutu sapi yang terbaik.

Pelaksanaan inseminasi buatan (IB)



foto: berindo wilson

ngurus Daerah APSPI Jawa Barat.

misalnya, merupakan sistem perkawinan yang sudah sangat mudah dan murah diterapkan di Al-Zaytun, untuk menghemat biaya pemeliharaan sapi pejantan (Pemacek) dan dapat menghindari penurunan mutu genetik serta penularan penyakit kelamin.

Teknologi peternakan sapi yang paling banyak dikembangkan oleh Al-Zaytun adalah transfer embrio (TE). Sebab, teknologi ini sangat efektif untuk mempercepat populasi sapi perah berkualitas tinggi, dan perbaikan *performa* ternak (deploid). Dengan transfer embrio dari seekor induk yang mempunyai mutu genetik tinggi, akan dapat diperoleh 15-20 ekor pedet atau anak sapi dalam setahun.

Dengan transfer embrio, dalam waktu lima tahun jumlah anak keturunan dan jumlah produksi susu akan meningkat empat kali lebih tinggi dibanding inseminasi buatan.

Saat ini Al-Zaytun baru memiliki seribu ekor lebih sapi, ditanamkan sebagai sapi potong dan sapi perah.

Kepedulian Al-Zaytun mengembangkan peternakan sapi dengan memanfaatkan teknologi paling

mutakhir, memperoleh apresiasi yang tinggi pula dari berbagai kalangan.

Terbuktilah saat berlangsung deklarasi pendirian Asosiasi Peternak Sapi Perah Indonesia (ASPI), di Kota Solo, Surakarta, Jawa Tengah, Senin 26 Februari 2007.

Di situ, Syaykh Al-Zaytun AS Panji Gumilang didaulat (diminta kesediaannya) untuk memimpin sebagai Ketua Pengurus Daerah (Pengda) APSPI Provinsi Jawa Barat.

Sebelumnya di tingkat pusat sudah terpilih sebagai Ketua Umum PP APSPI Haji Masngut Imam Santoso, seorang peternak sapi perah asal Blitar, Jawa Timur.

Untuk menjalankan roda organisasi, pada hari Minggu 25 Maret 2007 Ketua Umum APSPI Masngut Imam Santoso melantik pengurus lengkap APSPI Jawa Barat. Di sini Syaykh menghimpun seluruh kekuatan peternak dari berbagai daerah Jawa Barat, khususnya Indramayu. (*Lihat Struktur Pengurus APSPI Daerah Jawa Barat*).

Pelantikan pengurus selain dimaksudkan sebagai konsolidasi organisasi, juga untuk menajamkan visi

untuk maju ke arah peningkatan populasi ternak di seluruh wilayah Jawa Barat.

APSPI, menurut Syaykh Panji Gumilang akan menghimpun seluruh peternak, demikian pula gabungan-gabungan peternak yang sudah lebih dahulu ada di Jawa Barat untuk dapat bekerjasama.

“Untuk itu mari kita tingkatkan populasi ternak dan jumlah peternak ASPI Jawa Barat ini. Kalau itu menjadi program, saya rasa itu program yang *mahmud* (terpuji),” Syaykh mengajak segenap jajaran pengurus yang baru dilantik.

Menurut Syaykh, program APSPI Jawa Barat selanjutnya adalah peningkatan kualitas ternak dan produksi.

“Kita, bila beternak dengan kualitas ternak yang tidak memadai hanya akan menghabiskan dana untuk sesuatu yang tidak perlu. Maka kualitas sangat diperlukan. Di sinilah letak organisasi kita untuk bergerak dan masuk ke dalam peningkatan kualitas ternak dan produksi. Kita punya ternak, kita punya produksi, kita masuk lagi



foto: berindo wilson

Ketua Umum APSPI dan Syaykh Al-Zaytun foto bersama Pengurus Daerah APSPI Jawa Barat.

Sekali kita masuk ke Asosiasi Peternak Sapi Perah Indonesia (APSPI), maka kita harus menganjurkan apa yang dinamakan *commercial oriented*.

menciptakan pasar. Setelah tercipta pasar kita menciptakan lagi kecenderungannya, yaitu kecenderungan pasar terhadap produk peternak APSPI itu,” ucap Syaykh.

“Sekali kita masuk ke Asosiasi Peternak Sapi Perah Indonesia (APSPI), maka kita harus menganjurkan apa yang dinamakan *commercial oriented*. Sehingga, apa yang dilakukan oleh peternak-peternak di bawah naungan APSPI, mempunyai *margin* (keuntungan) yang *more* (lebih), yang banyak menguntungkan. Maka 3M harus dilakukan, yaitu *more market*, *more market share*, serta *more margin*,” katanya.

Menurut Syaykh, kesejahteraan peternak sapi perah yang tergabung dalam APSPI hanya dapat diraih apabila ternaknya bagus, produksinya bagus, kualitasnya bagus, dan marginnya sudah banyak.

Dikatakan kesejahteraan peternak tidak tergantung kepada kebijakan pemerintah saja. “Kalau kita masih menggantungkan diri kepada pemerintah saja, maka asosiasi ini tidak punya makna apa-apa. Maka kita harus membangkitkan peternak itu sendiri, supaya mengerti bahwa beternak adalah menguntungkan,” kata Syaykh. “Mau

memberikan kredit, kita terima. Tidak memberi, kita minta,” tambahnya.

“Kita jangan berharap. Kalau berharap, bisa kecewa. Kalau sudah kecewa, banyak perbuatan yang irasional yang akan tumbuh karena kekecewaan itu. Maka jangan pernah kecewa terhadap siapapun termasuk kepada pemerintah. Jangan kecewa sebab kalau kecewa bendera kita akan robek,” pesan Syaykh.

Syaykh menyebutkan kesejahteraan anggota adalah ujung perjuangan asosiasi dan yang memperjuangkannya adalah anggotanya sendiri, bukan oleh orang lain. Sebab tatkala kesejahteraan itu diperjuangkan oleh orang lain, maka segenap anggota menjadi orang yang ditentukan, bukan lagi yang menentukan. Di sini kemandirian organisasi memiliki makna yang sangat terhormat.

“Mandiri bukan berarti independen *an sich*, karena di dunia ini tidak ada yang mampu independen. Kita, yang dituntut adalah interdependen, yang saling bergantung kepada kehidupan yang ada ini. Kepada pemerintah jangan terlalu menggantungkan diri sehingga dependen, tapi juga jangan tidak perlu sebab itu juga tidak bagus. Tapi interdependen, kita memerlukan dan diperlukan,” kata Syaykh.

Ada tiga syarat kesanggupan yang dimintakan Syaykh kepada seluruh anggota pengurus yang dilantik Ketua Umum PP APSPI Haji Masngut Imam Santoso dan disaksikan para pakar peternakan yang turut diundang hadir antara lain Ir Don P Utoyo, Prof Dr Pallawaruka, Guru Besar IPB, dan Dr Chalid Talib, Kepala Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian Puslitbang Peternakan, Deptan.

Yaitu, *pertama*, sanggup untuk duduk sebagai pengurus APSPI Jawa Barat; *kedua*, sanggup untuk mendahulukan kepentingan peternak yakni kesejahteraan peternak dari yang lain-lainnya; dan *ketiga*, dalam mengemban tugas nantinya, tatkala keadaan pasang surut sanggup untuk tidak bertindak korupsi. Dengan suara serentak seluruh pengurus lantas menjawab “Sanggup”.

Selain itu, untuk menjalankan roda organisasi yang mandiri Syaykh memintakan pula kesanggupan para anggota untuk memodali organisasi.

Sejumlah nama yang ditanyakan kesanggupannya berkenan menyumbangkan, mulai setara 100 liter susu hingga seribu liter. Bahkan Ketua Umum APSPI, Haji Masngut Imam Santoso turut berkenan memberikan sumbangan modal sebesar Rp 10 juta. ■
CRS, HT, AM

Cikal Bakal APSPPI

Dari Jawa Timur Mengangkat Harkat Peternak Sapi Perah



foto: berindo willson

Ketua Umum PP APSPPI H. Masngut Imam Santoso.

Pemerintah Indonesia mencanangkan dua program brilian sekaligus: Program Indonesia Swasembada Daging dan Program Indonesia Kolam Susu.

Yang pertama terkait isu penyediaan sapi potong, ditargetkan Indonesia dapat memenuhi sendiri kebutuhan daging. Program itu berangkat dari kondisi kekinian, di mana setiap tahun Indonesia masih melakukan impor sapi potong 400 ribu ekor per tahun dari luar khususnya Australia.

Program kedua "Indonesia Kolam Susu" terkait dengan isu pembibitan sapi perah untuk menyediakan bahan baku susu yang mencukupi dan berkualitas untuk Industri Pengolah Susu (IPS).

Potret kekinian industri sapi perah rakyat rupanya masihlah sebuah ironi

besar. Para peternak yang memiliki sapi perah dalam jumlah relatif kecil, itu harus berhadap-hadapan dengan IPS yang memiliki posisi tawar tinggi. Rata-rata peternak sapi perah hidup masih dalam kondisi memprihatinkan, hingga tak berdaya berhadapan dengan IPS.

Fakta di tahun 2005 lalu menunjukkan, hanya 550 ribu ton susu sapi segar atau 30 persen saja kebutuhan bahan baku IPS yang bisa dipasok oleh industri sapi perah rakyat, dari total kebutuhan dalam negeri yang mencapai 1,850 juta ton (tahun 2007 diperkirakan sudah melebihi dua juta ton).

Berarti, sebanyak 1,300 juta ton kebutuhan bahan baku susu segar masih harus diimpor.

Kendati pasokan susu segar dalam negeri itu sedikit saja, harganya di tingkat peternak ternyata merupakan yang termurah di dunia, hanya Rp 2.200/liter. Bila dibandingkan dengan harga pasaran di luar negeri, susu segar sejenis di Amerika Serikat sudah mencapai 34 sen dollar AS atau setara Rp 3.400/liter, dan yang termurah di Selandia Baru 28 sen dollar AS per liter.

Tetapi, giliran susu segar sudah berupa produk jadi, rakyat sebagai konsumen harus bersedia membelinya dengan harga yang tertinggi di dunia.

Terbuktilah, Indonesia merupakan sebuah negara dengan tingkat konsumsi gizi terendah kedua di Asia, yang hanya mengonsumsi gizi 5,2 gram per kapita/hari.

Padahal, kata Don P Utoyo seorang konsultan peternakan, sesuai Standar Gizi Nasional 2002, tingkat konsumsi gizi nasional dalam tempo lima tahun ke depannya (dimulai sejak 2002) ditetapkan harus sudah mencapai minimal 6,5 gram/kapita/hari.

Tetapi pada tahun 2006 Don mengatakan realisasi tingkat konsumsi gizi, termasuk di dalamnya gizi asal protein hewani seperti daging, telur dan susu masih 5,2 gram per kapita/hari, atau nomor dua terbawah di Asia.

Don yang mantan direktur pembibitan pada Ditjen Peternakan Departemen Pertanian mengatakan, apabila peranan susu dalam memasok konsumsi gizi mencapai 0,75 gram per kapita/hari, kontribusi susu sapi asal dalam negeri di situ hanyalah 0,225 gram per kapita/hari.

Tidak mengherankan pulalah apabila tingkat kekebalan tubuh warga semakin hari semakin menurun saja, yang lalu berdampak pada semakin mudahnya berbagai jenis penyakit disebarkan oleh virus yang menjangkiti warga.

Bahkan yang lebih fatal lagi, kekurangan makanan bergizi berupa protein hewani asal ternak seperti daging dan susu, telah membatasi pula kemampuan otak manusia untuk berpikir dan bekerja lama.



Don P. Utoyo.

foto: berindo wilson

Adalah seorang peternak sapi perah asal Blitar, Haji Masngut Imam Santoso yang pada bulan April tahun 2004 lalu mengambil prakarsa mengumpulkan para peternak sapi perah se-Jawa Timur ke dalam sebuah organisasi.

Don, yang berbicara dalam "Sarasehan Sapi Perah" di Kampus Al-Zaytun, Indramayu, dengan makalahnya yang diberi judul "Tantangan Bermimpi Revolusi Putih di Indonesia", membuat pendekatan produk untuk menggambarkan harapan di tahun 2010 saat sudah dicapai "Indonesia Kolam Susu".

Disimulasikannya, pada tahun 2010 populasi penduduk Indonesia diperkirakan sudah mencapai 240 juta orang, dengan asumsi laju pertumbuhan penduduk 1,5% per tahun.

Dengan laju pertumbuhan sapi perah 10% per tahun akan diperoleh produksi susu 750.000-800.000 ton per tahun. Tingkat produksi susu dalam negeri sebesar itu masih kalah jauh dengan total konsumsi susu, yang tahun 2010 akan mencapai 2.400.000 ton per tahun.

Karena itu, untuk mencapai "Indonesia Kolam Susu" harus diproduksi bibit sapi perah sebanyak 100 ribu ekor, sehingga diperoleh angka ideal populasi susu sapi perah sebanyak 500.000-600.000. Saat itu tingkat konsumsi susu akan mencapai 12,5 kg/tahun, atau setara konsumsi gizi 1,0 gram per kapita/tahun.

Dari sumbangan susu sebesar 1,0 gram per kapita/tahun terhadap konsumsi gizi per kapita/tahun tersebut, kata Don berbicara usai pelantikan Pengurus Daerah Asosiasi Peternak Sapi Perah Indonesia (APSPI) tingkat Jawa Barat, yang diketuai oleh Syaykh Al-Zaytun AS Panji Gumilang, total protein hewani jadinya akan lebih dari 6,5 gram per kapita/hari.

Berdayakan Peternak Sapi Perah

Posisi tawar peternak sapi perah rakyat di Tanah Air begitu lemah saat berhadapan dengan bernegosiasi dengan industri pengolahan susu (IPS). Bahkan, kesejahteraan para peternak

sapi perah sesungguhnya sangat memprihatinkan sekali.

Keprihatian hidup itu berakibat pula pada populasi sapi perah yang semakin menurun. Standar kualitas susu segar yang dihasilkan turut pula menurun sehingga kalah bersaing dengan bahan baku susu impor.

Belum lagi soal produktivitas dari sebelumnya bisa diperoleh 10-15 liter susu/hari/ekor, turun menjadi hanya delapan liter per hari.

Banyak pula sapi perah yang terpaksa dialihkan menjadi sapi potong.

Don P Utoyo saat masih menjabat sebagai birokrat pernah mengampanyekan peningkatan populasi sapi perah. Dimulai dari angka populasi 300 ribu ekor sapi, setahun kemudian bergerak naik menjadi 320 ribu ekor, lalu 330 ribu ekor, hingga di tahun 2005 diperoleh angka sudah mencapai 350 ribu ekor sapi.

Tetapi setelah Don pensiun tiga tahun lalu, dalam usia 60 tahun, ia melihat di tahun 2007 populasi sapi perah itu sudah menurun kembali ke angka 330 ribu ekor.

Adalah seorang peternak sapi perah asal Blitar, Haji Masngut Imam Santoso yang pada bulan April tahun 2004 lalu mengambil prakarsa mengumpulkan para peternak sapi perah se-Jawa Timur ke dalam sebuah organisasi.

Saat itu Jawa Timur merupakan salah satu sentra produsen susu sapi segar terbesar di tanah air, yang memiliki populasi sapi perah sebanyak 137 ribu ekor terdiri dari anak sapi (pedet) dan sapi remaja (dara) yang belum produktif, serta 60 ribu sapi indukan yang sudah produktif.

Perputaran roda ekonomi susu sapi perah Jawa Timur saat itu sudah mampu menghidupi 29.800 peternak, belum termasuk para anggota keluarga dan para pelaku bisnis penunjangnya.

Sejak Masngut mendirikan perkumpulan, rata-rata peternak sapi perah Jawa Timur mulai menyandarkan masa depannya pada asosiasi. Kecuali mereka yang masih terikat kontrak dengan koperasi susu, yang masih harus menyelesaikan perjanjian kontraknya hingga berakhir.

Peternak di sana sempat menghadapi kemelut besar tatkala sebuah pabrik susu terbesar di Surabaya memutuskan untuk tak lagi membeli susu sapi segar langsung dari peternak, kecuali lewat koperasi sekunder.

Sejak saat itu peternak tak lagi bisa bersikap independen berhadapan dengan pembeli yang monopolistik. Sebab koperasi pengumpul nyatanya lebih berperan sebagai penguasa pasar, yang membentuk pasar susu sapi segar

secara monopolistik dan monopsoni.

Saat itu IPS bersama koperasi menerapkan sistem kuota dalam pembelian susu dari peternak. Padahal sebelumnya, selama 29 tahun bermitra, antara peternak dengan IPS selalu bergandengan mesra.

Ada banyak kenikmatan yang lalu dapat dirasakan oleh para peternak yang bergabung dalam organisasi bentukan Masngut Imam Santoso. Seperti, kenaikan harga susu sapi segar, hingga perluasan pangsa pasar yang mampu menjangkau sampai ke Jakarta.

Kenikmatan itu pula yang memotivasi Masngut, seorang peternak otodidak yang belajar sendiri dengan prinsip *trial-error* untuk memperluas cakupan organisasinya. Ia kemudian mendeklarasikan berdirinya sebuah organisasi yang bertaraf nasional, diberi nama Asosiasi Peternak Sapi Perah Indonesia (APSPI) atau Indonesia Dairy Farmer Association (ADFA).

APSPI resmi dibentuk di Solo Jawa Tengah pada tanggal 26 Februari 2007, dipimpin oleh H. Masngut Imam Santoso sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) APSPI, dan Suharto sebagai Sekretaris Jenderal.

Turut pula dipilih Ketua Pengurus Daerah di sejumlah provinsi seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Syaykh Al-Zaytun AS Panji Gumilang sendiri terpilih sebagai Ketua Pengurus Daerah APSPI Jawa Barat.

Kata Masngut, asosiasi APSPI diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup dan memperjuangkan aspirasi para peternak sapi perah di Tanah Air, yang hingga kini masih belum mendapat perhatian pemerintah.

“Kehadiran APSPI ini juga diharapkan bisa menjembatani hubungan antara peternak dan semua pihak, baik koperasi, industri pengolah susu (IPS) maupun pemerintah,” urai Masngut.

Sjamsul Bahri, Direktur Perbibitan pada Ditjen Peternakan, Departemen Pertanian, turut hadir mewakili pemerintah pada saat deklarasi. Ia pun menyambut positif kehadiran APSPI. Sjamsul menilai kehadiran asosiasi APSPI sangat penting karena selama ini belum pernah ada organisasi peternak sapi perah.

Sjamsul Bahri juga berharap APSPI mampu menjembatani hubungan peternak dengan kalangan industri, serta mendorong peningkatan produksi susu nasional.

“Produksi susu nasional masih sangat rendah. Kebutuhan susu nasional yang bisa dipenuhi peternak sapi perah dalam negeri hanya sekitar 30 persen, sedangkan 70 persennya dari impor,” ujar Sjamsul. ■ CRS, HT, AM

Struktur Pengurus APSPI Daerah Jawa Barat

Jabatan	Nama	Daerah Asal
Ketua Umum	Syaykh AS Panji Gumilang	Indramayu
Ketua	H. Imam Supriyanto	Indramayu
Ketua	Dede Rahmad	Parompong, Bandung
Ketua	Efi Luthfillah	Bogor
Ketua	Ahmad Mufakir	Indramayu
Ketua	drh. Indah Fadillah	Indramayu
Sekretaris Umum	Nawawi	Indramayu
Wa. Sek. Umum	Nur Kholish	Indramayu
Bendahara	Iskandar Saefulloh	Indramayu
Wakil Bendahara	Hilman Suaidy	Indramayu
Litbang	dr. Dani Kadarisman	Indramayu
Litbang	Dr. Bagus P. Purwanto	Bogor
Litbang	dr. Andi Murfi	Bogor
Libang	dr. Afton Atabany	Bogor
Bidang Kesejahteraan Peternak		
Ketua Bidang	H. Imam Supriyanto	Indramayu
Wakil Ketua	Ir. Asrur Rifa, MT	Indramayu
Sekretaris	Jajang	Pengalengan, Bandung
Anggota	Wayhudin	Bandung
Anggota	H. Teddy	Sukabumi
Bidang Distribusi Produksi		
Ketua Bidang	Dede Rahmat	Parompong, Bandung
Wakil Ketua	Nurdin Abu Tsabit	Indramayu
Sekretaris	Ir. Susilo Budi	Sukabumi
Anggota	Juju Junaedi	Ujung Berung, Bandung
Anggota	Ratna	Sukabumi
Anggota	Mahfudin	Bogor
Bidang Pakan dan Sarana		
Ketua Bidang	M. Natsir Suaidy	Indramayu
Wakil Ketua	Ir. Tantan Setiasamsi	Bogor
Sekretaris	Riki Honang	Bandung
Anggota	Priatmana Muhendi	Sukabumi
Anggota	Cucu Wahyudin	Bandung Barat
Anggota	Uus	Cideng, Bandung
Bidang Pengendalian Kualitas Produksi		
Ketua Bidang	Efi Luthfillah	Bogor
Wakil Ketua	Irwanto	Ciawi
Sekretaris	Dian Hardiyanto	Pengalengan, Bandung
Anggota	Enceng Rohana	Ujung Berung, Bandung
Anggota	H. Endang	Cianjur
Bidang Pemuliaan dan Pemeliharaan Ternak		
Ketua Bidang	Ahmad Mufakir	Indramayu
Wakil Ketua	drh. Nur Uningsih	Indramayu
Sekretaris	Kutut L. Pujadi	Indramayu
Anggota	Hendra	Cibiru, Bandung
Anggota	Ishak	Garut
Bidang Kesehatan dan Reproduksi		
Ketua Bidang	drh. Indah Fadillah	Indramayu
Wakil Ketua	Dadang	Pengalengan
Sekretaris	Evia Kirana	Indramayu
Anggota	Supriyatna	Bandung Barat
Anggota	Slamet Sutrisno	Lembang
Anggota	Okky	Cimahi Bandung

Sisihkan APBN/D 1-2%

Skema Investasi “Indonesia K

Ketua Umum Asosiasi Peternak Sapi Perah Indonesia (APSPI), Haji Masngut Imam Santoso menyatakan para peternak sapi perah di seluruh Indonesia sangat ingin berpartisipasi dalam pembangunan bangsa Indonesia.

“**S**uatu saat nanti kita harus bisa menjadi tuan di negeri sendiri,” kata Masngut, seorang peternak sapi yang belajar secara otodidak, asal Blitar, Jawa Timur. Masngut sangat ingin sekali bisa mengangkat harkat susu sapi segar Indonesia bersaing di tingkat internasional.

Masngut Imam Santoso memiliki kehendak luhur untuk merealisasikan perbaikan tingkat konsumsi susu segar per kapita per tahun. Ia menyebut hal itu bukan pekerjaan mudah. Sebab hingga hari ini Indonesia masih merupakan *net importer* susu. Impor bahan baku susu masih lebih besar dari ekspor produk susu.

Tetapi, bagaimanapun, upaya untuk mencapainya harus dimulai dari sekarang dengan cara paling mendasar, yaitu meningkatkan populasi sapi perah, melakukan perbibitan sendiri, serta meningkatkan produktivitas ternak melalui perbaikan manajemen pengelolaan dan seleksi bibit yang baik.

Peternakan sapi perah nasional harus dibangun secara sistematis dan berkelanjutan demi mencukupi kebutuhan susu dalam negeri yang terus meningkat.

Kata Masngut, wacana yang pernah dilontarkan oleh Menteri Pertanian untuk mewujudkan Indonesia sebagai kolam susu, menjadi detak jantung semangat optimisme APSPI untuk membangkitkan peternakan sapi perah nasional. Melalui Dirjen Peternakan, penancangan swasembada daging, yang lalu diubah menjadi program kecukupan daging tahun 2010, kata Masngut perlu pula direspon positif oleh semua pemangku kepentingan peternakan sapi.

Demi mewujudkan Indonesia sebagai kolam susu dan kecukupan

daging, Masngut meminta supaya disepakati bersama jangan dilakukan dengan mengandalkan impor bakalan ataupun impor daging.

Sebab, hal itu tak memberikan nilai tambah pada peternakan sapi dalam negeri. Malahan bisa membunuhnya.

Strategi Pengembangan

“Yang pasti kita harus memulai dari perbibitan dulu, baru produksi kemudian,” ujar pendiri Santoso Farm, yang terletak di Blitar, Jawa Timur, ini.

Masngut mengatakan peternakan mempunyai andil yang cukup besar dalam pembangunan bangsa sebagai Penggerak perekonomian pedesaan; Penyerap tenaga kerja; Penghasil devisa negara; Menyejahterakan dan mencerdaskan anak bangsa.

“Kami dari Asosiasi Peternak Sapi Perah Indonesia (APSPI) tentu ingin berpartisipasi dalam pembangunan bangsa Indonesia. Di suatu saat nanti kita harus bisa menjadi tuan rumah di dalam negeri sendiri,” kata Masngut, yang berbicara usai menyaksikan pelantikan pengurus lengkap APSPI Provinsi Jawa Barat. Kepengurusan yang baru terbentuk ini dipimpin oleh Syaykh AS Panji Gumilang sebagai Ketua Umum.

Masngut mengatakan hampir 90 persen peternakan sapi perah dimiliki oleh peternakan rakyat. Sisanya, hanya 10 persen yang diusahakan oleh peternakan berbadan usaha perusahaan terbatas.

Peternakan sapi rakyat dikelola secara tradisional. Rata-rata kepemilikan mereka hanya 3-5 ekor per peternak, dengan rata-rata tingkat produksi susu segar 5-10 liter per ekor/hari. Tak heran apabila produksi susu segar dalam negeri hanya mampu memasok 30 persen dari kebutuhan industri pengolah susu (IPS). Sisa terbesarnya 70 persen diimpor dari berbagai negara.



Menuju “Indonesia Kolam Susu”.

Berdasarkan peta itu Masngut menyebutkan masih tersedia kesempatan yang luar biasa besar bagi peternak sapi perah dalam negeri untuk menambah pasokan ke IPS. Belum lagi bila ingin mewujudkan peningkatan tingkat konsumsi susu menjadi 7,2 kilogram per tahun per kapita.

“Para peternak sapi perah berharap di suatu hari nanti produksi susu dalam negeri bisa memenuhi kebutuhan bahan baku susu segar IPS sebesar 50 persen, atau bahkan 100 persen,” kata Masngut optimis.

Masngut menyebut sejumlah hal penting yang harus dilakukan peternak bila ingin maju. Yaitu, perbaikan manajemen untuk mendukung optimalnya produksi ternak; Meningkatkan populasi sapi perah dalam negeri dengan memulai dari usaha pembibitan sendiri; Memiliki standarisasi harga susu yang layak diterima peternak; Dan ada pengawasan kualitas konsentrat sapi perah yang beredar di pasaran.

Selama ini peningkatan populasi dengan melakukan perbibitan menghadapi kendala biaya produksinya yang mahal, serta nilai investasinya tinggi tetapi keuntungan yang dihasilkannya sangat sedikit.

Masngut menawarkan solusi, pemerintah harus segera mengeluarkan paket tersendiri untuk

kolam Susu”



foto: dok

merangsang pihak swasta terjun ke bisnis pembibitan sapi perah.

Peternak tradisional, secara tidak langsung sesungguhnya sudah melakukan pembibitan namun belum terarah dan terprogram secara baik.

“Kami dari Asosiasi Peternak Sapi Perah Seluruh Indonesia yakin seayakin-ayakannya, peternak sekaligus menjadi pembibit bila didukung dengan permodalan maka program peningkatan populasi akan tercapai,” kata Masngut.

Masngut mempunyai skema menjadikan “Indonesia Kolam Susu”. Yaitu, setiap pemerintah daerah yang wilayahnya potensial untuk pengembangan sapi perah (hingga pemerintah pusat), itu berkenan menyisihkan 1-2 persen dari APBD (APBN)-nya untuk diinvestasikan di pembibitan sapi perah. Apabila sebuah daerah mempunyai APBD Rp 800 miliar, disisihkan 1,5 persen atau Rp 12 miliar saja untuk investasi pembibitan sapi perah, maka daerah itu akan bisa membeli sebanyak 1.000 ekor sapi induk senilai Rp 10 miliar (harga rata-rata sapi induk Rp 10 juta/ekor), dan Rp 2 juta untuk program riring. Apabila rata-rata harga pedet (anak sapi) Rp 1,5 juta maka akan dapat digunakan untuk membeli pedet sebanyak 1.333 ekor.

Pemerintah daerah bisa memilah investasinya separuh atau Rp 5 miliar untuk pengusaha pembibitan sapi perah, sisanya separuh lagi Rp 5 miliar

untuk peternakan sapi perah rakyat.

Karena keuntungan bisnis pembibitan sapi perah tergolong sangat rendah, Masngut menyarankan peternak hanya dikenakan bunga rendah, semisal 2-4 persen atau ambil maksimalnya 4 persen per tahun. Jangka waktu pengembalian ditetapkan lima tahun dengan *grace period* dua tahun. Jadi, peternak dapat mulai mengangsur pada tahun ketiga, keempat dan pada tahun kelima sudah terlunasi.

Peternak dapat menjual anak sapi pada tahun pertama untuk digunakan sebagai angsuran pada tahun ketiga, menjual anak tahun kedua untuk angsuran tahun keempat, dan menjual anak tahun ketiga untuk angsuran pada tahun kelima.

Masngut mengajukan sejumlah kriteria bagi pengusaha pembibitan yang berhak memperoleh kredit dimaksud. Yaitu, peternak harus sudah berpengalaman di bidang pembibitan sapi perah; Mempunyai kandang; memiliki lahan rumput; Memiliki ijin; dan Memiliki jaminan.

“Paket yang kami usulkan adalah 50-100 ekor sapi setiap pengusaha,” kata Masngut.

Syarat berbeda diusulkannya bagi peternakan sapi rakyat. Yaitu, memiliki kemauan dan kemampuan; Memiliki kandang; dan Memiliki jaminan tetapi, apabila tidak ada, bisa diwakili oleh kelompoknya masing-masing di mana satu kelompok peternak satu jaminan yang sesuai. Di sini paket yang diusulkan ke setiap peternak adalah 2-4 ekor sapi, atau bisa lebih sesuai kemampuan masing-masing peternak.

Untuk merangsang petani supaya bergairah beternak sapi perah, harga susu segar di tingkat peternak perlu dijaga pada tingkat harga ideal, berkisar antara Rp 1.900-2.150 per liter.

Dengan rangsangan harga, ini secara otomatis akan menyemangati peternak menambah kepemilikan sapi perah. Demikian pula pihak-pihak lain bisa tergiur untuk turut beternak sapi perah.

“Harapan kami program ini dapat berjalan setiap tahun. Jadi setiap tahun pemerintah daerah mengeluarkan 1.000 ekor sapi. Bila program ini bisa berjalan dengan baik maka selama lima tahun yang akan datang pertambahan populasi cukup menggembirakan, dapat membantu pemerintah swasembada daging serta mewujudkan Indonesia sebagai kolam susu,” kata Masngut.

Populasi Cepat Bertambah

Masngut Imam Santoso mengestimasi, dengan perbaikan manajemen secara keseluruhan

ditargetkan pedet yang dilahirkan dengan selamat sampai dewasa dapat mencapai sebanyak 60 persen dari jumlah induk.

Untuk menunjang percepatan populasi sapi perah dianjurkan perkawinan dilakukan secara inseminasi buatan (IB), dengan keharusan menggunakan *straw* berjenis kelamin tertentu.

Dengan demikian pedet yang lahir berkelamin betina akan sebanyak 60 persen dari total angka kelahiran selamat (60 persen dari induk), dan yang berkelamin jantan 40 persen juga dari total angka kelahiran (60 persen dari induk).

Masngut mengestimasi laju pertambahan populasi sapi perah di setiap daerah sebagai berikut: Pada tahun pertama jumlah induk 1.000 ekor, jumlah kelahiran pedet 600 ekor, jumlah pedet jantan 240 ekor, dan jumlah pedet betina 360 ekor.

Pada tahun kedua, jumlah induk 1.000 ekor, jumlah pejantan 240 ekor, jumlah dara 360 ekor, kelahiran pedet 600 ekor, pedet jantan 240, dan pedet betina 360 ekor.

Pada tahun ketiga, jumlah induk 1.360 ekor, pejantan 480 ekor, dara 360 ekor, kelahiran pedet 816 ekor, pedet jantan 326 ekor, dan pedet betina 490 ekor.

Pada tahun keempat, jumlah induk 1.720 ekor, jumlah pejantan 806 ekor, dara 490 ekor, kelahiran pedet 1.032 ekor, pedet jantan 530 ekor, dan pedet betina 619 ekor.

Pada tahun kelima, total jumlah induk sapi sudah mencapai 2.210 ekor, jumlah pejantan 1.219 ekor, jumlah dara 619 ekor, jumlah kelahiran pedet 1.326 ekor, jumlah pedet jantan 530 ekor, dan jumlah pedet betina 796 ekor.

Dari jumlah induk sapi tersebut, Masngut mengatakan bisa diperoleh produksi susu pada tahun pertama 3 juta liter, tahun kedua 3 juta liter, tahun ketiga menjadi 4,080 juta liter, tahun keempat 5,160 juta liter, dan tahun kelima 6,630 juta liter.

Kata Masngut, usulan Asosiasi Peternak Sapi Perah Indonesia (APSPI) ini dapat menjadi bahan masukan bagi Departemen Pertanian untuk menentukan program pengembangan sapi perah di seluruh Indonesia.

“Dukungan dari semua pihak baik pemerintah, IPS, koperasi persusuan dan semua peternak sapi perah sangat dibutuhkan untuk mewujudkan keinginan luhur mewujudkan peternakan sapi perah yang tangguh dan berdaya saing,” kata Masngut Imam Santoso. ■ CRS, HT, AM



Irwandi Yusuf Melapor ke Jakarta

Aceh sebagai Daerah Istimewah menerapkan syariat Islam. Sekarang, provinsi ini dipimpin oleh mantan pentolan GAM. Tapi, sama dengan gubernur provinsi lainnya, gubernur dan wakil gubernur NAD yang baru terpilih, datang dan melapor ke Jakarta.

Kekhawatiran Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) akan lepas dari pangkuan ibu pertiwi perlahan mulai sirna. Keberhasilan pelaksanaan Pilkada 11 Desember 2006 yang dimenangkan oleh pasangan drh. Irwandi Yusuf, M.Sc-Muhammad Nazar, S.Ag. itu justru membuktikan proses demokrasi mulai tumbuh di "Bumi Serambi Mekkah" itu.

Walau tadinya kedua pasangan itu dikenal sebagai mantan GAM, dan naik lewat jalur calon independen, nyatanya usai terpilih, mereka menjalani proses birokrasi yang sama dengan para pemimpin lain di Indonesia.

Sebulan setelah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Mohammad Ma'rif pada 8 Februari 2007, keduanya datang dan melapor ke Presiden-Wakil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, di Kantor Kepresidenan Jakarta Kamis (8/3), bukan ke Stockholm, Swedia yang sebelumnya dikenal sebagai markas GAM di pengasingan yang membuat Aceh selama 30 tahun tercabik-cabik oleh konflik dan yang secara fisik semakin luluh-lantah akibat bencana tsunami Desember 2004.

Tetapi, cahaya akhirnya datang tatkala ditandatangani perjanjian Helsinki 15 Agustus 2005, dan terangnya semakin membesar setelah Irwandi-Nazar di-

sumpah. Keduanya menyatakan kesediaan untuk harus memenuhi kewajiban sebagai Gubernur/Wakil Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa.

Di Jakarta, Irwandi-Nazar melapor ke Presiden tentang rencana program Pemerintahan Daerah ke depan serta melaporkan situasi terakhir NAD setelah sebulan dilantik. "Dan sebagaimana yang dijanjikan Presiden saat saya terpilih sebagai Gubernur, bahwa satu bulan setelah dilantik agar saya bisa hadir kembali ke Istana untuk melaporkan kondisi pelaksanaan pemerintahan di Aceh, serta rencana program yang akan dilakukan ke depan," kata Irwandi kepada pers.

"Dalam sebulan ini kami telah melaksanakan beberapa hal. Antara lain melakukan konsolidasi dan pembinaan aparatur menyangkut disiplin dan kinerja aparat pemerintah. Kemudian pelayanan satu pintu atau *one stop service* untuk memudahkan pelayanan terhadap masyarakat dan memangkas kemungkinan-kemungkinan KKN. Saya juga telah melakukan sidak ke hutan-hutan untuk melihat langsung pembalakan liar," kata Irwandi, yang didampingi Mendagri M. Ma'rif dan Muhammad Nazar.

Di bidang ekonomi, dilaporkan akan diterapkan ekonomi kaum dhuafa. "Insya Allah empat atau lima bulan ke depan program pemberdayaan ekonomi kaum dhuafa segera dilaksanakan. Kemudian di sektor perkebunan juga segera dilaksanakan, diharapkan banyak tenaga kerja dapat terserap. Yang lainnya adalah pembangunan jalan Meulaboh ke Banda Aceh dalam proses ganti rugi, terus pamanjangan landasan pacu bandara Iskandar Muda dari 2.500 meter ke 3.000 meter, termasuk pembangunan pelabuhan untuk ekspor batu bara dan lain-lain," kata pria kelahiran Bireun, 2 Agustus 1960 itu.

Usai melapor, besok malamnya, Jumat (9/3) Irwandi menghadiri upacara adat Tepung Tawarm atau "Peuseujuk", digagas oleh kelompok perkumpulan Taman Iskandar Muda (TIM) Jakarta. Peuseujuk juga ditujukan kepada Muhammad Nazar dan mantan Pejabat Gubernur Mustafa Abubakar yang kini menjadi Dirut Bulog. Dalam acara ritual itu turut hadir sejumlah

tokoh asal Aceh seperti Abdurrahman Ramli (Penasehat TIM), pimpinan TIM Safla Didoh, mantan Gubernur Aceh Mustafa Mahmud, Murhama Daud seorang putri almarhum pejuang Aceh Tengku Daud Bereuh, dan mantan Menkeh Hasballah M. Saad.

Sebagai kepala birokrasi yang baru, seperti halnya para gubernur lain, dan demi mewujudkan janji-janjinya selama kampanye, Irwandi menegaskan dirinya sangat ingin menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Ia ingin memperbaiki infrastruktur serta memajukan pendidikan di Aceh. Untuk itu, dukungan dan peran serta seluruh masyarakat Aceh di mana saja, baik di Jakarta dan di luar negeri sangat dibutuhkannya.

Keinginan itu segera diresponi. Kepadaanya lantas diberikan amplop secara simbolis berisi uang sebagai tanda dukungan moril dan doa keselamatan dalam memimpin Aceh.

Definisi Baru "Kemerdekaan"

Irwandi Yusuf mengaku telah menanggalkan keinginan untuk merdeka, dalam arti lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Identitas lama yang kami tinggalkan yaitu tuntutan kemerdekaan. Identitas dalam format baru adalah kedaulatan, yaitu kami dipilih rakyat secara demokratis," ujarnya.

Sebagai kepala pemerintahan pilihan rakyat, Irwandi memiliki tugas berat mengembalikan kepercayaan rakyat, bahwa pemerintah mampu memberi jawaban atas berbagai persoalan riil yang dihadapi. Jika tugas ini gagal, bisa memunculkan kekecewaan baru yang suatu saat memicu ulang bara pergolakan.

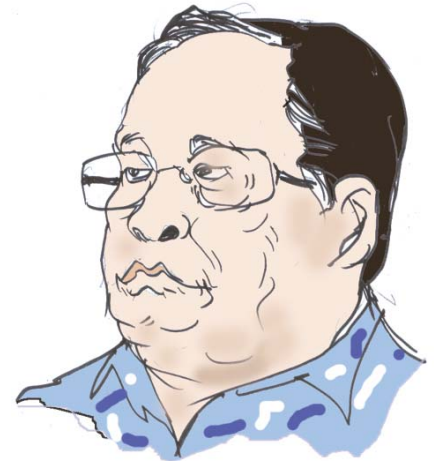
Muara persoalan riil itu sesungguhnya adalah kesenjangan ekonomi dan kemiskinan. Itu sebab, Malik Mahmud, tokoh senior GAM berpesan, "Majukan perekonomian Aceh, kalau tidak maka akan ada konflik di antara sesama kita sendiri yang bisa merusak perdamaian yang terbina selama ini."

Definisi baru kemerdekaan bagi rakyat Aceh adalah terpenuhinya hak-hak mereka sebagai warga negara. Keadilan harus ditegakkan. Aceh yang kaya dengan sumber daya alam harus bisa memakmurkan rakyat. Karena itu, Jakarta harus memberi kesempatan kepada Irwandi-Nazar. ■ HT

Mustafa Abubakar

Dirut Bulog Berobsesi Besar

Dikenal pandai membangun jaringan, begitu Departemen Kelautan dan Perikanan dibentuk ia langsung ditunjuk menjadi Irjen (1999-2006). Lalu menjadi Pejabat Gubernur Aceh. Doktor lulusan IPB Bogor (2004) seangkatan Presiden SBY ini kemudian diangkat menjadi Dirut Bulog. Ia berobsesi besar melakukan apa yang tak pernah dilakukan pendahulunya.



Kepada setiap pemimpin yang berhasil menunaikan tugas sudah selayaknya diberikan penghargaan yang setimpal. Dr Ir Mustafa Abubakar, M.Si mantan Pejabat Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (2005-2007) merasakan nikmatnya dihargai sebagai pemimpin yang berhasil.

Setelah vakum beberapa lama usai menyerahkan tongkat kepemimpinan baru di Bumi Serambi Mekkah kepada gubernur terpilih Irwandi Yusuf, 8 Februari 2007, Mustafa lalu diangkat menjadi Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Bulog.

Ia pegawai negeri sipil (PNS) yang meraih puncak karir tertinggi sebagai pejabat eselon satu, terakhir menjabat sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), sebelum kemudian ditugaskan menjadi Pejabat Gubernur Aceh.

Di Bulog, nama Mustafa Abubakar muncul begitu saja untuk menggantikan Widjanarko Puspo yang sedang tersangkut kasus hukum. Kepastian terjadi penggantian kepemimpinan tertinggi Bulog diperoleh setelah Kejaksaan Agung menahan Widjan, ditahan Selasa (20/3) di Lapas Cipinang, Jakarta.

Dalam waktu singkat, berhembus kabar nama Mustafa mantan konsultan Bank Dunia (1979-1989) ini sangat di jagokan untuk naik pada rapat umum pemegang saham (RUPS), berlangsung Rabu (21/3), bersamaan dengan penggantian seluruh anggota Dewan Pengawas. Ia di jagokan oleh Partai Golkar pimpinan Jusuf Kalla, yang juga Wakil Presiden RI.

Ketua Partai Golkar, Burhanuddin Napitupulu, misalnya, menyebut Mustafa yang alumni Institut Pertanian Bogor (IPB) itu pantas memimpin Bulog. "Beliau sudah teruji sebagai pemimpin Aceh," ujar Burnap, sapaan akrab Napitupulu kepada *Koran Tempo*. Jusuf Kalla lebih lagi dalam menilai Mustafa. Ia menyebut Mustafa

memiliki kompetensi, pengalaman, dan bisa bekerjasama dengan pemerintah.

Sementara itu Direktur Standarisasi dan Akreditasi, Setia Mangunsong, salah seorang koleganya di DKP, menyebut Mustafa merupakan pejabat yang pandai membangun jaringan kerja secara luas. Sebagai Irjen DKP, misalnya, kata Setia, Mustafa terpilih sebagai Ketua Kelompok Inspektur Jenderal departemen-departemen. Bahkan, sebagai insan kelautan perikanan, Mustafa pernah pula duduk sebagai Ketua Masyarakat Perikanan Indonesia. Selama mahasiswa pun (tamam S-1 1977, S-2 2002) pria yang pernah menjadi Ketua Umum Taman Iskandar Muda (TIM) di Jakarta, ini dikenal sebagai aktivis mahasiswa.

Bersamaan dengannya, dilantik pula Dewan Direksi dan Dewan Pengawas baru Perum Bulog. Dewan Direksi selengkapannya terdiri Mustafa Abubakar (Direktur Utama), Bambang B Prasetyo (Direktur Operasional), Saeon Ahmadi (Direktur Keuangan), dan Agus Syaifulah (Direktur SDM dan Umum). Dewan Pengawas terdiri Sulatin Umar (sehari-hari Staf Khusus Departemen Dalam Negeri) sebagai ketua, dibantu empat anggota yakni Bayu Krisnamurti (deputi di Kementerian Koordinator Perekonomian), Ardiansyah Parman (deputi di Departemen Perdagangan), Kaman Nainggolan (Kepala Badan Ketahanan Pangan, Deptan), dan A. Pandu Djajanto (Staf Ahli Kementerian Negara BUMN).

Berobsesi Besar

Mustafa naik saat Bulog sedang disorot tajam sebagai sarang korupsi. Banyak petinggi Bulog harus mendekam di balik jeruji besi karena kasus korupsi, dan sebanyak itu pula tokoh lain yang juga pernah terjereb karena "bermain api" dengan Bulog. Nama-nama mereka sangat dikenal masyarakat sebab ramai diistilahkan sebagai Buloggate.

Bulog memutar uang tahunan dalam jumlah cukup besar tetapi rawan sekali untuk bisa dimainkan. Berbagai kelompok kepentingan selalu berusaha untuk menempatkan orang-orangnya sebagai petinggi di sini.

Tapi Mustafa dengan tegas menyebut dirinya tak ingin tersandung batu yang sama dua kali. Usai dilantik, kepada pers ayah tiga orang anak ini berujar, secara internal moral karyawan dan staf Bulog sedang turun. Situasi itu masih diperparah oleh beratnya beban eksternal.

"Kami ingin segera melanjutkan kepemimpinan yang efektif dengan memanfaatkan seluruh potensi sumberdaya yang ada dalam jajaran Bulog dan mengarahkan karyawan untuk bekerja keras. Memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada masyarakat," ujar pria kelahiran Pidie, Aceh, 15 Oktober 1949 ini.

Doktor program studi pembangunan kelautan perikanan dari IPB Bogor ini berjanji akan menciptakan kepemimpinan yang baru untuk memberikan kesejahteraan.

Ia akan memecahkan masalah secara tenang, melihat masalah secara komprehensif, kemudian bekerja sekeras-kerasnya menyelesaikan masalah berat.

Ia juga berjanji akan memperbaiki kinerja Perum Bulog dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan benar (*good corporate governance*).

Ke dalam, menurutnya, harus ada manajemen yang sehat, bersih, dan juga efektif. Ke depan, agaknya Mustafa hanya akan mengarahkan haluan hidup di Bulog. Sebab ia punya obsesi besar di sini, yang selama ini jarang dimiliki petinggi Bulog sebelumnya, yakni sesedikit mungkin melakukan impor beras, tetapi sebanyak mungkin mengandalkan produksi beras dalam negeri.

"Impor adalah pelengkap dari kebutuhan dalam yang tidak cukup," ujarnya. ■ HT

Menyelamatkan Pertumbuhan Ekonomi

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 2007 sebesar 6,3% dibutuhkan dana investasi paling tidak Rp 989 triliun. Pemerintah merencanakan sumber investasinya berasal dari pemerintah, BUMN, perbankan, dan pasar modal.

Sejak tahun 1998 hingga sekarang pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya ditopang sektor konsumsi. Secara teoritis, sektor konsumsi hanya mampu menopang perekonomian maksimal tiga tahun. Setelah itu perekonomian dipastikan jatuh ke dalam krisis.

Ketua Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM-UI), M Chatib Basri, mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang demikian tidak sehat dan tidak masuk akal. "Tidak mungkin ditopang oleh konsumsi karena rasio tabungan masyarakat terhadap produk domestik bruto tidak naik," kata Chatib.

Menjawab wacana Chatib ini, sebelumnya berbagai kalangan menilai kemampuan bertahan sektor konsumsi hingga satu dasawarsa sejak terjadinya krisis ekonomi 1997, ditengarai besarnya volume *hidden economy*, yaitu ekonomi yang tidak

teregistrasi dan tidak terpantau oleh pemerintah, khususnya aparat pajak.

Target Pertumbuhan 6,3%

Dalam upaya memperbaiki struktur pertumbuhan ekonomi, dari konsumsi ke investasi, Sri Mulyani pada saat berbicara dalam sebuah semiloka "Sektor Riil di Indonesia: Di Manakah Peran Sektor Keuangan", mengatakan Indonesia membutuhkan suntikan dana investasi Rp 989 triliun. Jumlah investasi ini akan bisa mengerek pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3% di tahun 2007. Kebutuhan itu lebih besar 12,3% dibanding nilai investasi tahun 2006.

Dana sebesar itu, salah satunya dimaksudkan untuk mengembalikan pamor industri manufaktur agar dapat tumbuh 7,2%, melejit dibanding dua tahun terakhir yang hanya tumbuh 4,6%-4,7%. Perbaikan industri manufaktur, kata Ani akan memberikan efek keuntungan gan-



da, yakni menambah investasi dan menyediakan lapangan kerja baru.

Walau demikian, target laju pertumbuhan industri manufaktur ini, masih tetap di bawah pencapaian sebelum krisis moneter. Di mana, sektor andalan pertumbuhan di era Orde Baru itu, mampu tumbuh rata-rata 8% per tahun.

Berbagi Beban

Sri Mulyani mengatakan kebutuhan dana investasi tahun ini dipikul secara merata oleh pemerintah, BUMN, perbankan dan pasar modal.

Hukum Pareto Antarpendapatan

Penguasaan aset yang timpang, sebagaimana yang terjadi menjelang kejatuhan orde baru, yakni kue terbesar perekonomian hanya dinikmati segelintir orang, sepertinya kembali lagi terjadi saat ini.

Selain pertumbuhan ekonomi yang hanya ditopang sektor konsumsi, penguasaan sumber daya ekonomi pun masih tertimpang. Hal ini terbukti dari data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Data LPS per 31 Januari 2007 menunjukkan, 80% dari Rp 1.026 triliun dana pihak ketiga (DPK) ternyata hanya dimiliki 1,42 juta rekening atau 1,75% dari total 81,5 juta rekening simpanan.

Itu berarti, 97,25% deposito lainnya, hanya menguasai 20% dana pihak ketiga, atau sebesar

Rp 263,6 triliun.

Menyoroti ketimpangan dana pihak ketiga ini, harian *Investor Daily*, menyetarakan sebagai ketimpang distribusi pendapatan di masyarakat. Struktur yang timpang seperti ini berpotensi memicu gejolak sosial.

Refleksi Hukum Pareto

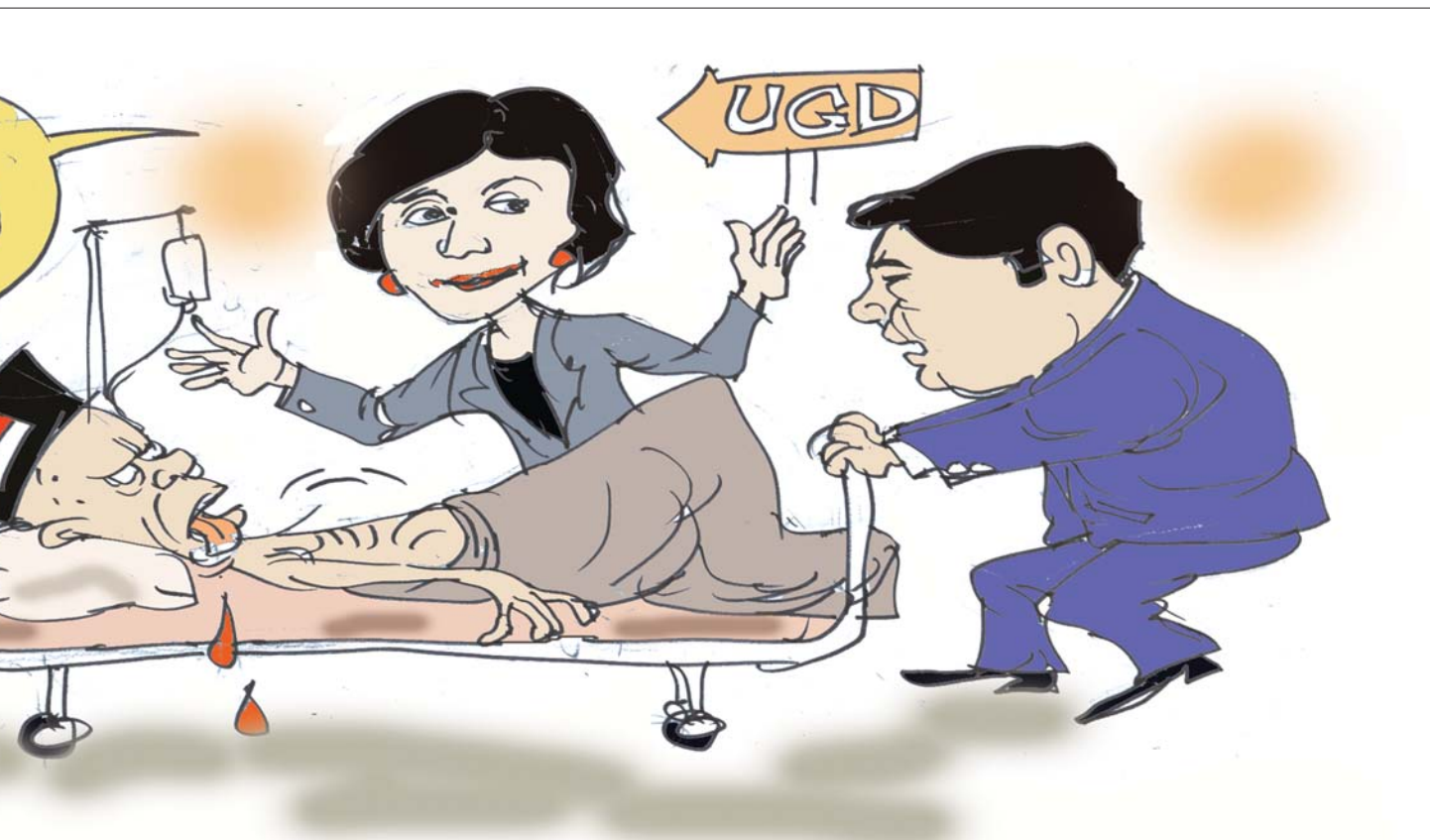
Senada dengan itu, Kepala Eksekutif LPS Krisna Wijaya, dan pengamat perbankan Djoko Retnadi menyatakan, penguasaan segelintir orang terhadap DPK perbankan nasional menunjukkan ketimpangan pendapatan masyarakat Indonesia. Jumlah orang kaya tidak seberapa,

namun mereka memiliki kekayaan besar.

Kata Krisna, kondisi demikian merefleksikan hukum Pareto. Yakni, kelompok besar menguasai kekayaan kecil, sebaliknya sekelompok kecil menguasai porsi besar.

"Contohnya, jumlah perbankan kita *kanada* 130 bank. Tapi sepuluh bank besar menguasai aset 70%," kata Krisna.

Sementara Djoko Retnadi menyoroti ketimpangan antardaerah, di mana 60% dana pihak ketiga menumpuk di Jakarta. Struktur deposito bank, umumnya dikuasai korporasi seperti asuransi dan dana pensiun, grup-grup usaha besar swasta, dan pribadi-pribadi kelas atas.



Pemerintah dan BUMN menyumbang Rp 346,15 triliun, perbankan memasok kredit investasi Rp 100 triliun, penanaman modal asing memasok Rp 190 triliun, dan pasar modal domestik menyumbangkan investasi baru Rp 346,15 triliun berasal dari penghimpunan dana penawaran saham perdana (IPO) atau penjualan obligasi swasta.

Kontribusi investasi pemerintah, yang mencapai 35% dari total kebutuhan Rp 989 triliun, antara lain ditopang oleh pembangunan pembangkit listrik 10 ribu mw, pemba-

ngunan jalan tol oleh Jasa Marga, ditambah proyek-proyek penopang investasi pemerintah tahun ini, serta belanja barang dan modal yang jumlahnya mencapai Rp 145 triliun.

Untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi 6,3% Sri mengajukan sejumlah prasyarat. Yaitu, Indonesia harus menaikkan konsumsi masyarakat sebesar 5,1% dibanding tahun 2006 dan ekspor 9,9%. Konsumsi pemerintah harus pula tumbuh 8,9%.

Tetapi Indonesia harus siap menerima dampak. Tahun 2008 mendatang tidak

akan mungkin mencapai keseimbangan anggaran, atau anggaran tanpa defisit, sesuai keinginan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RJPM).

Dukungan sektor perbankan untuk memperbaiki perekonomian yang sakit disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah.

Menurutnya, sektor perbankan akan mendominasi pencapaian target investasi tahun ini. Pertumbuhan pencairan kredit akan mencapai 23%, lebih tinggi dibanding tahun lalu yang hanya Rp 832,9 triliun. ■ HT

batan

"Tapi institusi dan grup besar juga merepresentasikan orang-orang di dalamnya yang memiliki kekayaan besar," kata Djoko.

Pembatasan Jaminan

Menanggapi pengumuman LPS yang menyatakan bahwa dalam tiga bulan terakhir, sebanyak 9,7 juta rekening dengan simpanan di bawah Rp 100 juta sudah menutup rekeningnya, pengamat ekonomi Aviliani mengatakan hal itu sebagai refleksi dari kondisi ekonomi rakyat kecil yang semakin tertekan. Tekanan itu bisa akibat kenaikan harga BBM, pemutusan hubungan kerja (PHK), dan pola konsumtif yang berlebihan. ■ HT

Profil Simpanan di Bank Umum

Per 31 Januari 2007

No.	Nominal	Jumlah Rek.	%	Nominal Rp Triliun	%	Rata-Rata/Rek (Rp Juta)
1.	0-50 Juta	78.944.573	96,86	180,36	13,98	2,28
2.	50-100 Juta	1.134.157	1,39	83,34	6,46	73,49
	Sub Total	80.079.730	97,25	263,70	20,44	-
3.	100 Juta-1 Miliar	1.283.698	1,58	358,29	27,77	279,11
4.	1 Miliar-5 Miliar	116.605	0,14	220,96	17,13	1.894,92
5.	>5 Miliar	22.849	0,03	447,30	34,66	19.576,30
	Sub Total	1.423.152	1,75	1.026,55	79,56	-
	TOTAL	81.501.882	100	1.290,25	100	-

Sumber: Investor Daily/LPS

Menyoal Target Ekspor 20 Persen



Peningkatan ekspor 2007 fokus pada sepuluh komoditas.

Target pertumbuhan ekspor yang ditingkatkan Wakil Presiden Jusuf Kalla menjadi sebesar 20%, dari sebelumnya ditetapkan Departemen Perdagangan sebesar 14,5% tahun 2007 dinilai tetap realistis, jika diikuti perbaikan iklim investasi.

Wakil Presiden Yusuf Kalla mengoreksi target pertumbuhan nilai ekspor menjadi 20% pada tahun 2007. Sebelumnya, Departemen Perdagangan menetapkan target pertumbuhan ekspor hanya sebesar 14,5% atau lebih rendah dari capaian nilai ekspor tahun 2006 yang mencapai 17,55%.

Tentu ada alasan mengapa Departemen Perdagangan menetapkan target pesimistis. Secara umum, alasannya didasarkan pada kinerja perdagangan global yang diprediksi mengalami penurunan pada tahun 2007. Namun demikian, Wakil Presiden Yusuf Kalla yang memasang target hingga 20%, juga memiliki alasan. Paling tidak, wakil presiden merasa optimis dengan perbaikan iklim investasi tahun 2007, yang akan secara langsung mendorong peningkatan ekspor.

Langkah wakil presiden mengoreksi target nilai ekspor, merupakan dorongan langsung kepada Departemen Perdagangan agar memacu kinerjanya hingga mencapai target tersebut. Jika bertitik tolak dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengungkapkan nilai ekspor tahun 2006 mengalami pertumbuhan hingga 17,55%, maka target pencapaian nilai ekspor hingga 20% tahun 2007, masih tergolong realistis.

Strategi Pertumbuhan Ekspor

Dalam upaya mencapai target nilai ekspor 20% pada tahun 2007, pemerintah telah menetapkan 3 (tiga) strategi. *Pertama*, Sektor peningkatan ekspor difokus-

kan pada 10 komoditas utama. *Kedua*, pasar pertumbuhan ekspor akan difokuskan pada 15 negara tujuan ekspor. *Ketiga*, lokasi/wilayah sumber ekspor, perlu dikaji dan diatasi dengan program jangka pendek dan menengah untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi.

Menyangkut 10 komoditas utama yang menjadi fokus ekspor, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, seperti dilaporkan Harian *Kompas*, Rabu (28/2) menyumbang 44,8% dari 79,5 miliar dolar Amerika Serikat total ekspor non-migas Indonesia. Oleh karena itu, Mari menyebutnya sebagai tulang punggung pertumbuhan ekspor. Kesepuluh komoditi itu adalah tekstil dan produk tekstil (TPT), elektronik, sepatu/alas kaki, komponen kendaraan bermotor, minyak sawit, karet dan produk karet, mebel, udang, kakao serta kopi.

Namun menurut Menteri Perdagangan, di samping kesepuluh komoditi andalan tersebut, masih ada komoditi lain yang cukup penting dipertahankan kinerja ekspornya, seperti batu bara, tembaga, nikel, timah, kertas dan *pulp*, *plywood*, dan alkohol yang menyumbang 26,3 persen dari pangsa pasar ekspor tahun 2006.

Sementara itu, Menteri Perindustrian Fahmi Idris mengungkapkan optimis dengan target pertumbuhan nilai ekspor 20%, dengan beberapa persyaratan. Ia menyebutkan, untuk mencapai target itu dibutuhkan tingkat suku bunga perbankan yang kondusif, perbaikan infrastruktur, serta peningkatan peran ber-

bagai pihak terkait termasuk atase perdagangan Indonesia.

Kendala

Walau pun demikian, harus tetap diwaspadai berbagai perubahan iklim perdagangan yang diperkirakan banyak berubah pada tahun 2007 ini. Dalam hal ini, pemerintah harus menyadari berbagai kendala yang sudah berada di depan mata, yakni minimnya investasi untuk menggenjot produksi pada satu sisi dan di sisi lain terjadinya perlambatan kinerja perekonomian dunia. Kedua kendala ini akan berpotensi mempengaruhi penurunan nilai ekspor.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya disadari, pencapaian nilai ekspor yang cukup besar tahun 2006, lebih banyak didorong kenaikan harga komoditi ekspor Indonesia, khususnya harga komoditas primer seperti *crude palm oil* (CPO) dan karet. Sementara pertumbuhan produktivitas nyaris tidak ada. Tahun 2007, momentum kenaikan harga-harga komoditi diperkirakan tidak akan muncul lagi. Bahkan harga-harga komoditas primer akan menurun seiring dengan meningkatnya pasokan.

Untuk tetap dapat mencapai target ekspor 20%, ekonom Djisman Simanjuntak mengungkapkan perlunya investasi baru. "Agar ada investasi baru, pemerintah harus secepatnya menyelesaikan peraturan yang berkaitan dengan investasi," katanya seperti dikutip Harian *Kompas*, Senin (5/3).

Sementara di tempat terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofyan Wanandi dengan tandas mengungkapkan adanya kendala besar untuk mencapai target pertumbuhan ekspor sebesar 20%. Ia mengungkapkan kendala utamanya terletak pada gejala perlambatan perekonomian dunia. ■ MH



Presiden dan Wakil Presiden harus mensinergikan gaya kepemimpinan.

foto: presidensby.info

Perombakan Tim Ekonomi Berpotensi Kontaproduktif

Presiden diharapkan hati-hati menyikapi desakan berbagai kalangan untuk me-*reshuffle* tim ekonomi. Walau ada harapan akan memberi perbaikan pasca *reshuffle*, namun juga harus diantisipasi potensi pembusukan ekonomi setelah pergantian anggota kabinet.

Dorong untuk merombak Kabinet Indonesia Bersatu, semakin lama semakin terdengar nyaring, bahkan belakangan keinginan itu justru sudah berubah menjadi semacam pemaksaan kepada presiden agar sesegera mungkin melakukan perombakan kabinetnya.

Di kalangan pengamat dan akademisi, isu perombakan kabinet juga ditanggapi dengan suara yang hampir senada, yakni perlunya presiden merombak kabinet. Pengamat pemerintahan dan juga Dosen pascasarjana politik lokal dan otonomi daerah Universitas Gajah Mada, Ari Dwi Payana, seperti dilaporkan *Harian Sinar Harapan*, Selasa (13/3) mengungkapkan perombakan kabinet didasarkan pada kredibilitas para menteri yang semakin tidak memadai.

Bahkan sebelumnya, peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Indra J Piliang, langsung menunjuk menteri-menteri yang membidangi ekonomi dan sosial yang harus dirombak karena menunjukkan kinerja yang tidak maksimal. "Itu artinya, hampir dua pertiga dari menteri yang ada," katanya kepada *Harian Sinar Harapan*, Jumat (2/3).

Sementara itu di tempat terpisah, pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Harris, walau di satu sisi menyetujui dilakukannya perombakan Kabinet Indonesia Bersatu, namun di sisi lain justru tidak melihat *reshuffle* sebagai hal yang paling mendasar, melainkan pokok persoalannya terletak pada perubahan sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"SBY dulu yang berubah, baru kemudian menentukan siapa pembantunya yang yang harus di-*reshuffle*. *Reshuffle* tanpa perubahan sikap kepemimpinan, tidak akan banyak menyelesaikan masalah," katanya.

Reshuffle Tim Ekonomi

Akan tetapi, khusus untuk tim ekonomi, desakan melakukan *reshuffle* harus disikapi presiden dengan hati-hati. Jika tidak karena sangat terpaksa, presiden sebaiknya mempertahankan tim ekonomi yang ada saat ini. Ini tidak berarti bahwa anggota kabinet yang ada di tim ekonomi sudah baik, tetapi untuk menghindari kekhawatiran terjadinya pembusukan ekonomi akibat *reshuffle*.

Ini telah menjadi pelajaran berharga dari *reshuffle* pertama, yang sebelumnya

diharapkan memperbaiki kinerja perekonomian, tetapi kenyataannya justru mendorong perlambatan. Hal ini terlihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi yang menurun, dari 5,6% tahun 2005 menjadi 5,5% tahun 2006. Angka kemiskinan juga naik sekitar 3,9 juta orang selama tahun 2006 menjadi 39 juta orang.

Menghindari Pembusukan Ekonomi

Prediksi banyak kalangan terhadap kinerja perekonomian tahun 2007, sudah jelas ditengarai pesimisme. Pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintah sebesar 6,3% pada PDB, diperkirakan tidak akan tercapai. Sekalipun pemerintah telah berupaya mendorong perbaikan iklim investasi, termasuk merelaksasi aturan Bank Indonesia (BI), pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap sulit untuk sekadar mencapai 6,0%.

Dalam kondisi demikian, isu *reshuffle* kabinet dapat berubah menjadi persoalan baru yang semakin memperburuk kinerja perekonomian. Disamping itu, harus dipahami, bahwa penggantian tim ekonomi tidak dapat menjadi jaminan akan memperbaiki kinerja perekonomian nasional. Sebaliknya, *reshuffle* berpotensi memperburuk kinerja perekonomian, paling tidak selama masa penyesuaian diri anggota kabinet baru dalam menerjemahkan dan mengaktualisasikan visi pemerintah.

Sebab sudah barang pasti, anggota kabinet baru masih harus menyesuaikan diri dengan tim ekonomi lainnya, serta menyusun program-program kebijakan kementerian berdasarkan visi dan kebijakan yang akan ditempuhnya. Hal ini semua akan membawa konsekuensi memperlambat kinerja perekonomian, walaupun sesudahnya dimungkinkan adanya percepatan pengelolaan kebijakan. ■ MH

Bermimpi Masuk “The Big Five”

Pertumbuhan ekonomi nasional yang sakit, ataupun struktur perekonomian yang masih timpang, tak menghalangi sejumlah pelaku ekonomi terkemuka yang tergabung dalam Yayasan Indonesia Forum (YIF) untuk bermimpi.

Mimpi mereka sangat dahsyat, dituangkan dalam “Visi Indonesia 2030”. Yaitu, pada tahun 2030 Indonesia memiliki pendapatan perkapita 18 ribu dolar AS; Indonesia memiliki paling tidak 30 perusahaan yang masuk dalam daftar “Fortune 500 Companies”; Indonesia tercatat sebagai kekuatan ekonomi terbesar kelima dunia setelah China, AS, Uni Eropa, dan India; Indonesia menjadi sebagai negara maju yang unggul dalam pengelolaan kekayaan alam; dan Indonesia memiliki kualitas hidup modern yang merata.

Kadahsyatan mimpi-mimpinya mendorong Chairul Tanjung, Ketua Umum YIF dan rombongan diberikan kesempatan untuk paparan di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan Wapres

Jusuf Kalla, Kamis (22/3) di Istana Presiden.

Chairul Tanjung memproyeksikan, pada tahun 2030 produk domestik bruto Indonesia akan mencapai 5,6 triliun dolar AS (bandingkan tahun 2005 yang masih 0,3 triliun dolar AS). Sedangkan PDB China, saat itu melejit menjadi 28,2 triliun dolar AS (tahun 2005 masih 2,2 triliun dolar AS), AS 26,1 triliun dolar AS (12,5 triliun dolar AS), Uni Eropa 20,7 triliun dolar AS (13,5 triliun dolar AS), dan India 17,0 triliun dolar AS (0,8 triliun dolar AS).

“Proses industrialisasi akan menjadi katalisator akumulasi modal menuju negara maju dengan kontribusi terbesar dari sektor jasa,” ujar pemilik stasiun televisi *Trans7* ini.

Tanjung mendasarkan mimpinya pada berbagai asumsi. Pertumbuhan ekonomi riil di-



Presiden menunjukkan paparan Visi Indonesia 2030. foto: presidensby.info

asumsikan rata-rata 7,62 persen per tahun, laju inflasi 4,95 persen per tahun, pertumbuhan penduduk rata-rata 1,12 persen per tahun, dan PDB perkapita tahun 2030 18 ribu dolar AS. (Saat ini PDB perkapita Indonesia masih 1.663 dolar AS).

“Dengan jumlah penduduk 285 juta jiwa, PDB Indonesia mencapai 5,1 triliun dolar AS. Pada saat itu Indonesia masuk ke dalam lima besar perekonomian dunia sesudah China, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan India,” kata Tanjung.

Perlu Kontrak Sosial

Kata Tanjung visi 2030 dicapai dengan menyinergikan

tiga modal bangsa. Yaitu modal manusia, modal alam dan fisik, serta modal sosial. Juga menyinergikan tiga kelompok besar dalam masyarakat yaitu wirausahawan, birokrasi, dan pekerja.

Untuk itu diperlukan kontrak sosial baru sebagai perwujudan komitmen bersama untuk maju. Ketiga kelompok harus memiliki tanggungjawab baru dalam bentuk pola hubungan baru sebagai kontrak sosial.

“Pada 2030 Indonesia harus menjadi salah satu negara dengan kepastian hukum dan kepastian usaha paling tinggi,” kata Tanjung. ■ HT

Perusahaan Bermasalah Dibelai Kembali

Anda memiliki perusahaan yang pernah dicap bermasalah oleh perbankan, saat terjadi krisis moneter di waktu yang lalu? Tenang, demi menggerakkan sektor riil, siap-siaplah untuk “dibelai” kembali untuk mendapatkan kucuran kredit baru.

Pemerintah tak kehabisan akal untuk mempercepat pergerakan sektor riil. Dalam sebuah rapat koordinasi terbatas di Gedung BI Kamis (15/3), dipimpin Wapres Jusuf Kalla, berhasil ditelurkan sebuah konsensus untuk melonggarkan sejumlah ketentuan perbankan yang selama ini dinilai menghambat fungsi intermediasi perbankan.

Konsensus itu adalah, perusahaan-perusahaan yang pernah bermasalah tetapi bukan karena mismanajemen, atau itikad buruk, melainkan karena krisis ekonomi, dimungkinkan untuk mendapatkan kucuran kredit kembali dari perbankan.

Perbankan pun akan melepaskan keterkaitan kredit antara satu perusahaan yang terkena kredit macet, dengan perusahaan lainnya yang sehat dalam satu grup saat mengajukan kredit baru.

Konsensus itu sangat didukung oleh para pihak yang terlibat dalam rapat, terlebih

dipandang dari sudut masing-masing. Wapres Jusuf Kalla, misalnya, mengatakan, jika sebuah perusahaan macet kreditya akibat konflik yang berlangsung di wilayah bisnisnya, atau karena bencana alam, perusahaan itu bisa mendapatkan lagi kredit dari perbankan.

MS Hidayat, Ketua Umum Kadin Indonesia mengatakan relaksasi *one obligor policy*, atau kebijakan penangangan dalam satu kelompok obligor akan dilonggarkan, termasuk juga kolektibilitas kredit. Dengan demikian, kalau satu perusahaan macet, tetapi tak terkoneksi dengan perusahaan lainnya, akan turut pula direlaksasi. Hidayat menjanjikan Kadin tidak akan mendorong terulangnya kasus BLBI kembali.

Tetapi Sigit Pramono, Dirut Bank BNI memberi batasan. Kata dia, perusahaan yang pernah menjadi debitor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) tidak bisa mendapatkan lagi kredit.

“Kalau dulu kena BLBI dan pernah bermasalah, serta terkait kasus hukum, tentu tidak akan dikasih,” ujar Sigit peserta Rakortas. Sigit mengatakan banknya yang akan menentukan

perusahaan mana saja yang boleh dan tidak boleh menerima kredit, berdasarkan koridor dari BI.

Dirut Bank Mandiri, Agus Martowardojo yang juga Ketua Umum Perhimpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara), menambahkan, perusahaan yang bermasalah akibat memburuknya kondisi perekonomian, dan mulai berangsur-angsur pulih, sebenarnya bisa diberikan kredit oleh perbankan.

Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah akan melihat pemberian kelonggaran ini dengan cermat sekali. Kecermatan dikombinasikannya dengan upaya untuk tetap menjaga stabilitas. BI tak ingin pertumbuhan kredit terjadi begitu besar, dan jor-joran, apalagi bila mengorbankan stabilitas moneter.

“Karena, di atas stabilitas itulah, sebetulnya, ekonomi kita akan tumbuh. Akan tetapi, BI tentunya tetap akan memberikan banyak sekali catatan,” ucap Burhanuddin.

Konsensus juga menetapkan 10 sektor yang akan menjadi prioritas bagi penyaluran kredit perbankan tahun ini. Salah satunya infrastruktur. ■ HT

“Kalau mau bunuh diri, bunuh diri aja sendiri. *Ngapain* harus bawa anak-anak segala....”

Begitu reaksi seorang ibu muda tentang kasus bunuh diri yang terjadi di Kota Malang, beberapa waktu lalu. Ibu muda dengan dua anak tersebut sangat geram, nyaris tak mampu menahan amarah. Namun, seketika, rona wajahnya tak mampu menyembunyikan kesedihan yang amat mendalam. Marah dan geram sudah barang tentu dialamatkan kepada sang ibu, “sang sutradara” sekaligus pelaku aksi bunuh diri. Sedangkan rasa sedih dan iba ditujukan kepada keempat bocah cilik, yang hidup mereka harus berakhir secara tragis di tangan ibu kandungnya sendiri.

Jangankan masyarakat, keluarga terdekatnya pun pasti mengutuk. Dan sangat menyayangkan perbuatan yang sama-sekali di luar akal sehat itu.

Ada apa sebenarnya di balik peristiwa tragis ini? Benarkah semata-mata karena alasan ekonomi seperti banyak diekspose di media massa? Jika penyebabnya hanya sebatas ekonomi yang makin sulit, astaga... kita sudah sejak lama dijejali kasus bunuh diri massal.

Kenapa tidak? Secara makro, perekonomian kita benar-benar terpuruk. Boleh saja para pakar berkoar bahwa cadangan devisa kita aman, nilai ekspor bagus, pertumbuhan ekonomi cemerlang, angka kemiskinan menyusut, dan sebagainya. Tapi satu hal tak bisa dibantah: sebagian besar masyarakat kita sekarang ini didera kesulitan hidup. Harga-harga kebutuhan pokok terus menggila, sementara daya beli masyarakat terus melemah. Bagaimana banyak kini manusia Indonesia yang untuk mendapatkan sesuap nasi saja sepertinya harus melalui perjuangan hidup mati.

Tapi sampai saat ini kasus bunuh diri massal dalam skala besar-besaran belum pernah terjadi. Dengan dibentengi oleh iman kita kepada Yang Mahakuasa, berbagai masalah pelik dalam hidup tidak lantas membuat kita berputus asa, apalagi bunuh diri.



Ke “Surga” Ala Junaina Mercy

Kematian umumnya menyisakan rasa iba dan sedih bagi keluarga dan kerabat yang ditinggalkan. Tapi kematian Junaina Mercy, “sutradara sekaligus pelaku” aksi bunuh diri di Malang justru mengundang antipati.

Dalam pemahaman seperti itulah, pribadi Ny. Mercy yang juga penganut agama itu, menjadi teka-teki. Apa sebenarnya motif dia sehingga berbuat senekad itu? Ini menjadi tugas aparat untuk membongkarnya, khususnya jajaran Polresta Kota Malang. Dan sudah barang tentu, masyarakat akan terus menunggu hasil penyelidikan aparat.

Namun masyarakat juga perlu menyadari bahwa ini butuh waktu. Aparat kepolisian tak mungkin melakukan penyelidikan dengan tergesa-gesa. Mereka harus mempertimbangkan kondisi psikis sang suami dan orang tua kandung Junaina Mercy. Mereka sangat terpuak, sehingga jiwa mereka masih labil. “Jadi mohon dipahami sikap keluarga korban,” kata anggota Polres Kota Malang, Ajun Inspektur Satu Subandi, yang ikut memeriksa keluarga korban di Malang baru-baru ini, koran *Tempo* (12/3).

Polisi cukup serius untuk menuntaskan kasus ini. Ini paling tidak tercermin dari jumlah aparat yang dilibatkan, tak kurang dari 20 personel. Mereka berasal dari Unit Identifikasi

dan Tenaga Keamanan Anti-bandit yang membantu mengolah tempat kejadian perkara.

Dari hasil analisis tempat kejadian memang ada indikasi yang mengarah ke kesimpulan awal: bunuh diri dengan aktor utama sang ibu, Mercy. Ini diperkuat dengan ditemukannya empat potong potas padat, satu sendok, satu piring cawan, selembar surat, pembalut wanita, serta 40-an butir kapsul dan pil. Kini barang bukti itu telah diserahkan ke bagian forensik untuk diteliti.

Karena itu, untuk sementara, polisi menyimpulkan kematian Junaina akibat minum racun potas. Menurut Kepala Kepolisian Resor Kota Malang Ajun Komisaris Besar Erwin Rusmana, bubuk potas dalam kemasan kapsul itu dicampurkan ke air putih lalu diminumkan kepada anak-anaknya. Setelah menjejali keempat anaknya dengan potas, giliran Junaina meminum air beracun itu. Hal itu sangat sesuai dengan surat yang ia buat untuk suaminya sebelum bunuh diri. “Junaina mengatakan ingin mengajak anak-anaknya ke

surga,” kata Erwin menirukan pesan terakhir Junaina.

Informasi yang berhasil dihimpun oleh pers menyebutkan bahwa kemungkinan besar kasus ini dilatarbelakangi persoalan ekonomi keluarga. Beberapa tetangga mengakui keluarga korban selama ini sangat tertutup dan almarhumah Junaina hampir tak pernah menampakkan diri. Sedangkan Hendri, suaminya, bekerja di Surabaya. Hampir empat minggu belakangan dia belum pulang ke Malang.

Sebelumnya, kondisi ekonomi pasangan Junaina-Hendri Suwarno cukup mapan sebagai mekanik (teknisi) motor gede. Namun akhir 2006 lalu usahanya menurun, sehingga, Hendri harus mendirikan bengkel baru di Surabaya dan Bali.

Dalam lembaran surat wasiat tersebut tertulis keluhan Mercy atas suaminya, Hendri Suwarno (35) yang dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarga. “Pa! Dananya sudah habis, sisanya uang diambil ibu. Saya ajak anak-anak biar mereka masuk surga,” tulis Mercy. Pada bagian lain, Mercy yang juga anggota Jemaah Gereja Maria Diangkat ke Surga (GMDKS) ini juga meminta agar dia dan anak-anaknya dikremasi dengan baju yang mereka senangi.

Pengamat sosial di Yogyakarta, Darmaningtyas, menyatakan bunuh diri dengan latar belakang kemiskinan menunjukkan korban sudah sangat putus asa dan frustrasi akibat penderitaan dan tekanan hidup yang sangat berat. “Bunuh diri adalah pilihan atau alternatif terakhir bagi korban untuk keluar dari masalah,” ujarnya seperti dikutip *Kompas*, Senin (12/3).

Menurut Darmaningtyas, kasus bunuh diri menunjukkan makin merosotnya kepedulian dan solidaritas sosial di masyarakat. Sekaligus juga menjadi bukti ketidakpedulian aparat pemerintah terhadap warga miskin. Karena itu, Darmaningtyas menandakan pentingnya langkah preventif untuk mencegah terulangnya kasus ini. Antara lain dengan memberantas kemiskinan itu sendiri. ■ SBR

Gerakan Penanaman Pohon

Sebagai penyuluh kehutanan Kabupaten Purwakarta, Bupati Drs. H. Lily Hambali Hasan Msi. mengajak masyarakat melakukan “Gerakan Penanaman Pohon” untuk mewujudkan revitalisasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

Intensitas pembangunan kehutanan, terutama di daerah Purwakarta di mata Lily Hambali semakin meningkat, meskipun berbagai permasalahan kehutanan di lapangan semakin berat dan kompleks. Sebab, meluasnya dimensi kompleksitas kepentingan berbagai pihak dalam pemanfaatan sumber daya hutan. Belum lagi berbagai bencana alam akibat fenomena alam dan perilaku merusak hutan oleh tanggungan manusia.

Karenanya, Lily Hambali mendesak Kadis Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Alam, Dwi Sutrisno SH, untuk merumuskan strategi dan merespon kebijakan pembangunan kehutanan dengan mengacu pada visi hutan lestari ma-

sarakat sejahtera.. Visi itu akan mudah diwujudkan apabila gagasannya dirangkai dengan mitra organisasi, seperti Himpunan Pelestari Hutan Andalan (HPHA), Ikatan Penyuluh Kehutanan (IPK), Kwartir cabang Gerakan Pramuka satuan kerja wana bakti, asosiasi Kepala Desa sekitar Hutan Negara dan Perkebunan Besar (AKSHN), maupun Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM). Semua ini, kata Lily Hambali, jika dioptimalkan akan mampu menanggulangi berbagai persoalan kehutanan.

Kata Lily Hambali, lestari nya hutan menimbulkan mata air kehidupan dan rusaknya hutan menimbulkan mata air kesedihan. Karena itu rakyat dihimbau untuk memahami



Drs. H. Lily Hambali Hasan Msi

manfaat hutan. Dwi Sutrisno SH, didampingi Kabid Penyuluhan Drs. Wahyu menjelaskan, di Kabupaten Purwakarta terdapat hutan lestari 29.000 Ha di mana 20.000 Ha merupakan hutan yang dikelola Perum Perhutani dan perkebunan besar. Sedangkan 9.000 Ha merupakan perkebunan rakyat. Dari 9.000 Ha itu sebagian lahan krisis sudah diatasi melalui program GNRHL.

Sebanyak 67 orang penyuluh Dinas sudah disebar di tiap kecamatan untuk mendorong dan menggerakkan masyarakat menanam lahan yang gundul dengan berbagai jenis pohon, termasuk gerakan menanam pohon sekitar kantor pemerintah dan swasta, sekolah-sekolah maupun gedung lain yang memiliki lahan di mana bibit dan teknis penanaman dibantu oleh pihak Pemkab. ■ BND, SH

Pipa Gas Negara Lalui Purwakarta

Proyek pemasangan pipa distribusi PT. Gas Negara (Persero) Tbk. Paket 16 yang melintasi Jl. Kopi – Jl. Veteran hingga Jl. Raya Sadang – Subang yang membelah kota Purwakarta sepanjang 10 km akhirnya mendapat izin dari Pemda terkait.

Rencana awal pemasangan sebelumnya melalui bahu Jl. Veteran menuju Sadang, tapi dihentikan pekerjaannya oleh pihak Polda Jabar, akhir tahun 2006. Alasannya, ada perubahan pelaksanaan teknis di lapangan yang tidak bisa dilakukan sesuai gambar akibat penyempitan di ruas jalan provinsi. Akhirnya, dialihkan melalui jalan Gg. Gedung Golkar menuju ke pertigaan SMPN 5 hingga pertigaan Cimaung. Solusi itu ditempuh melalui hasil analisa dan koordinasi dinas terkait Provinsi Jawa Barat – Pemkab Purwakarta dengan PT. Gas Negara (Persero) Tbk.

Pengendali proyek PT. KSO Inuasari Surya Ardianto, ketika berbincang di lokasi proyek dengan *Berita Indonesia* menjelaskan, rencana penggalian dan pemasangan pipa telah ditetapkan jadwalnya. Hasil survey, persyaratan izin,



Ardianto

Amdal, dan klarifikasi dengan Pemkab serta DPRD Purwakarta dan tokoh masyarakat lingkungan yang dilalui pipa, sudah didapat persetujuan.

Menurut Ardianto, pihaknya sebagai kontraktor utama pemasangan Pipa Gas Negara tekanan rendah 16 – 20 Bat, dirancang untuk memasok gas langsung pada konsumen, secara teknis pipa itu memiliki diameter 8 cm, dipasang pada kedalaman 180 cm dari permukaan tanah yang dilengkapi sistem proteksi gangguan seperti anti korosi maupun pengamanan

pemasakan. Valve pada tiap titik pasok dan tiap 5 km pipa terpasang dilengkapi alat proteksi pengamanan. Jadi kecurigaan atas dampak yang membahayakan di lingkungan tidak perlu diragukan.

Perubahan jalur yang dilalui, tadinya dari Jl. Veteran ke arah Sadang, menjadi dari Jl. Gg. DPD Golkar ke Pertigaan Jln. SPMN 5 hingga Pertigaan Jl. Cimaung sudah final. Jalur itu dinilai paling praktis dan aman, serta sudah mendapat izin lingkungan setempat. Sedangkan perubahan gambarnya kini sedang diteliti di instansi terkait untuk pelaksanaan. Diproyeksikan, pemasangan itu akan selesai Juni 2007.

Kewajiban-kewajiban termasuk memberikan bantuan-bantuan sosial bagi Rt – Rw yang dilalui sudah dilaksanakan dengan baik. Menjawab kekhawatiran atas perbaikan bekas galian, Ardianto menjelaskan menjadi komitmen perusahaan untuk memperbaikinya, begitu juga perbaikan Jl. Veteran yang sempat digali. Pihaknya juga akan bertanggung jawab untuk memperbaikinya seperti sedia kala. ■ BND, SH



Monang Sitorus: Ketua Umum Panitia Napak Tilas Nomensen

Tobasa Gelar Napak Tilas Nomensen

Potret bangsa Indonesia yang mampu hidup toleran dalam bingkai multikulturalisme akan terepresentasikan pada 5-8 April mendatang di wilayah Sumatera Utara.

Salah satu dari dua tokoh terpenting pembentukan karakter dasar warga Sumatera Utara, khususnya subetnis

bangsa Batak yakni Doktor I.L. Nomensen seorang misionaris asal Jerman, akan ditelusuri jejak pelayanannya dalam sebuah acara napak tilas.

Satu tokoh lagi yang dimaksud adalah Raja Sisingamangaraja XII, Pahlawan Nasional yang gigih mempertahankan kemerdekaan serta menjaga terpeliharanya nilai-nilai adat budaya Batak.

Nomensen yang meninggal dunia di Sigumpar, Toba Samosir pada 23 Mei 1918 datang untuk melayani dan membawa kemajuan di bidang pendidikan, pertanian, kesehatan, industri dan perdagangan.

Napak tilas perjalanan dilakukan secara besar-besaran melibatkan 10 daerah kabupaten/kota yang pernah dilayani oleh Nomensen. Peserta sebuah tim inti berjumlah 300 orang terdiri dari tokoh masyarakat, pimpinan gereja, setiap pejabat hingga kepala daerah kabupaten/kota yang dilewati peserta, dan rakyat biasa.

Rute bermula dari Pangururan di Kabupaten Samosir, lalu bergerak menuju Pakkat di Humbang Hasundutan, Barus di Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Padang Sidempuan, Bungabondar, Sipirok di Tapanuli Selatan, Tarutung di Tapanuli Utara, dan berakhir di Sigumpar Kabupaten Toba Samosir (Tobasa).

Setiap lokasi yang dilalui memiliki sejarah, bahkan masih menyisakan buah karya Nomensen seperti gereja, sekolah, rumah sakit, hingga sumur sebagai sumber mata air yang masih bisa dirasakan

manfaatnya.

Ketua Umum Panitia Napak Tilas Nomensen, Monang Sitorus, sehari-hari menjabat Bupati Toba Samosir, mengatakan, ada keunikan tak kala rombongan singgah di Sipirok dan melakukan ibadah Perayaan Wafatnya Isa Almasih, atau biasa disebut Perayaan Jumat Agung.

Kata Monang, di Komplek HKBP Sipirok masih terdapat bekas bangunan sekolah dan sebuah rumahsakit yang kini dikelola oleh Pemkab Tapanuli Selatan. Di gereja yang tergolong tua berusia sekitar 147 tahun ini rombongan disambut oleh Walikota Padang Sidempuan, kemudian dilepas oleh Bupati Tapanuli Selatan Drs H Ongku PH, MM.

"Walikota Padang Sidempuan Drs H Zulkarnain Nasution menyambut baik napak tilas ini, dan ia memang menyatakan ingin menunjukkan bahwa daerah kita adalah daerah yang selalu menjunjung tinggi Pancasila," ucap Monang, tak kala beraudiensi dengan Pemimpin Umum harian *Sinar Indonesia Baru (SIB)*, GM Panggabean, di Medan Selasa (13/3).

Napak Tilas diakhiri dengan melaksanakan Kebaktian Paskah Minggu 8 April, di Gereja HKBP Dr.I.L. Nomensen, Sigumpar diikuti sekitar 5.000 jemaah dipimpin oleh Eporus HKBP Pdt. Dr. Bonar Napitupulu. ■ HT

Konferda PGRI Kukar Harus Diulang

Demi masa depan para guru di Kabupaten Kutai Kartanegara, Konferda harus diulang. Konferda yang lalu tidak demokratis dan sarat dengan kecurangan.

Hasil Konferensi Daerah (Konferda) Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong yang menetapkan Drs.H.Abdul Thalib, MM sebagai Ketua PGRI Kukar, kini digugat oleh sejumlah anggota DPRD setempat. Gugatan ini antara lain dilontarkan Marwan, SP dari PAN, Ir.Marten Apuy dari PDI-P, Zainuddinsyam dari Partai Golkar serta H.Suriadi, S.Hut. dari PK Sejahtera. Mereka menilai proses pemilihan tersebut diwarnai kecurangan termasuk dengan mengebiri calon lain, Drs.H.Sutopo Gasip, M.P.

Mereka sangat memprihatinkan tindak kecurangan tersebut. Proses pemilihan tidak etis dan demokratis dan sangat bertentangan dengan

upaya memperjuangkan nasib dan kepentingan para guru di masa depan. Mereka menengarai bahwa ajang pemilihan telah dimanfaatkan oleh sejumlah oknum sebagai sarana untuk meraih kepentingan pribadi yang pada gilirannya akan menghambat pelaksanaan Program PGRI di kabupaten ini.

Marwan, SP mengungkapkan, bahwa demi masa depan PGRI Kabupaten Kutai Kartanegara, maka Konferda harus diulang. Konferda harus diselenggarakan secara demokratis tanpa intervensi dari pihak luar. "Konferda tersebut sebenarnya ditolak oleh 9 PGRI Kecamatan, karena tidak mencerminkan azas demokrasi," tegas Marwan SP.

Zainuddinsyam melontarkan pendapat senada. Ia menilai Konferda yang lalu itu banyak diwarnai tindakan tak terpuji. Sebagai contoh ia menunjuk diskualifikasi Sutopo Gasip, yang

sangat diprotes oleh 9 PGRI Kecamatan. Menurutnya, Konferda harus diulang. "Jika tidak, PGRI Kukar bubar saja," tandasnya.

Proses pemilihan ketua PGRI kabupaten Kutai Kartanegara tidak fair karena itu harus diulang, tegas Marten Apuy. "Kalau proses pemilihannya tidak sesuai dengan mekanisme serta memaksakan Abdul Thalib sebagai ketua, apa mungkin roda organisasi masih berjalan baik," ia balik bertanya.

Sementara Suriadi menilai, jika proses pemilihan sudah melanggar aturan, bagaimana mereka yang terpilih bisa memperjuangkan seluruh kepentingan para guru se Kukar, ujarnya.

Drs.H.Sutopo Gasip, M.Pd, sebenarnya siap untuk menang dan kalah. Tapi, ia tidak bisa terima hasilnya karena proses pemilihan tidak sehat," ujarnya. ■ SMB/SBR

Silih Silang di Akhir Jaba

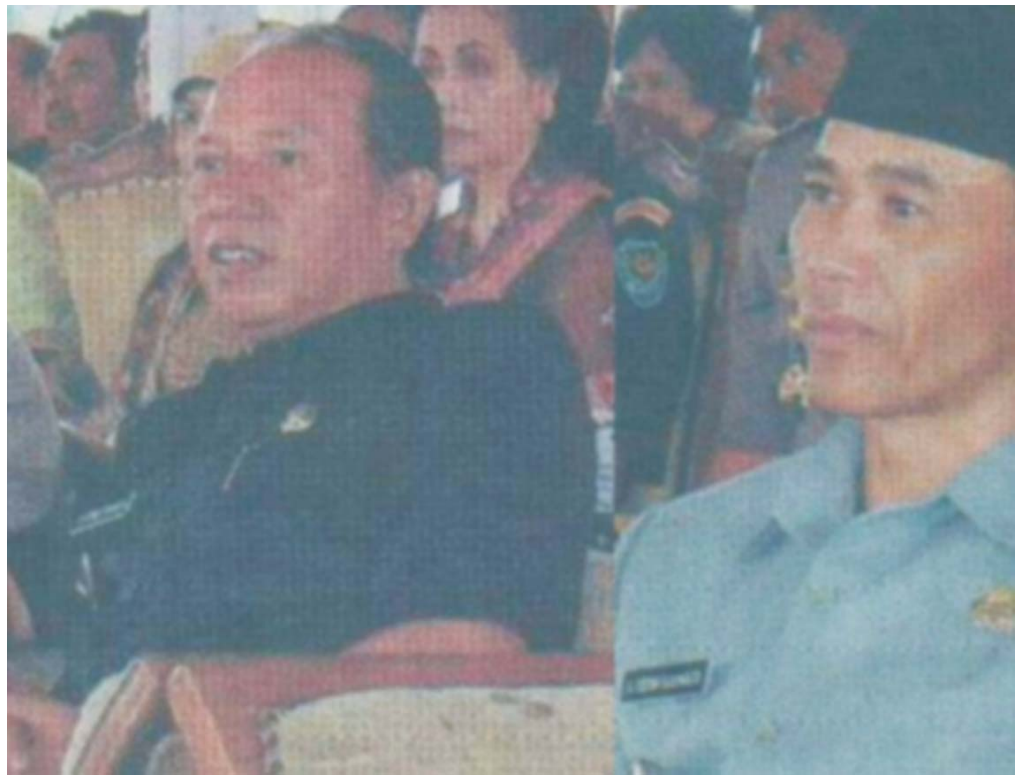
Duet kepemimpinan pemerintah Kota Cimahi terlibat perseteruan di penghujung jabatan. Sebuah suguhan ironi yang jadi tontonan masyarakatnya.

Kedudukan pemimpin ibarat berdiri di puncak bukit yang gampang terlihat oleh kerumunan masyarakat banyak. Sekali bertindak ceroboh, maka jadi tontonan masyarakat. Tontonan inilah yang dipentaskan pimpinan Kota Cimahi, pasca menjadi daerah otonomi tanggal 18 Oktober 2001 silam. Padahal ajang Pilkada baru akan digelar pertengahan tahun 2007 nanti.

Adalah pasangan Walikota Itoc Tochija dan Wakil Walikota Dedih Djunaedi - yang seharusnya menjadi panutan dalam menegakkan panji-panji keteladanan dan kewibawaan sebagai pelayan masyarakat - justru menabuh genderang perseteruan silih sengketa soal kewenangan jabatan yang mereka sandang.

Perseteruan ini bermula dari ketidakpuasan Dedih atas pengangkatan pejabat eselon III dan IV yang berjumlah 93 orang baru-baru ini. Yang dipersoalkan bukan figur-figurnya yang tak pantas dan tak layak. Namun SK Walikota Cimahi No. 821.9/Kep.24-KKD/2007 tertanggal 13 Februari 2007, tentang Pengangkatan Pejabat Pemerintahan Kota Cimahi itu yang tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan dirinya dan dianggap menodai eksistensinya sebagai Wakil Walikota.

Mestinya kata Dedih, bila merujuk SK Walikota Cimahi No. 180/Kep. 111-Huk/2004 tertanggal 14 Agustus 2004, tentang Rincian Tugas Wakil Walikota, implementasinya



Duet Walikota Itoc Tochija dan Wakil Walikota Dedih Djunaedi.

setiap pejabat yang diangkat harus juga mendapat persetujuan dari wakil walikota.

Dengan alasan SK pengangkatan itu tidak sah dan cacat hukum, Dedih menggugat Itoc Walikota Itoc Tochija ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung terkait dengan dugaan pelanggaran SK Walikota Cimahi No. 180/Kep. 111-Huk/2004 tertanggal 14 Agustus 2004 tentang Rincian Tugas Wakil Walikota.

Dedih bahkan berencana melayangkan surat pengaduan atas tindakan Itoc tersebut kepada Presiden, Mendagri, Menpan dan Gubernur Jawa Barat serta DPRD Kota Cimahi. Dedih berkilah gugatannya itu bukan hal yang negatif. Dirinya siap menyajikan bukti-bukti di pengadilan bila Itoc (walikota, *red*) memintanya.

Balik Mengancam

Gerah dengan tindakan De-

dih, para pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemkot Cimahi yang baru saja mendapat mutasi dan promosi berdasarkan SK yang disoalkan Dedih tersebut tak kalah bermanuver. Mereka merapatkan barisan, balik menebar ancaman kepada Dedih. Bentuk keberatan mereka diwujudkan dalam pernyataan sikap yang ditandatangani 49 pejabat eselon III dan IV melalui redaksi PR, Minggu (11/3).

Masih tulisan PR, Kabid Kecamatan Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Kota Cimahi, Kardin Panjaitan SH menyatakan, pengangkatan dan pelantikan pejabat sudah sah secara hukum lantaran sesuai dengan UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 8/1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian jo UU No. 43/1999 tentang Perubahan atas UU No. 8/1974. Bahkan Kardi Panjaitan menegaskan bahwa hal itu telah melalui proses dan mekanisme pembahasan di Badan Per-

timbangan Jabatan dan Kepegawaian (Baperjakat).

"Berdasarkan PP 9/2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian PNS, pengangkatan dan pelantikan pejabat eselon III dan IV kewenangannya ada pada walikota, bukan wakil walikota," ujar Kardin.

Keputusan Dedih mendaftarkan gugatannya ke PNBB juga meresahkan dan membuat gerah PNS di lingkungan Pemkot Cimahi. Tindakannya, kata Kardin, sangat tendensius dan merugikan secara moril maupun materil para pejabat.

Dedih pun diminta mencabut pernyataan hukum di media massa dan mencabut tuntutan di PNBB dalam tempo waktu 3 x 24 jam. Bila tidak, selain akan menggugat balik, Mereka siap mengadakan Dedih kepada Mendagri agar dicopot dari jabatannya sebagai wakil walikota.

Walikota Cimahi Itoc Tochija menyambut dingin ulah wakilnya itu. Baginya, apa

tan

yang dilakukan Dedih adalah sah-sah saja. "Namun, sikap seperti itu sebaiknya diselesaikan secara intern. Tapi ini sudah terlanjur terbuka. Saya tidak merasa diri saya lucu sehingga tidak akan membuat lelucon ini" ujarnya kepada PR.

Ditanya kemungkinan rekonsiliasi dengan Dedih, Itoc hanya senyum. "Seperti anak kecil saja. Tapi, itu bisa dilakukan tanpa perlu mediator dari luar. Tenangkan dulu emosi, baru diselesaikan secara pribadi," ujarnya.

Di tengah runyamnya hubungan Itoc-Dedih, rupanya walikota yang diusung oleh Partai Golkar itu, tak menyembunyikan kenangan saat memutuskan menjadi pasangan pada Pemilu 2002 lalu, Itoc mengakui memiliki kenangan indah dengan Dedih.

Kini partai Golkar Kota Cimahi kembali mengusung Itoc Tochija dalam Pilkada langsung Kota Cimahi bulan Oktober 2007 nanti.

Dalam soal ini, entah siapa yang layak dijadikan kambing hitam dan pantas ditunjuk batang hidungnya sebagai pihak yang pertama kali mengobarkan api yang memanaskan suhu politik di Kota Cimahi.

Konflik dan disharmoni antara Walikota Itoc Tochija dan Wakilnya Dedih Djunaedi mengundang keprihatinan dari Good Governance Watch (GGW), sebuah LSM yang mengkaji masalah tata kelola pemerintahan Kota Cimahi. Apalagi perseteruan ini menurut Edi Rudiana, salah satu anggota LSM tersebut sudah terlanjur menjadi konsumsi publik dan ditengarai sudah masuk ke wilayah politik praktis. Bahkan bisa saja ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu yang berniat mengambil keuntungan dari kemelut ini.

Untuk itu GGW menyarankan agar polemik ini segera dihentikan dan tidak berorientasi kepada hak semata. Seluruh pihak yang bertikai agar melakukan introspeksi. ■ PC, AW



Pangdam III Siliwangi dan Kapolda Jabar.

Kodam III Siliwangi Dukung Penghijauan Kota Bandung

Bandung terus bersolek mempercantik diri. Kawasan Stadion Siliwangi terus dibenahi dan dihijaukan. *Bobotoh* diharapkan turut menjaga dan memelihara keasrian kota.

Pemko Bandung telah mempersiapkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 6,91 % dari total luas kota Bandung yang mencapai 16,729 hektar. Keasrian dan keindahan kota terus ditingkatkan dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Kali ini, jajaran Kodam III Siliwangi diajak untuk menghijaukan kota. Sekitar 600 prajurit dari sejumlah kesatuan dibantu Ormas dan *bobotoh*, telah menanam 434 pohon produktif dan pelindung di kawasan Stadion Siliwangi.

Kegiatan ini merupakan lanjutan Program Bandung Hijau 2006 yang dicanangkan oleh Menteri Kehutanan beberapa waktu lalu guna mewujudkan areal penghijauan minimal 55 % dari total kawasan.

Tidak tanggung-tanggung, gerakan yang dilangsungkan di daerah hijau militer tersebut, yakni di Stadion Siliwangi, Selasa (14/3) dipimpin langsung oleh dua jenderal berbintang dua masing-masing Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI George Toi Sutta dan Kapolda Jabar, Irjen Pol Soenarko DA. Kegiatan "Gebyar Penghijauan Stadion Siliwangi" tersebut juga turut dihadiri Sekda Pemprov Jabar, Lex Laksamana, Kapolwilatbes Bandung, Kombes Pol Bambang Suparsono, dan Dandim 0618/BS Bandung, Letkol (Art) Dwi Jati Utomo.

Stadion Siliwangi merupakan salah satu etalase budaya dan olahraga populer yang menjadi kebanggaan masyarakat Kota Bandung. Sarana olahraga ini sangat identik dengan eksistensi Persib, kesebelasan sepakbola kebanggaan Kota Bandung dan Jawa Barat. Lebih dari itu, stadion beserta lingkungannya juga merupakan asset RTH yang harus lebih optimal fungsinya, khususnya dalam menopang peningkatan kualitas alam dan lingkungan hidup di Kota Bandung.

"Ini mengharuskan Stadion Siliwangi senantiasa terpelihara dengan baik serta didukung estetika

lingkungan yang asri," tandas Walikota Bandung H. Dada Rosada SH, Msi.

Dada menjelaskan, penataan dan penghijauan Stadion Siliwangi masih memungkinkan. Ini sangat penting guna meningkatkan nuansa estetik dan kesejukan serta kesegaran di sekitar kawasan stadion ini. "Kami sangat bersyukur, Bapak Panglima Kodam III Siliwangi beserta jajaran, memberikan dukungan sangat besar terhadap revitalisasi lingkungan hidup Kota Bandung," kata Dada.

Kepedulian terhadap gerakan penghijauan yang dilakukan oleh keluarga besar TNI bukan yang pertama kali. Sebelumnya, Keluarga besar Kodam III Siliwangi termasuk Kodim 0618/BS turut menyukseskan Gerakan Cikapungdung Bersih (GCB), penanaman sejuta pohon di Punclut Ciumbuleuit dan Taman Tegal-lega. Termasuk penanganan masalah sampah yang dibuang ke Cikubang, di atas lahan milik Kodam III Siliwangi. Demikian pula pembangunan PLTS yang akan datang di Gedebage.

"Hal ini memberi kesan bahwa Kodam III Siliwangi dan Kodim 0618/BS sama-sama memiliki kebanggaan terhadap Kota Bandung. Bahkan kami menilainya, sebagai bentuk kemanunggalan TNI dan rakyat secara konkrit, serta patut ditumbuhkembangkan dalam bidang pembangunan lainnya," kata Walikota.

Sedangkan Pangdam III Siliwangi, George Toi Sutta menyatakan Tuhan telah menganugerahkan alam dan lingkungan Kota Bandung yang indah. Ia pun mengungkapkan bahwa sejak kecil telah merasakan kesejukan dan kesegaran udara "Paris van Java" Bandung.

Dandim 0618/BS Kota Bandung, Letkol (Art) Dwi Jati Utomo selaku koordinator lapangan mengemukakan, kegiatan yang diprakarsai Pangdam III Siliwangi ini, selain akan menambah ruang hijau sebagai hutan kota, secara tidak langsung akan lebih memotivasi kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup di perkotaan. ■ AW, DN, SBR

China Sedang Membangun Kerajaan

Tampaknya, China tengah berusaha membangun kembali kerajaan Mongol modern. Pembangunan sistem pertahanan selama satu setengah dekade terakhir berhasil menempatkan China menjadi salah satu dari empat negara terkuat di bidang pertahanan.

Menyikapi postur sistem pertahanan militer China dewasa ini, wajar jika banyak negara yang merasa was-was. Kecurigaan itu relevan dengan kondisi riil kekuatan militer China yang mengalami peningkatan sangat signifikan sejak tahun 1990-an. Dewasa ini, China menjadi salah satu negara dengan kekuatan militer yang harus diperhitungkan di dunia.

Walau tidak mengembangkan persenjataan nuklir seperti Korea Utara, India, Pakistan, dan Iran —seperti yang dituduhkan Amerika Serikat, langkah-langkah China memperkuat sistem pertahanan militernya dewasa ini, tidak urung memancing kecurigaan dari berbagai negara, khususnya negara-negara di kawasan Asia Timur. Bahkan, Amerika Serikat menyebut China sebagai ancaman baru bagi peradamaian dunia.

Kekhawatiran AS itu, tentu dapat dibenarkan. Selain tidak cukup beralasan untuk mengembangkan sistem persenjataan militer, langkah-langkah China memperkuat sistem pertahanan militernya akan dengan sendirinya mendorong terjadinya perlombaan senjata di kawasan Asia. Alhasil, kawasan Asia yang sebelumnya adem ayem akan memanas dan menjadi kawasan yang hiruk pikuk dengan perlombaan senjata.

Senjata Antisatelit dan Kapal Induk

China mulai memperlihatkan keseriusan membangun kekuatan militernya sejak tahun 1990 melalui peningkatan

alokasi anggaran belanja militer yang terus membesar setiap tahunnya. Menurut laporan AP, AFP, dan BSW, seperti dikutip Harian *Kompas*, Senin (5/3), China terus menerus meningkatkan anggaran militernya.

Tahun 1994, misalnya, anggaran militer China mengalami peningkatan sebesar 18%, dan tahun 1995 mengalami kenaikan drastis hingga 21%. Mungkin, jika dinominalkan, kenaikan anggaran militer tahun 1994 dan 1995 tersebut tidak cukup banyak, mengingat PDB dan APBN China saat itu masih tergolong rendah.

Namun setelah mengalami pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 8%-10% per tahun dalam satu dekade terakhir, kenaikan beberapa persen saja dari anggaran militernya akan menghasilkan jumlah anggaran yang sangat besar. Oleh karena itu, peningkatan anggaran militer sebesar 12,6% tahun 2005 dan 14,7% pada tahun 2006, sudah barang pasti menghasilkan jumlah anggaran yang sangat besar.

Tidak mengherankan jika sistem pertahanan China sudah mampu memiliki senjata antisatelit. Bahkan seperti dilaporkan surat kabar Hongkong *Wen Wei Poyang* dikutip Harian *Kompas*, Kamis (8/3), China akan memiliki kapal induk pertama dalam tiga tahun ke depan. "Sepengetahuan saya, proses pembangunannya berjalan lancar dan jika kita bisa lebih cepat, maka kita bisa menyelesaikan pekerjaan itu pada 2010," kata seorang pejabat militer senior China.

Hingga kini, masyarakat



Modernisasi pertahanan militer China dikhawatirkan dunia internasional.

internasional masih terus bertanya-tanya ke arah mana China akan membawa modernisasi pertahanannya. Yang pasti, tahun 2007 ini China kembali meningkatkan anggaran militernya sebesar 17,8%. Persentase ini menghasilkan angka tambahan anggaran militer China untuk tahun 2007 saja sebesar 350,92 yuan atau 44,94 miliar dolar AS atau setara dengan 400 triliun rupiah. Artinya, tambahan anggaran militer China dalam satu tahun anggaran ini lebih dari setengah jumlah APBN Indonesia.

Memicu Kekhawatiran Masyarakat Internasional

Langkah-langkah China yang terus meningkatkan ang-

garan militernya telah memicu kekhawatiran masyarakat internasional. Amerika Serikat sendiri menganggap China telah membangun angkatan bersenjata yang mengancam keamanan kawasan. Dalam kunjungannya ke Australia, seperti dilaporkan Harian *Kompas*, Rabu (28/2), Wakil Presiden Amerika Serikat Dick Cheney mengatakan pembangunan militer China tidak konsisten dengan niatnya untuk menjadi kekuatan global yang damai.

Uji coba persenjataan anti-satelit oleh China pada 11 Januari 2007, menurut Cheney merupakan pertanda akan semakin sulitnya mencegah China untuk mengembangkan senjata angkasa luar. Namun

an Mongol Modern



foto: repro gatra



foto: repro time

Dick Cheney: China tidak konsisten dengan niatnya.

kekhawatiran itu dibantah China dengan menandakan bahwa China tetap akan berperan sebagai kekuatan damai. "China taat pada jalan perdamaian dan kami merupakan kekuatan penting untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di dunia maupun kawasan," kata juru bicara kementerian luar negeri China, Qin Gang.

Qin Gang menambahkan, peran China yang positif dan penting dalam isu nuklir Korea Utara, merupakan bukti nyata. Demikian juga dalam memanfaatkan angkasa luar secara damai, sikap China menurut Qin Gang, selalu konsisten, seperti halnya penentangan China terhadap perlombaan pembangunan senjata di luar angkasa.

Kerajaan Mongol Modern

Jika merunut kembali sejarah China pada abad ke-14 dan abad-15, bisa jadi pemerintah China dewasa ini tengah berusaha membangun kembali Kerajaan Mongol modern. Ini terlihat dari upaya keras China agar menjadi yang terdepan di dunia, seperti halnya kerajaan Mongol pada abad ke-15 yang berhasil menginvasi separuh wilayah dunia dan menjadikannya daerah koloni.

Para pemimpin negeri tirai bambu dewasa ini, sejak Mao Zedong hingga Hu Jintao, sepertinya terobsesi mengikuti langkah-langkah para pemimpin kerajaan Mongol seperti Timur Lang, Jenghis Khan, dan Kublai Khan yang me-

mimpin Mongol dengan politik ekspansif. Mereka berusaha membangun China yang kuat dari sisi pertahanan dan ekonomi agar dapat menancapkan pengaruh dalam pegaulan internasional.

Bisa jadi, jika benar-benar memiliki kekuatan dari sisi pertahanan dan ekonomi, China bukan tidak mungkin menjadi kekuatan adi daya baru yang berhadapan dengan Amerika Serikat. Bahkan bukan tidak mungkin politik ekspansi pertahanan militer China dapat kembali membawa dunia ke arah politik poros-porosan, seperti yang terjadi pasca perang dunia kedua yang menghadirkan Rusia dan Amerika Serikat sebagai dua negara super power.

Jika China berobsesi menjadi salah satu kekuatan super power, tampaknya perwujudan ambisi itu hanya tinggal selangkah lagi. Saat ini China telah berhasil mengukuhkan diri sebagai kekuatan ekonomi nomor tiga di dunia setelah AS dan Eropa. Pengaruh ekonominya sudah merambah ke berbagai belahan dunia termasuk ke AS.

Bahkan berbagai negara berkembang, yang selama ini mengandalkan Eropa dan AS sebagai sumber pinjaman, kini sudah beralih ke China. Dalam kondisi demikian, sedikit banyak akan memberi kesempatan bagi China untuk mempengaruhi kebijakan politik berbagai negara yang menjadi debitornya. ■ MH

Sekarang Giliran Laks

Kasus penjualan kapal tanker VLCC Pertamina menyeret mantan Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi. Bersifat politis?

Laks, sapaan akrab Mantan Menteri Negara BUMN itu, dimintai keterangan jaksa penyidik Bagian Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Jumat (16/3), terkait penjualan dua tanker *very large crude carrier* (VLCC) PT Pertamina.

Kompas, 17 Maret 2007, mengutip pernyataan Laks bahwa penyelidikan yang dilakukan Kejaksaan agak bersifat politis, karena dilakukan atas permintaan DPR dan Panitia Khusus (Pansus) Penjualan VLCC DPR.

Bulan Maret 2005, Meneg BUMN Sugiharto resmi menyerahkan proses penyelidikan penjualan VLCC Pertamina ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejak itu KPK menyelidiki perkara tersebut. Berikutnya, DPR membentuk Pansus Penjualan VLCC. Hasil Pansus yang disetujui Rapat Paripurna DPR diserahkan ke Kejaksaan dan KPK pada 2 Februari 2007 untuk ditindaklanjuti.

Namun, seperti yang dilaporkan kemudian oleh *Kompas*, 23 Maret 2007, tim penasihat hukum Laks menyesalkan pernyataan Hendarman Supandji tentang adanya unsur melawan hukum, kerugian negara dan menguntungkan

orang lain dalam kasus tersebut. Pasalnya, pemeriksaan saat ini masih tahap penyelidikan untuk menentukan apakah penjualan VLCC itu delik korupsi atau bukan.

Plt JAM Pidsus Hendarman Supandji menyatakan, Kejaksaan mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan penjualan VLCC itu sebagai alat bukti, termasuk pendapat majelis kasasi Mahkamah Agung yang menilai alasan alur kas Pertamina dan rencana eksekusi oleh PT Karaha Bodas Company tak cukup untuk menjual VLCC.

Dikutip harian tersebut pada edisi 17 Maret, Hendarman menyatakan ada kerugian negara, karena VLCC dijual murah. Namun perbuatan melawan hukum masih harus dirumuskan, apakah ada yang masuk ke kantong-kantong pejabat.

Koran Tempo yang terbit di hari yang sama mengulas, kedua VLCC itu dibeli Pertamina pada 2002, seharga 65 juta dolar AS. Dua tahun kemudian, keduanya dijual dengan harga 184 juta dolar AS.

Pada 2005, Komisi Pengawas Persaingan Usaha memutuskan Pertamina bersalah merugikan negara karena harga penjualan itu lebih rendah dari harga pasar, yaitu 102 juta



foto: repro kompas

Kejakgung belum menyimpulkan adanya tindak pidana korupsi

dolar AS per unit.

Menurut Laks, penjualan itu usul dari direksi Pertamina karena kondisi kas perusahaan yang memburuk. Dari penjualan itu, Pertamina justru mendapat untung 53 juta dolar

AS, sehingga menurut Laks, tidak ada kerugian dari Pertamina atau pemerintah.

Kejakgung sendiri memang belum menyimpulkan kasus penjualan dua VLCC pada 2004 tersebut. ■ RH

Tommy dan Dua Menteri

Dana milik Tommy Soeharto di Bank Paribas cabang Guernsey tidak bisa dicairkan begitu saja. Berbeda dengan dananya di Bank Paribas cabang London yang dengan mudah dicairkan atas rekomendasi petinggi Departemen Hukum dan HAM.

Ribut-ribut soal duit Tommy ini semakin hangat diberitakan di media massa, apalagi melibatkan dua pejabat tinggi pemerintah, yakni Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra dan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin

Yang paling gencar memuat laporannya adalah majalah *Tempo*. Setidaknya dalam dua

edisinya berturut-turut, secara bergantian mengupas habis keterlibatan dua menteri tersebut dalam kasus ini. *Tempo*, edisi 12-18 Maret 2007, mengupas keterlibatan Menteri Yusril. Alasan Yusril yang dimuat dalam laporan wawancara *Tempo*, rekomendasi yang dikeluarkan Departemen Hukum dan HAM (dulu Departemen Kehakiman dan HAM) yang kala itu dikomandani adalah, karena dia sudah mendapat penjelasan dari Kejaksaan Agung, Bank Indonesia, Pengadilan Tinggi DKI Jaya dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahwa uang itu bukan hasil

korupsi.

Tempo edisi 19 Maret 2007, khusus menyoroti kiprah Menteri Hamid yang meneruskan jabatan Yusril sebagai Menteri Hukum dan HAM dalam kasus ini. Pernyataan Hamid yang terkenal adalah "Uang Tommy itu halal."

Dalam laporan *Tempo*, Menteri Hamid diketahui mengirimkan dua surat kepada Bank Paribas cabang London dan Bank Paribas cabang Guernsey, yang meminta agar uang Motorbike, perusahaan Tommy, dikirim ke rekening Menteri Hukum dan HAM, dalam bentuk dolar AS. ■ RH

Pil Pahit dari Cayman Islands

Pertamina harus membayar klaim berikut denda senilai 315 juta dollar AS.

Kalah. Begitulah nasib yang harus diterima Pertamina dalam langkah hukum penyelesaian kasus Karaha Bodas. Diberitakan media, pengadilan Cayman Islands telah mengeluarkan keputusan yang menguatkan keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dan Badan Arbitrase Internasional di Jenewa, Swiss, bahwa Pertamina terbukti bersalah.

Koran Tempo dan Republika, 17 Maret 2007, melaporkan Pertamina harus membayar klaim berikut denda senilai 315 juta dollar AS kepada Karaha Bodas Company. Nilai tersebut setara dengan Rp 2,9 triliun dengan kurs Rp 9.200 per dollar AS.

Mengutip Direktur Pertamina Ari Soemarno, Pertamina sudah tak bisa berbuat banyak lagi karena keputusan dari perkara perdata itu sudah final. Karaha berhak mencairkan rekening Pertamina di Bank of America yang dibekukan pengadilan sebelumnya.

Kompas yang terbit pada hari yang sama mengutip keterangan Direktur Keuangan Pertamina Frederik Siahaan, yang mengatakan klaim dan denda tersebut sudah dicairkan pengadilan.

Selain itu, awal Maret lalu, pengadilan New York mengeluarkan keputusan yang melarang Pertamina melanjutkan gugatan atas adanya unsur penipuan dalam kasus Karaha Bodas ke pengadilan Cayman Islands. Pertamina berupaya mengajukan banding atas keputusan pengadilan New York tersebut.

Berdasarkan rapat koordinasi dengan Menteri Keuangan pada 28 Februari, pemerintah akan menalangi kewajiban Pertamina kepada Karaha Bodas. Kewajiban tersebut tetap diperhitungkan sebagai utang PT Pertamina kepada pemerintah yang mekanisme pengembaliannya akan diatur kemudian.

Sementara itu, berdasarkan rapat, PT Pe-



Total dana yang dicairkan pengadilan tersebut sebesar 319 juta dollar AS.

foto: berindo wilson

rusahaan Listrik Negara dibebaskan dari kewajiban ikut menanggung denda tersebut.

Kasus ini berawal ketika pemerintah memutus kontrak Karaha Bodas Company, kontraktor Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Karaha, pada 1997. Proyek tersebut dihentikan karena krisis moneter. Akibatnya pembembang Karaha mengajukan gugatan arbitrase internasional pada 1999 karena menilai Indonesia melanggar kontrak.

Pada tahun 2000, arbitrase internasional memutuskan Pertamina harus membayar klaim yang diajukan Karaha senilai 261 juta dollar AS. Klaim ini dikenai

bunga 4 persen per tahun.

Pertamina lalu mengajukan permohonan banding atas putusan arbitrase internasional di pengadilan Amerika. Namun pengadilan di Amerika menguatkan putusan arbitrase internasional.

Akibat proses hukum tersebut, dana hasil penjualan minyak dan gas di Bank of America dan Bank of New York dibekukan atas perintah pengadilan setempat.

Pemegang saham Karaha Bodas Company adalah Caithness Energy, Florida Power & Light, Tomen Corp., serta PT Sumarah Dayasakti sebagai mitra lokal. ■ RH

Kronologi Kasus Karaha Bodas

- ▶▶ 1997, Proyek Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Karaha Bodas bersama dengan proyek listrik swasta lainnya dibatalkan oleh pemerintah.
- ▶▶ 2002, Karaha Bodas Company (KBC) menggugat Pertamina ke arbitrase internasional

- di Swiss dan menang. Pertamina harus membayar 261 juta dollar AS.
- ▶▶ Pertamina keberatan atas putusan tersebut dan melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- ▶▶ KBC juga mengajukan arbitrase ke pe-

- ngadilan di Amerika Serikat
- ▶▶ 2007, Mahkamah Agung AS menyatakan, Pertamina dan Pemerintah Indonesia tetap harus membayar denda, jumlahnya sudah mencapai 265 juta dollar AS.



Keterbatasan anggaran memaksa pengadaan armada pesawat diprioritaskan pada kapal angkut.

TNI menghadapi dilema dengan keterbatasan alutsista yang dimiliki. Karena tak mampu sepenuhnya menjaga wilayah-wilayah rawan. Akibatnya, pencurian sumber daya alam seperti pengerukan pasir darat, penyelundupan timah, pencurian ikan dan kayu yang merugikan keuangan negara masih terus terjadi hingga kini.

Masalah kerawanan dan dilema yang dihadapi TNI tersebut terungkap dalam seminar bertajuk "Air Power" yang digelar dalam rangka peringatan 61 tahun TNI-AU di Jakarta beberapa waktu lalu. Adalah Menhan Juwono Sudarsono yang mengemukakan persoalan itu terkait dengan keterbatasan anggaran guna memenuhi kebutuhan alutsista TNI.

Sebab meskipun sudah berupaya menjaga wilayah-wilayah rawan, tetapi masih banyak celah yang belum sepenuhnya bisa ditutup. "Ini dilema. Semua coba dijaga meski belum bisa 24 jam penuh," paparnya di depan peserta seminar.

Terkait dengan keterbatasan anggaran TNI, Juwono memperkirakan dalam kurun waktu 10 s/d 20 tahun kedepan, pe-

merintah Indonesia belum bisa mengembangkan armada pesawat untuk kekuatan pemukul (*strike force*). Anggaran yang ada akan diprioritaskan kepada pengadaan pesawat dan kapal angkut.

Dia mengilustrasikan anggaran pemerintah yang terbatas dan dimiliki saat ini ibarat bejana dengan tiga saluran. Saluran pertama untuk sektor politik, hukum dan keamanan. Saluran kedua, untuk sektor kesejahteraan rakyat sedangkan saluran ketiga untuk sektor perekonomian. "Kalau aliran dana untuk keamanan diperbesar, hal itu akan berdampak sangat besar pada masalah kesejahteraan rakyat, seperti pendidikan dan kesehatan. Untuk itu, kita harus bisa-bisa memanfaatkan alokasi yang ada," ujar Juwono.

Kepala Staf Angkatan Udara

Marsekal Herman Prayitno, menyebutkan, pihaknya mendukung rencana pemerintah yang menetapkan konsep Tri Matra Terpadu dalam merencanakan pembelian pesawat maupun senjata. Menurutnya, hal itu bisa diterapkan untuk pengadaan pesawat angkut jenis tertentu seperti CN-235 produksi PT Dirgantara Indonesia maupun pesawat sekelas Casa.

Menurut Juwono, dalam rencana strategis pertahanan, transportasi diberi jatah 70 persen sementara alat pukul seperti jet tempur dan kapal perang hanya 15-20 persen. Alasannya, alat transportasi berguna untuk situasi darurat seperti bencana alam.

Kebijakan tersebut mengundang kritik seorang perwira menengah TNI AU peserta seminar. Katanya, kebutuhan pesawat transportasi dalam kondisi darurat sebenarnya bisa diisi pesawat dari maskapai nasional. "Kalau pesawat tempur bisa punya dua fungsi, *deterrent* (penggentar) dan penindakan. Kalau pesawat transportasi bisa menyewa, lebih murah daripada membeli," kata sang perwira.

Anggaran pertahanan Indonesia saat ini memang hanya 1

persen dari produk domestik bruto (PDB) dan kurang dari 5 persen APBN atau sekitar Rp 35 triliun. Berbeda jauh bila dibandingkan dengan negara tetangga, memiliki anggaran pertahanan sekitar 3-5 persen PDB. Walaupun anggaran yang dialokasikan sedikit naik, namun secara utilitas dan efektivitas operasional menurun akibat kenaikan beban pemeliharaan alat utama sistem persenjataan (Alutsista). Juwono mengakui anggaran yang dimiliki TNI sekarang ini paling terendah di tingkat Asia Tenggara.

Hal senada juga diutarakan Panglima TNI, Marsekal Djoko Suyanto. Dia pun menyatakan TNI lamban memperbaharui perseniannya yang sudah tua. "Kita terlalu lama terlenu. *Masak* panser buatan tahun 60-an masih kita pakai. Seharusnya sudah kita perbaharui," jelas Djoko seperti dikutip *Republika* (22/3).

Pengamat militer dari Universitas Indonesia, Andi Wijdjanto, dalam catatannya menyebutkan, kesiapan rata-rata skadron angkut TNI AU mencapai 45 persen, skadron helikopter hanya 40 persen, dan skadron pesawat tempurnya lebih memprihatinkan lagi, hanya 30 persen. Lalu dari 10 buah F-16, hanya 4 buah yang siap. Pesawat Hawk 100/200 yang relatif baru pun hanya 9 dari 35 pesawat yang siap. Hanya sukhoi yang siap 100 persen, itu pun hanya empat buah. "Saat ini, kekuatan nyata TNI AU masih jauh di bawah kekuatan minimum yang dibutuhkan," kata Andi. Setidaknya TNI AU membutuhkan 11 skadron tempur, namun hanya ada 7. Juga membutuhkan 10 skuadron angkut dan 30 skuadron radar namun hanya tersedia separuhnya. Memang keadaan seperti ini mengundang dilema. ■ AM, SP

KRI Mandau Ringkus Kapal Ikan China

KRI Mandau-621 yang melakukan patroli berhasil menangkap tiga kapal ikan China yang melakukan pencurian ikan sebanyak 90 ton di perairan Indonesia. Ketiga kapal itu, Liao Dagan Yu 8989, Liao Dagan Yu 15126 dan Liao Dagan Yu 15127, ketika akan ditangkap berusaha

melarikan diri ke perbatasan perairan Australia. Namun akhirnya berhasil diringkus setelah dilakukan pengejaran selama dua jam.

Komandan KRI Mandau-621 Mayor Laut (P) Yayan Sofyan menyatakan, penangkapan itu dilakukan karena ketiga kapal asing itu melanggar

UU Perikanan, Pelayaran dan Keimigrasian. Sebagaimana diberitakan *Sinar Harapan* (22/3), setelah diperiksa, ketiga kapal itu ternyata tidak memiliki surat ijin berlayar (SIB), tidak punya *crew list* dan surat laik oprasi (SLO). Ketiganya juga tidak mempunyai surat kemudahan khusus keimigrasian. ■ AM, SP

Berlomba Korupsi

Pemberantasan korupsi di Indonesia masih belum menggembirakan. Komitmen tidak diikuti dengan pelaksanaan. Pemerintah dinilai masih setengah hati. Lembaga yang seharusnya memberantas korupsi malah memelihara budaya korup. Kini saatnya masyarakat berani bersikap.

Tajuk rencana berbagai harian nasional mengulas tentang korupsi di tanah air. Merujuk hasil survei indeks persepsi korupsi yang diselenggarakan Transparency International Indonesia (TII), Oktober-Desember 2006, di 32 kota dan kabupaten, dengan 1.760 responden pelaku usaha sektor industri formal, tajuk Harian *Media Indonesia* (3/3) menyimpulkan, masih panjang dan jauh jalan yang harus ditempuh bangsa ini untuk memiliki negara yang bersih dari korupsi. Soalnya, menurut survei tersebut, korupsi paling parah justru terjadi di lingkungan peradilan. Survei itu menggarisbawahi, bahwa di peradilan, inisiatif meminta suap itu dipuji. Artinya, korupsi dipandang memiliki nilai positif. Jadi menurut *MI*, mafia pradilan tidak hanya masih terus berlangsung, tetapi dengan proaktif dipelihara dan dikembangkan.

Tajuk Harian *Republika* (1/3) juga menyoroti hasil survei TII. Harian ini menyimpulkan, bahwa tingginya komitmen kepala daerah untuk pemberantasan korupsi tidak diwujudkan dalam keseharian. Dari sisi komitmen dan peraturan, tulis *Republika*, sudah sangat mencukupi bagi pemberantasan korupsi. Hati tak ingin korupsi, aturan pun membatasi. Tapi kenapa korupsi terjadi juga. Aparat penegak hukum mestinya bisa menangkap dan menghukum pelaku korupsi, namun nyatanya melempem. Bahkan menurut hasil survei TII, bahwa polisi, hakim, jaksa, maupun aparat bea cukai dan imigrasi, yang mestinya berada di barisan depan pemberantasan korupsi, justru jadi bagian dari mata rantai korupsi.

Bangsa Indonesia seolah-olah terpenjara oleh situasi ini. Penjara yang dibangun oleh budaya aparat itu sendiri. Karena itu, mereka tidak boleh lagi mengeluhkan gaji yang kecil, karena orang yang lebih miskin jauh lebih banyak. Padahal, orang yang lebih miskin itulah yang menggaji mereka. Kini, sudah saatnya rakyat bersikap. Intinya, asingkan aparat dan pejabat yang korup dari kehidupan sosial.

Masih merujuk hasil survei TII, *Koran Tempo*, dalam tajuknya (1/3) menyebutkan, hasil survei itu menunjukkan bahwa

pemerintah setengah hati memerangi korupsi. Hal tersebut disimpulkan setelah beberapa kali melihat kebimbangan pemerintah. Seperti kasus penunjukan langsung yang melibatkan Yusril Ihza Mahendra dan Taufiequrachman Ruki yang berakhir dengan pertemuan perdamaian yang diprakarsai Presiden Yudhoyono.

Pada edisi berikutnya, tajuk *KT* (5/3) menyoroti indikasi keterlibatan Yusril dan Hamid dalam kasus korupsi belakangan ini. *KT* menyoroti Yusril Ihza Mahendra, mantan Menteri Hukum dan HAM, berkaitan dengan Zulkarnain Yunus yang telah ditahan KPK sehubungan dengan kasus pengadaan mesin sidik jari. Dan tajuk *KT* (12/3), kembali menyoroti keterlibatan Yusril dan Hamid Awaluddin, Menteri Hukum dan HAM, dalam kasus pencairan dana Tommy dari BNP Paribas.

Menurut *KT*, pemanfaatan rekening negara untuk mencairkan dana Tommy itu sangat keterlaluan. Saran *KT*, Presiden harus bersikap tegas terhadap berbagai penyimpangan itu. Tulis *KT*, Presiden SBY sudah berjanji memulai pembasmian korupsi dari lingkungan sekitarnya. Karena itu, dia wajib mendukung upaya KPK dalam menyidik kasus yang melibatkan para menterinya. KPK, institusi yang tepat menangani kasus ini, mengingat Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh berafiliasi dengan Partai Bulan Bintang, di mana Yusril pernah memimpin. Presiden perlu segera memberhentikan minimal menonaktifkan Menesneg Yusril dan Hamid selama proses penyidikan, untuk mempermudah investigasi dan mencegah kemungkinan intervensi.

Sedangkan *Kompas*, dalam tajuk (28/2) mengambil topik KKN dan *mark up*. Mengutip analisis InterCafé IPB Bogor dan Bappenas, koran sangat berpengaruh ini, menyebutkan bahwa budaya KKN belum berubah, seperti pengelembungan pengadaan barang yang masih terus berlangsung. *Kompas* menyebutkan, dengan perilaku destruktif seperti itu, sangatlah sulit untuk bisa membangun negeri ini. Kini, negeri ini sedang menghadapi sebuah lingkaran setan (*vicious circle*), padahal yang dibutuhkan putaran roda untuk membuat perekonomian bisa



menggelinding kembali.

Koran sore, juga *Suara Pembaruan* dalam tajuknya (28/2) juga mengambil topik pengelembungan anggaran belanja (*mark up*), mengutip hasil analisis InterCafé. Kajian InterCafé terhadap dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) menyebutkan, terjadi pengelembungan anggaran hingga Rp120 triliun, atau 200-300% di atas harga pasar. Pengelembungan itu dilakukan pada belanja barang oleh kementerian dan lembaga negara dalam kurun 2004-2006. Pada perkembangannya, praktik *mark up* seolah menjadi budaya. Tindakan itu seakan-akan bukan lagi sebuah kejahatan.

Menurut *SP*, disitulah titik krusial, manakala sebuah tindakan kriminal dianggap sebagai budaya. Artinya, orang tidak lagi takut atau malu melakukannya. Rendahnya tingkat kesejahteraan aparat di tengah beratnya beban ekonomi, selalu menjadi alasan pembenaran. *SP* berharap, pemerintah mampu menetapkan pagu anggaran yang jelas untuk setiap komponen belanja didasarkan pada nilai kewajaran. Sehingga menjadi panduan bagi pelaksana anggaran, untuk mengeliminasi mental *mark up* kalangan aparat pemerintah. ■ MK, SH

Siapa Saja yang akan Terpeleset?

Sejumlah menteri belakangan ini merasa gelisah karena isu negatif yang menimpa instansi maupun pribadi mereka. Desakan reshuffle pun menambah kegelisahan itu.

Isu perombakan kabinet menjadi sorotan berbagai majalah ibu kota pertengahan Maret 2007. Majalah *Gatra* (15-21/3) memokuskan liputannya pada dasarnya desakan mundur terhadap Menhub Hatta Radjasa. Menurut *Gatra*, memang bukan hanya Hatta yang didesak mundur. Nama Mensos Bachtiar Chamsyah, Menteri PDT Saifullah Yusuf juga disebut-sebut layak diganti. Namun nama yang paling sering disebut adalah nama Hatta.

Tuntutan pelengseran Hatta datang dari berbagai pihak. PKB misalnya, melalui Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar menyebut, Menhub Hatta, Mensos Bachtiar Chamsyah, dan Menteri PDT Saifullah Yusuf, layak diganti. "Tidak memiliki *sense of crisis* dan *sense of emergency*," kata Muhaimin memberi alasan.

Tuntutan yang sama juga disampaikan Dekan Fakultas ISIP UI Prof.Dr.Gumilar Rusliwa Soemantri. "Ini hanya konsekuensi politik. Kalau ingin menciptakan tradisi yang baik, Hatta memang harus mundur," kata Gumilar. Demikian juga pendapat pengamat politik dari UI, Bonny Hargens. Berbagai kecelakaan transportasi publik sudah cukup membuktikan kegagalan Hatta. Dan menurut *Gatra*, akibat maraknya kecelakaan, kini KNKT diplesetkan masyarakat menjadi, "Kalau Naik Kapal Tenggelam", "Kalau Naik Kapal terbang Terbakar", "Kalau Naik Kendaraan umum Tabrakan", "Kalau Naik Kereta-api Terguling". Sindiran ini menggambarkan betapa tidak amannya semua angkutan di Indonesia.

Isu perombakan kabinet juga jadi fokus laporan utama majalah ekonomi dan bisnis, *Trust* (19-25/3). Menurut kabar yang diperoleh *Trust*,

Menhub Hatta akan mental dari posisinya, tapi tetap dalam orbit kekuasaan. Dia bisa menempati posisi sebagai Menkominfo menggantikan Sofyan Djajil. Sedangkan Sofyan jadi Menteri BUMN. Hatta Radjasa disebut-sebut akan bersaing dengan Syamsul Muarif dan Theo L Sambuaga jadi Menkominfo.

Sofyan Djajil juga disebut akan bersaing dengan mantan Dirut Pertamina Martiono Hadianto mengisi kursi Meneg BUMN. Sementara Meneg BUMN Sugiharto diisukan sudah tak punya pijakan lagi, sebab PPP yang pernah menyokongnya tidak lagi menganggapnya sebagai wakil PPP di pemerintahan. Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro juga diisukan akan diganti. Martiono Hadianto kembali disebut-sebut sebagai penggantinya. Sedangkan Menhan Juwono Sudarsono, juga disebut akan diganti berkaitan dengan kesehatannya yang belakangan menurun. Nama Muladi, Andi Mattalata, dan Theo L Sambuaga diisukan sebagai penggantinya. Menteri PU Djoko Kirmanto juga diisukan diganti berkaitan dengan kemunduran kualitas infrastruktur setelah dia memimpin Departemen PU. Djoko diisukan akan digantikan Bambang Soeroso, anggota DPD dari Bengkulu. Mentan Anton Apriyanto juga diisukan akan diganti karena dianggap gagal melaksanakan program revitalisasi pertanian.

Sedangkan majalah *Investor* (14-28/3) memfokuskan liputannya sekitar rencana pengurangan BUMN. Perusahaan negara yang kini 139 buah itu rencananya akan dikelompokkan demi meningkatkan sinergi usaha, memangkas biaya birokrasi, dan mempermudah kontrol keuangan. Menurut Sugiharto, *rightsizing* bisa

berupa merger atau konsolidasi, pembentukan *holding*, *divestasi*, likuidasi, atau membiarkan BUMN yang sehat tetap berdiri atau *stand alone*.

Dalam rapat yang dipimpin Wapres di Kantor Kementerian BUMN (19/2), akhirnya menetapkan skenario *rightsizing* atau pengurangan dari 139 menjadi 102 BUMN tahun ini. Selanjutnya akan terus berkurang menjadi 87, tahun berikutnya, dan tinggal 69 buah pada tahun 2009. Tahun 2007-2008, lima perusahaan diharapkan telah selesai direstrukturisasi. Kelimanya siap menjadi BUMN "*champion*" dengan daya saing global.

Dalam melakukan *rightsizing* itu, *Trust* menghimbau adanya *auditing* yang transparan dan jujur karena hasil *auditing* itulah yang kemudian dapat dijadikan salah satu patokan untuk memisahkan BUMN mana yang, sehat, ber-sinergi, dan mana yang hanya parasit.

Profitisasi mesti menjadi tujuan pemerintah untuk jangka menengah agar ketika BUMN yang telah ditata ulang, dilego ke pihak swasta adalah *added value* atau nilai tambahnya, bukan aset-aset negara yang menjadi andalan bangsa di masa depan.

Sementara Keterlibatan Hamid Awaludin dalam kasus pencairan uang milik Tommy Soeharto di BNP Paribas menjadi fokus liputan Majalah *Tempo* (19-25/3). Berdasarkan penelusuran *Tempo*, peran Hamid dalam pencairan itu sangat besar. Dialah yang me-



ngurus semua surat pencairan dana tersebut, bahkan yang mengatur ke mana uang itu harus ditempatkan.

Dari surat Hamid yang dikirim ke Bank Paribas cabang London dan cabang Guernsey, semakin memperjelas dugaan itu. Dalam suratnya tertanggal 4 April 2005, Hamid meminta agar uang Motorbike dikirim ke rekening Menkom & HAM, yakni Bank BNI cabang Tebet. Hamid juga meminta agar uang dikirim dalam bentuk dolar AS.

Dalam wawancara dengan *Tempo*, Hamid mengaku hanya melanjutkan pendahulunya, tapi menghadapi pertanyaan *Tempo*, Hamid sempat kesal dan mengatakan, "Semuanya bermula dari (menteri) sebelum saya. Jangan tiba-tiba saya yang jadi tertuduh. Terus terang, saya trauma dengan *Tempo* gara-gara pemberitaan (korupsi) Komisi Pemilihan Umum. Secara psikologis saya trauma." Dan ketika ditanya apakah ada menerima uang Tommy Soeharto itu, Hamid malah mengatakan, "*Laa ilaaha illallah. Ya Robbi*. Siapa pun yang menuduh itu, keji banget. Mudah-mudahan Tuhan mengampuni dosanya." ■ MS, SH

Kualifikasi Euro 2008

Empat Raksasa Sepakbola Masih Terpuruk

Kedudukan sementara Portugal, Inggris, Italia dan Spanyol masih menguatirkan. Keempat negara tersebut masih harus membuktikan kelasnya sebagai raksasa sepakbola di Eropa.

Runner-up Euro 2004, Portugal, dengan nilai 7 berada di posisi ke-4 di Grup A di bawah Finlandia (nilai 11), Serbia (10) dan Polandia (10). Seperti diberitakan oleh *Tabloid Bola* terbitan Jumat (23/3), memang Portugal baru tampil empat kali atau sama dengan Serbia, sedangkan Finlandia dan Polandia sudah lima kali.

Namun menang atas Azerbaijan 3-0 dan Kazakstan 3-0, imbang dengan Finlandia 1-1, serta kalah dari Polandia 1-2 tentu bukan catatan bagus buat skuad arahan Luiz Felipe Scolari tersebut.

Sabtu lalu (24/3) Cristiano Ronaldo dkk. menjalani pertarungan yang tidak mudah. Di atas kertas, Selecao memang bisa mengatasi Belgia, tapi tanpa Deco, kreativitas serangan Portugal tentu akan terpengaruh. Deco absen akibat cedera jari tangan saat klubnya, Barcelona melibas Recreativo de Huelva 4-0 di La Liga.

Skotlandia di Grup B melejit untuk memimpin klasemen

dengan poin 9 dari empat pertandingan. Prancis membuntuti dengan angka sama. Namun *The Scottish* yang berhak memimpin klasemen karena Prancis sempat menyerah kepada Skotlandia.

Sementara Italia, setelah menjadi juara Piala Dunia 2006, seperti kehilangan roh juara. Di Napoli, Gli Azzurri sempat ditahan 1-1 oleh Lituania, pada partai perdana kualifikasi. Sewaktu menjalani pertandingan kedua, tim yang kini ditangani Roberto Donadoni itu menyerah 1-3 kepada negara yang dikalahkan Italia di final Germany 2006, Prancis, dengan angka 3-1. Setelah itu, Alberto Gilardino cs baru bisa menang atas Ukraina 2-0 dan Georgia 3-1.

Di grup E, Inggris berada di posisi terdepan dalam prediksi kandidat penguasa klasemen. Tapi faktanya, hingga empat pertandingan, Inggris (7) berada di tempat ketiga di bawah Kroasia (10) dan Rusia (8).

The Three Lions secara mengejutkan di depan 72 ribu publiknya di *Old Trafford*



foto: repro suarapembaruan

Tim Italia: masih mengkhawatirkan di Euro 2008.

sempat ditahan Masedonia 0-0. Setelah itu, Wayne Rooney dkk, tak berdaya saat menghadapi Kroasia. Kekalahan 0-2 dari Kroasia membuat posisi pelatih Steve McLaren pun mulai dicibir.

Kursi McLaren bisa kian digoyang jika pekan ini gagal menang saat tandang ke Israel. Israel bisa merepotkan seperti ketika menahan Rusia 1-1 di Moskow. Israel kini memiliki pemain tangguh seperti Ossi Benayoun, Tal Ben Halim dan Ben Sahar, yang menggarungi karier di Premiership. Mereka tentu faham karakter permainan Inggris.

Kroasia pun harus susah payah untuk bisa menang 4-3 atas Israel di Tel Aviv beberapa waktu lalu. Kemenangan ini

berkat aksi-aksi brilian pemain naturalisasi asal Brasil, Eduardo da Silva, yang menyumbang *hat-trick* bagi Kroasia.

Lebih parah lagi adalah Spanyol. Tim matador (nilai 3) di Grup F kini berada di posisi kelima di bawah Swedia (12), Denmark (7), Irlandia Utara (7) dan Latvia (3). Dari tiga pertandingan, Spanyol hanya bisa menang 4-0 atas Liechtenstein, sedangkan saat berhadapan dengan Irlandia Utara dan Swedia, Spanyol keok 2-3 dan 0-2.

Fernando Torres dkk, harus membuktikan bahwa mereka layak untuk lolos. Untuk itu, mereka harus menang atas Belgia, sehingga bisa terbang ke Swiss dan Austria di musim panas 2008. ■ SBR

Sekitar 2,5 juta Tiket Telah Dipesan

Pentas Piala Eropa selalu digandrungi. Baru digelar musim panas tahun depan, 7 – 29 Juni 2008, namun pesanan tiket sudah membludak.

Tak kurang dari 2,5 juta pesanan tiket dari 128 negara sudah dilayangkan ke Panitia Euro 2008 di Swiss dan Austria. Bahkan 233.000 fans dari daerah-daerah terpencil, seperti Aruba di benua Afrika, ambil bagian untuk memesan tiket melalui *Euro2008.com*.

Aplikasi pemesanan tiket paling lambat diterima hingga 31 Maret dan semua pemesan memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan

tiket. Menurut direktur turnamen Euro 2008 Swiss, Christian Mutschler, meski pesanan datang dari seluruh penjuru dunia, pesanan paling banyak datang dari tiga negara, termasuk dua negara tuan rumah.

Christian menambahkan, pertandingan yang paling banyak peminatnya adalah final di Wina, kemudian semifinal di Basle dan pembukaan di St.Jakob-Park di Basle.

Pemintaan tiket terbanyak adalah selama dua hari setelah dibuka 1 Maret yakni sekitar 50.000 pemesan setiap hari. Hingga kini hampir 10 ribu

aplikasi setiap hari diterima panitia dari penjuru dunia.

Jika tiket masih tersedia setelah fase pertama ini, tiket tersebut akan dijual pada awal Juni, juga melalui *Euro2008.com*, di mana pesanan yang pertama datang yang akan dilayani.

Setiap negara yang lolos ke final juga akan mendapat tiket 19 persen dari kuota tiket. Tiket tersebut akan dijual dengan cara masing-masing oleh federasi sepakbola negara-negara yang lolos setelah acara undian turnamen pada Desember mendatang. ■ SBR

Dana Minim, Pelatnas SEA Games Dikhawatirkan Terhenti

Upaya Indonesia untuk meraih tempat yang lebih terhormat di arena SEA Games 2007 di Philipina, tidak bakal mulus. Pelatnas terhadang oleh cekaknya dana. Harapan kini tertuju pada sponsor dan suntikan APBN.

Malang nian nasib bangsa ini. Urusan duit untuk meningkatkan kualitas atlit yang akan berlaga di arena SEA Games 2007, hingga detik ini belum juga beres. Akibatnya, program pemusatan latihan nasional saat ini dalam kondisi lampu kuning.

Sejumlah solusi ditawarkan. Mulai dari efisiensi anggaran, menggalakkan sponsor serta pengajuan tambahan dana APBN 2007. Jika hanya mengandalkan dana dari APBN yang hanya sebesar Rp 70 miliar, Pelatnas akan terhenti di tengah jalan.

Seperti dikutip *Kompas* (23/3), Ketua Koni Pusat Rito Subowo mengakui bahwa pihaknya telah membicarakan masalah kekurangan dana pelatnas ini dengan Menpora. Hasil pertemuan itu, dalam waktu dekat, KONI, Menpora, dan Satgas Pelatnas akan duduk bersama mengupayakan tambahan dana.

Sementara itu, Ketua Satgas

Pelatnas SEA Games Achmad Sutjipto mengajukan tiga opsi untuk melanjutkan program Pelatnas. Tanpa tambahan dana, selain APBN 2007 sebesar Rp 70 miliar, hanya sekitar 133 atlet yang dapat diberangkatkan. Atlet itu hanya yang berpotensi meraih medali emas. Bila kriteria ditambah dengan dengan potensi medali emas dan perak, jumlah atlet diperkirakan mencapai 395 orang. Untuk itu dibutuhkan tambahan dana sebesar Rp 90 miliar.

Saat ini, atlet Pelatnas SEA Games 2007 mencapai 800 orang. Mulai Jumat (23/3), Satgas akan melaksanakan tes fisik untuk menyaring atlet yang tidak memenuhi persyaratan.

Saat pengukuhan Pelatnas SEA Games 2007, 9 Februari lalu, Presiden meminta seluruh pihak, baik KONI, Menpora, induk organisasi olah raga dan atlet bekerja keras meningkatkan posisi Indonesia pada SEA Games Thailand nanti.

Di SEA Games 2005 di Ma-



Ketua KONI Rita Subowo: Upayakan tambahan dana Pelatnas dari sponsor atau APBN.

nila, untuk pertama kali Indonesia menempati posisi ke-5 di

bawah Filipina, Thailand, Vietnam dan Malaysia. ■ SBR

Pertarungan Rahman vs Condes Belum Jelas

Proses pertandingan Rahman untuk mempertahankan gelar juara tinjunya tidak semulus Chrisjon. Siapa promotor pertandingan Rahman vs Condes, belum jelas. Guna menembus kebuntuan, lelang mungkin terpaksa ditempuh.

Muhammad Rahman masih harus bersabar menuju pertandingan mempertahankan gelar kelas terbang mini (47,6 kg) IBF. Rahman yang direncanakan melawan petinju Filipina, Florante Condes, jadi molor lantaran belum ada kepastian promotor pertandingan.

Promotor nasional, Soeryo Guritno dan Albert R. Papilaya memiliki peluang yang sama untuk memanggungkan laga Rahman. Tapi Albert

terkesan lebih ngotot karena berani mengajukan bayaran Rp 750 juta, sedangkan Soeryo biasa-biasa saja. Seusai mementaskan Rahman vs Benjie Sorolla, Desember 2006, dia pernah berkata sudah enggan mempromotori Rahman.

Seperti diberitakan tabloid *Bola* (23/3), masalah makin rumit dengan keinginan promotor Amerika, Bobby Bostic yang ingin membawa laga Rahman vs Condes ke Negeri Paman Sam, karena dia punya kontrak dengan petinju Filipina tersebut. Kalau perebutan ini tak kunjung usai, tak ada jalan lain kecuali dilakukan lelang.

Menurut rencana lelang pertandingan akan

digelar pada bulan Mei di Miami AS berbarengan dengan konvensi badan tinju tersebut. Lelang harus dilakukan jika sampai 23 Maret tak juga ada keputusan soal promotor Rahman.

"Begitulah kesepakatannya, saya sudah menyiapkan semuanya untuk lelang, termasuk memanfaatkan penata tanding Sampson Lewcovic, yang sering membantu kita. Saya tidak khawatir jika ada promotor Indonesia lain yang ikut lelang," ujar Nondo. Pertarungan Rahman vs Condes dijadwalkan 5 Mei. Tapi dengan kondisi seperti ini, kemungkinan besar laga masih akan molor. Entah sampai kapan. ■ SBR

Dokter Tolak Suntik Mati

Menyusul gagasan yang dilon-tarkan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh untuk mengubah hukuman mati dari tembak mati menjadi suntik mati, para dokter bereaksi keras. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) spontan mengeluarkan larangan bagi para dokter untuk melakukan eksekusi hukuman mati dengan suntikan (*lethal injection*).

Seperti diberitakan *Republika*, 17 Maret 2007, tindakan itu dianggap melanggar sumpah dokter, disiplin hukum kedokteran dan deklarasi universal ikatan dokter internasional.

Ketua Umum IDI DR. Dr Fachmi Idris, M.Kes, berkomenter pedas. Menurutnya, boleh saja suntik mati dilakukan, tetapi jangan melibatkan dokter. Dia bahkan mengancam mencabut izin praktik dan registrasi kedokteran semur hidup bagi dokter yang melakukan eksekusi mati.



Sumpah kedokteran berada di atas hukum positif manapun

Menurut Fachmi, sumpah kedokteran berada di atas hukum positif manapun. Juga berlaku bagi dokter yang bekerja di lingkup kejaksaan dan kehakiman. Selama ini dokter hanya boleh terlibat jika eksekusi telah dilakukan eksekutor.

Tim medis tinggal memeriksa si terdakwa. Dokter juga dilarang berada di tempat eksekusi.

Majelis Kehormatan Etik IDI juga bersuara keras me-

Secara etika, dokter berupaya menyelamatkan nyawa manusia, bukan membunuhnya.

mentang dokter yang terlibat dalam eksekusi mati. Apapun peraturan atau juklak yang dibuat pemerintah, tetap saja kalangan dokter dilarang terlibat karena sudah terikat sumpah.

Sumpah dokter adalah membantu memelihara dan menjaga kehidupan dengan berbagai upaya. Menyelamatkan nyawa, bukan mematikannya.

Suntik mati pernah dilakukan di beberapa negara. Namun setelah ada deklarasi universal ikatan dokter internasional, hukuman injeksi dihapuskan. Namun di beberapa negara bagian Amerika Serikat masih ada yang memberlakukan eksekusi mati dengan injeksi.

Kronologi pelaksanaan hukuman mati melalui injeksi adalah, pertama diberikan obat penenang dulu, baru diberi obat pelawan rasa sakit atau bius. Setelah itu disuntikkan racun sianida yang bekerja cepat. Dalam hitungan menit, terpidana sudah mati. ■ RH

Unggas Hias di Kolong Ranjang

Kendala terbesar di lapangan adalah ketidaktahuan warga jenis unggas yang harus dimusnahkan dan disertifikasi.

Banjir beberapa waktu lalu ternyata tidak menyurutkan tekad Pemprov DKI untuk membebaskan wilayahnya dari wabah flu burung. Para petugas kembali ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan dan pemusnahan unggas yang tidak memenuhi syarat untuk disertifikasi.

Adalah Kelurahan Mangga Dua yang kebanyakan terdiri dari rumah-rumah toko. Di kawasan ini, petugas mengaku kesulitan melakukan proses pengawasan karena bentuk bangunan yang tinggi.

Kejadian menggelikan pernah dialami petugas ketika seorang warga berupaya menyembunyikan unggas hiasnya di kolong tempat tidur.

Sayangnya, si unggas berkicau di kolong tempat tidur sehingga ketahuan petugas.

Republika (17/03) memberitakan, Gubernur DKI Sutiyoso ikut turun ke lapangan, mengunjungi Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, untuk meninjau proses sertifikasi unggas di tempat itu.

Kesulitan yang dialami petugas diantaranya karena warga kerap menyembunyikan unggasnya. Karena itu perlu penyuluhan yang intensif. Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan, Edy Setiarto, mengundang organisasi penggemar burung untuk memberikan pengertian pada masyarakat.

Indo Pos (17/03) melaporkan, Gubernur Sutiyoso meminta DPRD DKI mempercepat pengesahan Perda Flu Burung. Dengan perda

tersebut akan lebih memudahkan aparat menindak warga yang melanggar.

Seperti halnya Pemprov DKI, Pemkot Depok juga masih menjalankan komitmennya memberantas wabah flu burung. Setelah melakukan sertifikasi unggas selama sebulan, Dinas Pertanian Kota Depok akan memvaksin 150 ribu ekor unggas selama dua pekan mendatang. Vaksin massal dilakukan sejak akhir Maret.

Pemusnahan unggas di wilayah Jakarta Timur dilaporkan *Kompas* (17/03). Pemusnahan di kawasan Rumah Susun Bidaracina, Jatinegara meliputi 45 ekor burung dara, 30 ekor ayam dan enam kandang. Unggas yang disertifikasi 4.362 ekor burung berkicau. Di Jakarta Selatan, 8.592 ekor dari 10.393 ekor unggas hias dan berkicau juga sudah disertifikasi. ■ RH

Menanti Sebuah Bleduk

Berbagai teknologi terus dicoba untuk menanggulangi semburan lumpur di Sidoarjo. Apa yang mungkin terjadi di masa depan?



foto: repro tempo

Semburan lumpur diprediksi berlangsung selama 31 tahun.

Akankah Porong, Sidoarjo, tenggelam oleh lumpur? Belakangan ini pertanyaan itu membelit benak para penduduk yang kehilangan rumah dan lahannya, juga para ilmuwan yang berusaha menghentikan semburan lumpur panas di daerah itu.

Saat ini, 600 hektar dari 59.159 hektar luas Sidoarjo sudah terbenam lumpur. Tepatnya di sekeliling pusat semburan di Banjar Panji. Tapi bukan tak mungkin, semburan lumpur yang berawal dari penggalan minyak dan gas PT Lapindo Brantas Inc. itu akan menenggelamkan seluruh kawasan itu.

Selagi para pakar disibukkan mencari solusi terbaik untuk menghentikan semburan lumpur, pada 20 Maret 2007, sekitar pukul 12:00 WIB, semburan lumpur sempat berhenti selama 30 menit.

Diberitakan *Republika*, 21 Maret 2007, peristiwa itu sempat mengagetkan para pekerja yang sedang memperbaiki tanggul cincin di sekitar pusat semburan. Menurut Juru Bicara Timnas Penanggulangan Semburan Lumpur Panas (PSLP) Rudi Novrianto, saat fenomena itu terjadi, sem-

buran yang biasanya disertai gelombang lumpur di kawah berhenti total, hanya asap putih saja yang ada, sementara gelombang lumpur dari perut bumi itu berhenti.

Tapi sekitar pukul 12.30 WIB semburan kembali muncul lagi. Hingga saat ini pekerjaan yang dilakukan Timnas PSLP adalah terfokus membuat kanal dari titik semburan menuju *spill way* dan perbaikan tanggul cincin. Sejauh ini pembuatan kanal lumpur itu tinggal mencapai 40 persen.

Sinar Harapan, 22 Maret 2007, mengulas upaya para ahli dari ITB yang memasukkan sekitar seribu buah pipa besi berdiameter 1,5 meter ke dalam mulut tumpahan lumpur. Kemudian bola-bola beton berdiameter 20 dan 40 sentimeter dimasukkan ke dalam pipa, dan menyalurkan bola-bola tersebut masuk ke dalam semburan lumpur.

Dengan cara tersebut bola-bola diharapkan akan memenuhi lubang semburan hingga ke mulutnya. Meski tidak berharap bola-bola tersebut menghentikan semburan, setidaknya bola-bola itu akan menurunkan laju semburan lumpur hingga

kemudian menghentikannya.

Di lain pihak, Brian Simpson dari Arup Geotechnic menyatakan kalau upaya tersebut termasuk usaha jangka panjang yang akan menimbulkan banyak persoalan. Salah satunya merupakan kemungkinan meletusnya semburan lumpur karena satu-satunya lubang tempat ia keluar tersumbat.

Bakal gersang

Majalah *Tempo* edisi 12-18 Maret 2007 mengulas penanggulangan semburan lumpur Lapindo ini dalam 11 halaman. Dalam salah satu bagian artikelnya yang berjudul "*Selamat Datang Bleduk Sidoarjo*," majalah ini memberitakan prediksi pakar dalam dan luar negeri tentang usia semburan lumpur tersebut.

Beberapa pakar yang berkumpul dalam lokakarya International Geological Workshop on Sidoarjo Mud Volcano di Jakarta, tiga pekan lalu, masing-masing mengajukan prediksi. Lambok M. Hutasoit, ahli hidrologi dari ITB, membuat dua prediksi. Pertama, semburan bakal berlangsung selamanya jika air yang memasok semburan itu berasal dari Gunung Arjuna dan Gunung Penanggungan, 10 kilometer dari pusat semburan.

Tetapi jika berasal dari air yang terperangkap karena proses geologi ribuan tahun lalu, semburan pasti akan berakhir.

Sementara itu, tim peneliti Ikatan Ahli Geologi Indonesia mengatakan, potensi semburan lumpur sebanyak 1.155.000.000 meter kubik. Diasumsikan debit rata-rata yang keluar per hari 100 ribu meter kubik, maka semburan lumpur akan berlangsung selama 31 tahun.

Kelompok Riset Geodesi ITB pimpinan Hasanuddin Z. Abidin memprediksi ancaman amblesnya tanah dengan kecepatan rata-rata 2 cm per hari. Pada 31 tahun mendatang, akan terbentuk kubah raksasa berkedalaman 219 meter.

Ada ancaman lain bagi Sidoarjo, yakni krisis air tanah. Lambok menjelaskan, jika semburan berasal dari sumber yang terisi kembali, akan terjadi kegersangan di sekitar pusat semburan dan pencemaran air tanah. Hal itu disebabkan, air yang tersembur berkadar garam tinggi dan berpotensi mencemari sumur penduduk.

Lahan mirip gurun itu akan seperti kawasan Bleduk Kuwu di Purwodadi, Jawa Tengah. Di Desa Kuwu ini terjadi semburan lumpur dengan volume kecil sejak ratusan tahun lalu dan kini menggenangi 45 hektar lahan. ■ RH



foto: repro korantempo

100 Tahun Gajah Mengamuk

Langkah awal penggalangan dana digelar untuk perbaikan kondisi Keraton Mangkunegaran yang mulai dimakan usia.

Tujuh orang penari pria dengan gerak luwes dan mantap berbaris di pentas dengan tombak di tangan. Akhirnya, setelah 100 tahun tarian Bedhaya Mataram Senopaten yang bernama *Dirodometo* ditampilkan kembali.

Memang ada perhelatan penting di Pura Mangkunegaran, Solo, Sabtu, 17 Maret 2007. Keraton tersebut memperingati usianya yang ke-250 tahun. Para kerabat dan pencinta yang tergabung dalam Yayasan Pemerhati Puro Mangkunegaran, Yayasan Mangadeg dan Yayasan Soeryosumirat, serta Himpunan Kerabat Mangkunegaran Soeryosumirat menggelar tarian tersebut.

Seperti diulas *Koran Tempo*,

17 Maret 2007, *Dirodometo* merupakan satu dari tiga mahakarya Mangkunegaran I atau Pangeran Samber Nyawa yang juga dinamakan Raden Mas Said, untuk mengenang perlawanan dan jasa-jasa 15 prajurit andalannya yang gugur dalam pertempuran dengan dua detasemen VOC, 400 pasukan Hamengku Buwono I dan 400 pasukan Paku Buwono III. Kejadian itu tercatat dalam buku harian Raden Mas Said, *Babad Lelampahan*.

Sang raja hanya didukung 85 prajurit, menyerbu Vredenburg dan Keraton Yogya-Mataram, pada periode 1752-1757. *Dirodometo* yang berarti gajah mengamuk karena pertempuran yang tidak seimbang. Hal itu juga menjawab

mengapa selama 100 tahun tarian tersebut tidak pernah ditampilkan. Sebab dianggap menyinggung keraton lain.

Tarian ini menggambarkan perjuangan perang di hutan Sitakepyak, selatan Rembang. Suwardi, maestro tari yang menguasai gaya dasar gerakan-gerakan tari Mangkunegaran, bersinergi dengan Daryono dari Insititut Seni Indonesia dan GPH Herwasto dari Keraton menggali manuskrip dan merekonstruksi gerakan *Dirodometo*.

Peringatan ini juga merupakan langkah awal penggalangan dana bagi perbaikan keraton yang memiliki pendapa terluas di Indonesia itu. Sayap timur keraton yang kantor dan perpustakaan sangat membutuhkan perbaikan. Banyak manuskrip kuno dalam kondisi mengunaskan. Puncak acara dilakukan pada 11 November mendatang. ■ RH

Prambanan Setelah Gempa

Batu-batu kuno bergelimpangan di kaki candi Prambanan kelika gempa usai melanda bagian tengah pulau Jawa pada 27 Mei 2006. Baru-baru ini atas bantuan UNESCO (Badan PBB yang menangani masalah Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan), Pemerintah Indonesia melakukan pemugaran terhadap bangunan purbakala tersebut.

Pemerintah Jepang juga mengulurkan bantuan untuk perbaikan candi tersebut. Seperti dilaporkan *Republika*, 13 Maret 2007, penandatanganan penyerahan bantuan itu dilakukan di Departemen Luar Negeri RI Jakarta, Senin (12/3), oleh Duta Besar Jepang untuk Indonesia Shin Ebihara kepada Direktur Asia Timur dan Pasifik Deplu RI.



Sementara itu pada Juli 2006 lalu, atas permintaan Pemerintah Indonesia, pemerintah Jepang mengirim sebuah tim yang terdiri dari beberapa orang ahli untuk melakukan survei terhadap kerusakan candi dan melaporkan hasilnya kepada Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Indonesia.

Menurut keterangan resmi dari Kedutaan Besar Jepang di Jakarta, kerja sama yang diberikan kepada Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta dimaksudkan sebagai kontribusi untuk meningkatkan pekerjaan pemugaran, melalui pengadaan perlengkapan yang diperlukan bagi pekerjaan pemugaran seperti perancah (*scaffolding*), dan lain-lain.

Festival Keraton di Kalbar

Sebanyak 23 dari sekitar 50 keraton di seluruh Indonesia mengikuti Pergelaran Seni Budaya Keraton Nusantara (PSBKN) II.

Festival budaya yang berlangsung di empat kota di Kalimantan Barat (Kalbar) mulai 13-19 Maret ini juga diikuti delegasi dari Serawak, Johor, Singapura dan Brunei Darussalam. Demikian diberitakan *Media Indonesia* dan *Bisnis Indonesia* pada edisi 13 Maret 2007.

Sementara Kalbar sebagai tuan rumah menampilkan sebanyak 11 keraton, yakni Sambas, Pontianak, Mempawah dan Ketapang. Kemudian Sanggau, Sekadau, Sintang serta Kubu, Landak, Selimbau dan Tayan.

Pembukaan PSBKN dipusatkan di Mempawah, Kabupaten Pontianak, Rabu (14/3). Sekaligus menandai dimulainya Festival Seni Budaya Melayu (FSBM) IV se-Kalbar dan Even Budaya Robo-robo, yakni sebuah tradisi memperingati kedatangan Bangsawan Bugis Opu Daeng Menambon dari Sulawesi Selatan tahun 1637 yang kemudian menjadi raja pertama Mempawah.

Beberapa kegiatan PSBKN II, antara lain kirab budaya, pagelaran upacara adat dan busana keraton serta pameran benda pusaka. Selain itu juga dilakukan napak tilas ke makam raja-raja Matan Tanjungpura dan Musyawarah Besar Forum Keraton Nusantara.

Musyawarah para raja se-Indonesia itu berlangsung di Sambas, Jumat (16/3). Sementara napak tilas berlangsung di Ketapang. Sedangkan kegiatan lainnya dilakukan di Kota Pontianak.

■ RH

Srikandi Muda di Medan Laga

Bibit-bibit unggul atlet puteri Indonesia mulai bermunculan. Diantaranya dari cabang boling dan basket.



Shalima Zalsha

foto-foto: repro korantempo

Meski sibuk berlatih boling di Pelatnas SEA Games 2007, Shalima Zalsha masih sempat membaca komik favoritnya, *Detective Conan*. Meski demikian, untuk bermain dan jalan-jalan dengan sahabat-sahabatnya, tak lagi bisa dilakukannya. Latihan boling kini menyita seluruh waktunya.

Shalima adalah atlet boling termuda yang ikut SEA Games 2007. Remaja puteri kelahiran 4 Desember 1990 ini berambisi menyumbangkan medali emas untuk Indonesia. Kecintaannya pada olahraga ini dimulai saat dia berumur 10 tahun.

Ada pula Amalia Fajrina Nabila, pemain basket termuda di Proliga. Alia, panggilan akrabnya, memiliki segudang prestasi. Mendapat anugerah pemain terbaik di Kejuaraan Voli Junior di Sragen, Jawa Tengah, Februari lalu. Dia kemungkinan besar akan dipanggil masuk Pelatnas SEA Games 2007. Namun pemanggilan nama-nama calon atlet voli nasional itu menunggu kejuaraan nasional voli selesai beberapa bulan mendatang.

Koran Tempo dalam dua edisi hari Minggunya, yakni 11 Maret dan 18 Maret 2007, mengulas kiprah kedua atlet remaja puteri yang cemerlang ini. Keduanya,

meski sibuk mengumpulkan prestasi di lapangan, tetapi masih bisa menikmati kehidupan mereka selayaknya gadis-gadis remaja lain.

Shalima, sebelum masuk Pelatnas, suka berjalan-jalan dengan teman-temannya. Makan sate padang, minum jus stroberi dan menonton film di bioskop. Dia juga suka berselancar di internet dan membaca.

Dengan malu-malu, remaja puteri yang terdaftar di Sekolah Menengah Atas Al-Izhar itu mengaku sudah punya pacar. Saat ditanya bagaimana membagi waktu dengan sang pacar, dia menjawab mereka cuma bertemu di sekolah.

Alia yang masih berumur 13 tahun sama saja. Remaja yang tingginya 170 cm ini suka berkumpul dengan teman-temannya untuk sekedar jalan-jalan dan makan sepulang sekolah. Mengaku tak suka membaca, di rumah dia menghabiskan waktunya dengan menonton televisi, terutama film kartun *Doraemon*.

Siswi Sekolah Menengah Pertama 7 Bekasi ini mengaku belum punya pacar karena merasa masih kecil. Saat ini dia tengah berlatih bersama atlet puteri klub Jakarta BNI Taplus untuk bermain di Proliga. Direkrut sebagai open striker, Amalia harus berlatih dua kali sehari, pagi dan sore. Berpisah sementara dari orangtuanya karena tinggal di Hotel Atlet Century dengan rekan-rekannya yang lebih senior.

Diperkenalkan orangtua

Shalima mengenal boling saat sang mama mengajaknya main boling di Pluit. Sejak itu, dia jatuh cinta pada olahraga yang satu ini. Mirna Hakim, sang mama, mendaftarkan puterinya ke turnamen junior kelompok umur di bawah umur 15 tahun di Ancol. Shalima menyabet juara pertama.

Saat ini dia terdaftar sebagai anggota Jaya Ancol Bowling Club. Turnamen pertamanya di luar negeri adalah Asian School, Australia. Dia menyabet juara pertama. Gelar juara disabetnya pula di turnamen Milo International Junior All Star 2002 di Malaysia, Shalin Cup 2003 Malaysia, dan Junior

U-18 Indonesia Open 2005. Medali perak diperolehnya pada Asian Championship 2006 untuk kategori beregu.

Pada SEA Games 2007 di Bangkok nanti, Shalima memprediksi Indonesia akan menyabet banyak medali emas di cabang boling, sebab persaingan di SEA Games tak seketat di kejuaraan Asia.

Pengalaman yang nyaris sama juga dialami Alia. Olahraga voli diperkenalkan ayahnya, Ahmad Sakdan, yang memang mantan atlet voli. Melihat bakat puterinya, sang ayah memasukkannya ke klub voli Vortal di Bekasi ketika dia masih duduk di Sekolah Dasar Negeri Jaka Setia 2 Bekasi.

Kejuaraan pertamanya adalah ketika memperkuat tim SMPnya pada pekan olahraga dan seni antar SMP dua tahun lalu. Timnya berhasil meraih gelar juara ketiga. Sejak itu Alia mengikuti berbagai pertandingan.

Begitu direkrut klub Jakarta BNI Taplus, Alia mengaku senang dan deg-degan. Rasa mindernya karena harus bermain dengan para senior perlahan pupus, karena seniornya bersikap terbuka dan menganggapnya sebagai adik.

Saat ini, Alia dan timnya harus bersiap-siap membuka Proliga putaran keempat seri pertama di Jakarta, menghadapi pendatang baru, Jakarta Popsivo Polwan. ■ RH



Amalia Fajrina Nabila

STOP MEROKOK

Pada Waktu Merokok Anda Mengisap Kurang Lebih 4000 Bahan Kimia, Termasuk Racun-racun Ini:

Acetone (Penghapus cat)

Hydrogen Cyanide (Racun yang digunakan untuk pelaksanaan hukuman mati)

Naphtylamine *

Toluidine

Ammonia (Pembersih lantai)

Methanol (Bahan bakar roket)

Urethane *

Pyrene *

Toluene (Pelarut industri)

Arsenic (Racun semut putih)

Dimethylnitrosamine

Dibenzacridine *

Napthalene (Kapur barus)

Phenol

Buthane (Bahan bakar korek api)

Cadmium * (Dipakai pada accu mobil)

Polonium - 210 *

Carbon Monoxide (Gas racun yang keluar dari knalpot)

Vinyl Chloride * (Bahan plastik PVC)

Benzopyrene *

*** BAHAN PENYEBAB KANKER**
(SUMBER : HEALTH DEPARTMENT OF WESTERN AUSTRALIA)

Iklan Layanan Masyarakat ini disampaikan Oleh:

BERITA INDONESIA

dan



AL-ZAYTUN



PUSAT PENDIDIKAN,
PENGEMBANGAN BUDAYA TOLERANSI DAN PERDAMAIAN

Bekerja sama dengan:

YAYASAN JANTUNG SEHAT INDONESIA